

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2001, Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, dengan luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.435,00 km², atau hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km². Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar dengan persentase sebesar 35,83 persen dari total luas wilayah Provinsi, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,53% dari total luas wilayah Gorontalo.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
75.01	Kabupaten Gorontalo	2.143,48	17,24
75.02	Kabupaten Boalemo	1.736,61	13,97
75.03	Kabupaten Bone Bolango	1.891,49	15,21
75.04	Kabupaten Pohuwato	4.455,60	35,83
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	2.141,86	17,22
75.71	Kota Gorontalo	65,96	0,53
75	Provinsi Gorontalo	12.435,00	100

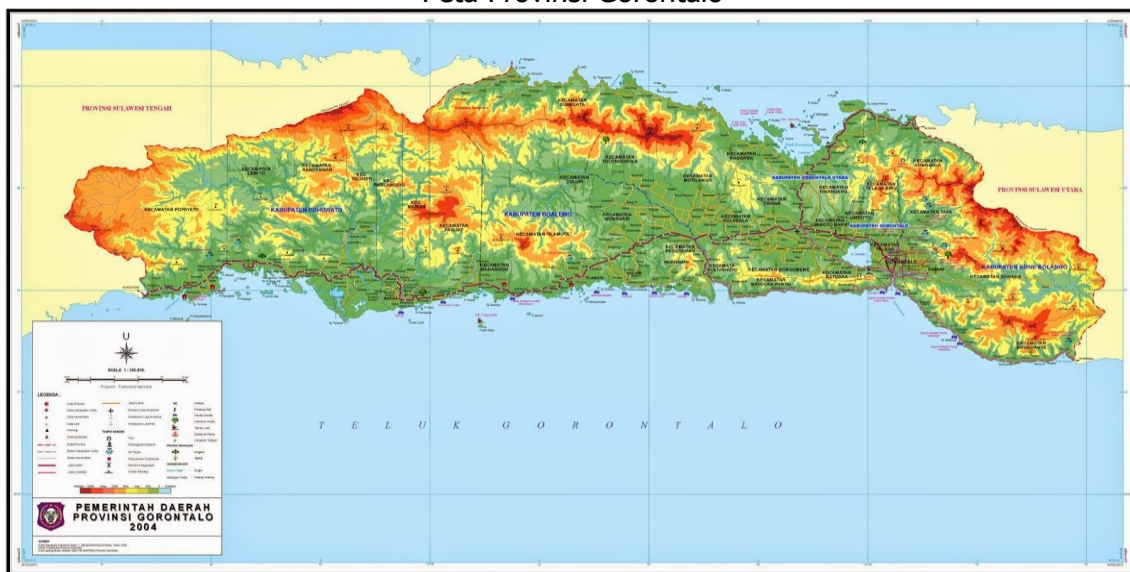
Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, 2016 (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Gorontalo terletak diantara $0^{\circ}19'$ – $1^{\circ}15'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23'$ - $123^{\circ}43'$ Bujur Timur. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 :

Gambar 2.1
Peta Provinsi Gorontalo



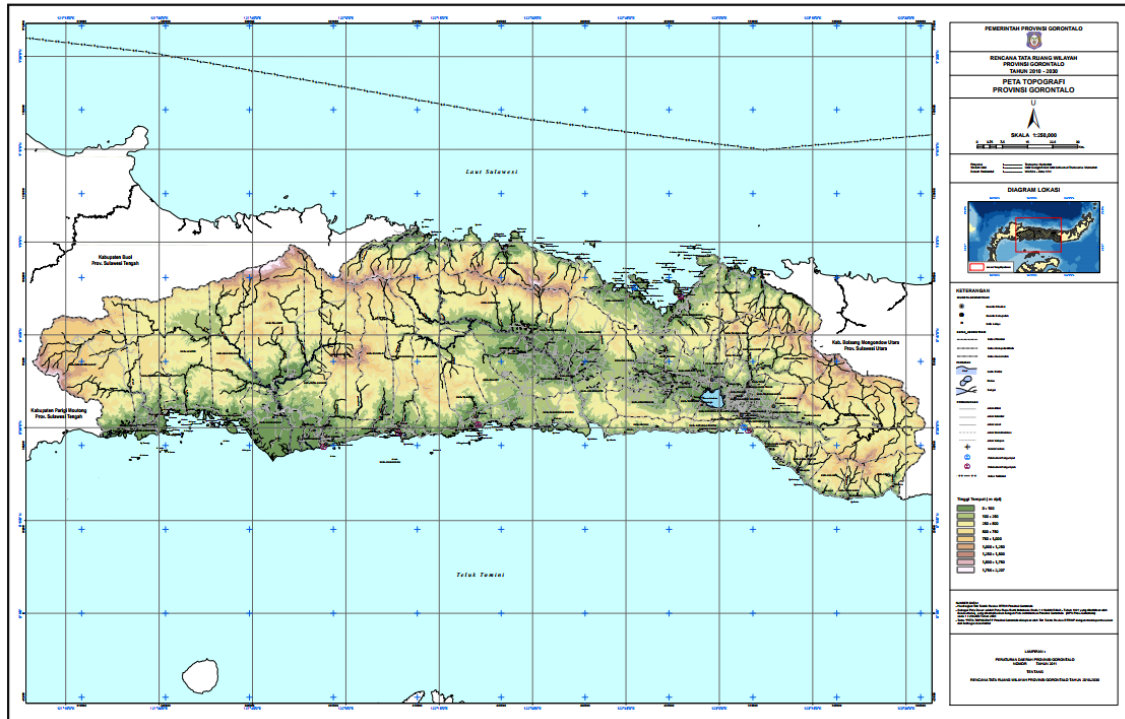
Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

C. Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pihawato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara

0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo,



Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulung kurang dari 200 meter yang

terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuartar.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	128.552	10,52
B	2-8	74.112	6,07
C	8-15	66.528	5,45
D	15 – 40	113.997	9,33
E	> 40	838.355	68,63
Jumlah		1.221.544	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2016

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

D. Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (*S. Bachri, dkk, 1993*) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuanannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur

Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen - Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokopa (Tmd) yang terdiri dari: batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQI) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai diendapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (QI) yang dimulai pada Plistosen Atas - Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batugamping Klastik).

Kegiatan tektonik di daerah ini diduga telah berlangsung sejak Eosen hingga Oligosen yang diawali dengan kegiatan magmatik yang menghasilkan satuan gabro. Masih pada Eosen terjadi pemekaran dasar samudera yang berlangsung hingga Miosen Awal dan ini

menghasilkan lava bantal yang cukup luas. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh terjadinya retas - retas yang umumnya bersusunan basa dan banyak menerobos Formasi Tinombo. Pada Miosen selain terjadi pengendapan Formasi Randangan dan Formasi Dolokapa terjadi juga kegiatan magma yang menghasilkan Diorit Bone. Diduga pada waktu itu terjadi juga penunjaman dari arah utara ke arah selatan di laut Sulawesi, yang disebut sebagai Jalur Tunjaman Sulawesi Utara (Simanjuntak, 1986).

Kegiatan magmatik Diorit Bone yang berlangsung sampai Miosen Tengah dilanjutkan oleh kegiatan magmatik Diorit Boliohuto yang berlangsung hingga Miosen Akhir. Bersamaan dengan kegiatan magmatik tersebut terjadilah pengangkatan pada akhir Miosen Akhir.

Pada akhir kegiatan magmatik Diorit Boliohuto terjadilah kegiatan gunungapi yang menghasilkan batuan Gunungapi Pani dan Breksi Wobudu. Pada waktu itu Jalur Tunjaman Sulawesi Utara diduga masih aktif dan menghasilkan sejumlah sesar geser di bagian barat daerah penyelidikan.

Pada Kala Pliosen terjadi juga kegiatan magmatik yang menghasilkan batuan terobosan Granodiorit Bumbulan yang kemudian diikuti oleh kegiatan gunungapi. Kegiatan gunungapi ini berlangsung hingga Plistosen Awal dan menghasilkan batuan Gunungapi Pinogu. Sementara itu retas-retas yang bersusunan basal, andesit dan dasit masih terbentuk.

Pada akhir Pliosen hingga Plistosen di daerah ini terdapat pengendapan yang membentuk satuan Batugamping Klastik pada laut dangkal. Sedangkan pada Plistosen Awal terbentuk endapan danau dan endapan sungai tua. Ketiga satuan tersebut telah mengalami pengangkatan pada sekitar akhir Plistosen.

Pada akhir Plistosen hingga sekarang terjadi proses pendataran serta kegiatan tektonik yang masih aktif. Proses pendataran menghasilkan endapan aluvium sedangkan kegiatan tektonik menghasilkan beberapa sesar geser dibagian timur serta mengakibatkan terangkatnya satuan Batugamping Terumbu.

E. Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km.

Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun.

Berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/20015, Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) satuan wilayah sungai yang menjadi kewenangan pusat, yaitu :

1. Wilayah Sungai (WS) WS Paguyaman;

Wilayah Sungai Paguyaman ini secara administrasi terletak pada tiga kabupaten yaitu Kab. Boalemo yang beribukota Tilamuta dengan 5 kecamatan dan 55 buah desa/kelurahan, Kab. Pohuwato yang beribukota Marisa dengan 5 kecamatan dan 49 desa/kelurahan dan Kab. Gorontalo yang beribukota Limboto dengan 12 kecamatan dan 122 desa/kelurahan.

2. Wilayah Sungai (WS) Limboto-Bolango-Bone

Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone merupakan wilayah sungai lintas provinsi karena wilayahnya terletak di beberapa provinsi, yaitu sebagian besar wilayahnya terletak di Provinsi Gorontalo, bagian hulu sungai sebagian terletak di Kecamatan Bolaang Uki, Bintauna dan Sang Tombolang yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, serta sebagian kecil wilayahnya terletak di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Wilayah Sungai (WS) Randangan, dan sebagian kecil WS Dumoga– Sangkup.

Wilayah Sungai Randangan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pohuwato, terutama dalam bidang sosial ekonomi karena Wilayah Sungai Randangan merupakan suatu wilayah sungai yang cukup luas

diperuntukan bagi penyediaan Sumber Daya Air dan juga memiliki potensi geografis yang strategis untuk dikembangkan.

TABEL 2.3
WILAYAH SUNGAI (WS) PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km ²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.04.A2	6.888,7
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.266,2
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	4.179,4

Sumber : BWS Sulawesi II, Gorontalo

TABEL 2.4
WILAYAH SUNGAI (WS) DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DI PROVINSI GORONTALO

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)	WS Randangan	
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Limboto,	38. DAS Samia	1. DAS Moutong
2. DAS Limba,	2. DAS Tolinggula,	39. DAS Tapaibuhu	2. DAS Molosipat
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Potanga,	40. DAS Soklat	3. DAS Dudewulo,
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Saowea	4. DAS Randangan,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Imana	5. DAS Beringin,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Taludaa	6. DAS Sukadamai,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliyohuto,	44. DAS Sogitia	7. DAS Wonggarasi,
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Dulukapa,	45. DAS Bilolatunga	8. DAS Sidorukun,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Deme 1,	46. DAS Tombulilato	9. DAS Patihu,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Dunu,	47. DAS Ombulo	10. DAS Dinga
11. DAS Sambati,	11. DAS Bubalango,	48. DAS Bangahu	Motolohu,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Tengah,	49. DAS Mopuya	11. DAS Lemito,
13. DAS Lamu,	13. DAS Monano,	50. DAS Kaidundu	12. DAS Lomuli,
14. DAS Botumoitto,	14. DAS Tudi,	51. DAS Uabanga	13. DAS Milangodaa,
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Tolanga,	52. DAS Tongo	14. DAS Popayato
16. DAS Salilama,	16. DAS Datahu,	53. DAS Olele	
17. DAS Tabulo,	17. DAS Tolangio,	54. DAS Oluhuta	
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Pontolo,	55. DAS Molotabu	
19. DAS Libuo	19. DAS Buda,	56. DAS Botutonuo	
20. DAS Marisa	20. DAS Bubode,	57. DAS Modelamo	
	21. DAS Waluhu,	58. DAS Buluango	
	22. DAS Luluo,	59. DAS Huangobutu	
	23. DAS Tolotio,	60. DAS Inengo	
	24. DAS Bilungala,	61. DAS Bolango-Bone	
	25. DAS Momungaa,	62. DAS Pohe	
	26. DAS Leato,	63. DAS Tanjung Kramat	
	27. DAS Tamboo,	64. DAS Bongo	
	28. DAS Biliohulu	65. DAS Lopo	
	29. DAS Baladu	66. DAS Kayu Bulan	
	30. DAS Mooti	67. DAS Bilihu Timur	
	31. DAS Sipatana	68. DAS Langgula	
	32. DAS Sogu	69. DAS Lamu	
	33. DAS Popalo	70. DAS Limo'o	
	34. DAS Posso	71. DAS Lobuto Timur	
	35. DAS Sanbungo	72. DAS Lobuto	
	36. DAS Tolopato	73. DAS Bilihu Barat	
	37. DAS Butoimola	74. DAS Huango	

Sumber : BWS Sulawesi II, Gorontalo, 2016

b) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang memiliki nilai sejarah dibuat oleh Alm. Bapak Nani Wartabone (Pahlawan Nasional asal Gorontalo) untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu berperahu, memancing, renang dan rekreasi/perkemahan.

c) Cekungan Air Tanah

Secara umum berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, kondisi hidrologi berdasarkan wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah yang terdiri atas :

1. Cekungan Air Tanah (CAT) Bone

Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo, dan sebagian wilayah Kab. Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara (cekungan air tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 326 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123° 30'8.53" - 123° 44'6.89" Bujur Timur dan 0°24'06.01" - 0°36'50.34" Lintang Utara.

2. Cekungan Air Tanah (CAT) Pinogu

Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 112 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123°19'40.13" - 123°30'59.01" Bujur Timur dan 0°25'59.34" - 0°32'05.13" Lintang Utara.

3. Cekungan Air Tanah (CAT) Tombulilato

Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 35 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123° 14'24.94" - 123° 22'35.01" Bujur Timur dan 0°18'31.27" - 0°21'31.01" Lintang Utara.

4. Cekungan Air Tanah (CAT) Gorontalo

Daerah ini terletak di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 481 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 122° 41'5.44" - 123° 20'27.85" Bujur Timur dan 0°26'17.97" - 0°41'10.08" Lintang Utara.

5. Cekungan Air Tanah (CAT) Molombulahe

Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo dan sebagian Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 433 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 122° 21'27.24" - 122° 45'20.84" Bujur Timur dan 0°34'21.85" - 0°46'30.52" Lintang Utara.

6. Cekungan Air Tanah (CAT) Mahinoto

Daerah ini terletak di wilayah Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 75 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 122° 13'52.84" - 122° 26'39.50" Bujur Timur dan 0°44'46.55" - 0°48'10.63" Lintang Utara.

7. Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti

Daerah ini terletak di Kabupaten Boalemo dan sebagian wilayah Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 59 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 121° 59'7.08" - 122° 10'17.66" Bujur Timur dan 0°27'17.64" - 0°35'38.66" Lintang Utara.

8. Cekungan Air Tanah (CAT) Marisa

Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 234 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 121° 42'51.25" - 121° 58'52.96" Bujur Timur dan 0°24'46.77" - 0°33'33.34" Lintang Utara.

9. Cekungan Air Tanah (CAT) Popayato

Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo dan sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (cekungan air tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 92 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 121° 19'13.92" - 121° 32'12.69" Bujur Timur dan 0°28'01.77" - 0°35'01.03" Lintang Utara.

F. Klimatologi

Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya berada di dekat garis khatulistiwa, mempunyai suhu udara yang cukup panas yang berkisar antara 26° c - 28° c. Adapun data Klimatologi Provinsi Gorontalo yang terjadi dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Data Klimatologi Provinsi Gorontalo 2012-2016

Tahun	Temperatur Rata-Rata (°C)					Jumlah Curah Hujan				Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata kelembaban udara (%)	Kecemapat n rata-rata angin (m/det)
	Rata-Rata	Max		Min		Max		Min				
		Temp (°C)	Bulan	Temp(°C)	Bulan	Jlh	Bulan	Jlh	Bulan			
2012	26.8	33.5	Okt	22.6	Agt & Sept	400	Des	38	Agt	1009.5	80.3	1.9
2013	26.5	32.6	Okt	23.2	Sept	389	Mar	66	Sept	1009.9	83.7	1.5
2014	27.3	34.4	Okt	21.4	Sep	228	Mei	0	Sept	1009.6	78.9	1.9
2015	27.0	33.9	Mar	23.0	Feb	336	Mei	37	Mar	1009.7	83.3	1.8
2016	26.9	33.5	Okt	22.1	Agt & Des	322	Feb	7	Agt	1009.3	82.5	2.1
Rata-rata per Tahun		33.58		22.46		335		29.6		1009.6	81.74	1.84

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Prov. Gorontalo, 2016

Dari Tabel 2.5, dapat kita lihat kecenderungan suhu maksimum selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Gorontalo terjadi di bulan Oktober dengan temperatur rata-rata adalah 33,58° C. Sedangkan suhu minimum cenderung terjadi di bulan September dengan temperatur minimum rata-rata per tahun adalah 22,46 ° C. Untuk jumlah curah hujan maksimum cenderung terjadi di bulan Mei dengan rata-rata curah hujan

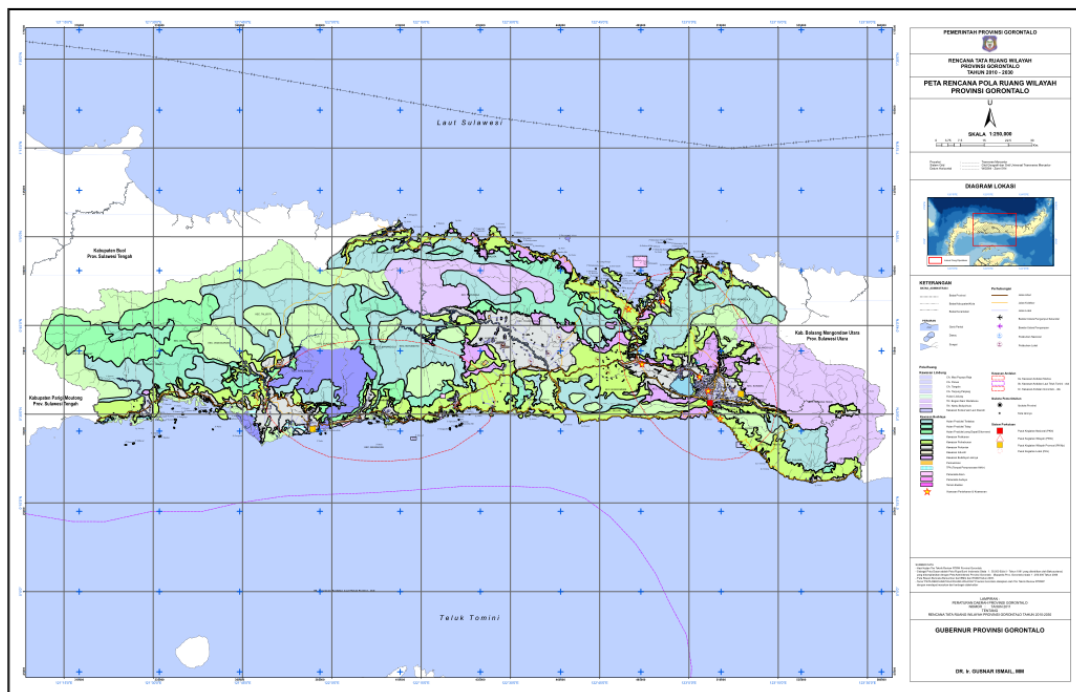
maksimum 335 mm per tahun. Curah hujan minimum cenderung terjadi di bulan Mei dengan rata-rata curah hujan per tahun adalah 29,6 mm. Rata-rata tekanan udara sebesar 1.009,6 mb, rata-rata kelembaban udara 81,74% dan kecepatan rata-rata angin sebesar 1,84 m/det.

G. Penggunaan Lahan

Arahan Pola ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang bersifat lintas kabupaten dan atau kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten/kota diserahkan wewenang dan tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing.

Gambar 2.3

Peta Pola Ruang Provinsi Gorontalo



Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2016

Berdasarkan Perda Provinsi Gorontalo No.4 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas kawasan lindung nasional dan provinsi serta kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis.

a. Kawasan Lindung Nasional dan Provinsi

Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- Kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung. Kawasan Lindung Provinsi meliputi:

- Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
- CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
- Kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

b. Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Wilayah Provinsi meliputi kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Gorontalo dan rencana pengembangan kawasan budidaya Provinsi Gorontalo.

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi:

a). Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.

1) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah :

- Kabupaten Bone Bolango;
- Kabupaten Gorontalo Utara;
- Kabupaten Boalemo;
- Kabupaten Gorontalo; dan
- Kabupaten Pohuwato.

2) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah :

- Kabupaten Bone Bolango;
- Kabupaten Gorontalo;
- Kabupaten Boalemo;
- Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- Kabupaten Pohuwato.

3) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah:

- Kabupaten Gorontalo;
- Kabupaten Boalemo;
- Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- Kabupaten Pohuwato.

4) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan di beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone

Secara umum, Luasan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo terdiri dari 24 % hutan konservasi (HSA/KPA), 25% hutan lindung (HL), 11% hutan produksi tetap (HP), 30% hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan konversi (HK) sebesar 10% dari total luas lahan hutan Provinsi Gorontalo. Adapun luas arealnya dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6

Luas Kawasan Hutan dan Perairan dibagi berdasarkan fungsi

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha)							Luas Total (Ha)
		HSA dan KPA	HL	HPT	HP	HPK	APL	Tubuh Air	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Gorontalo	24,191	13,127	40,775	17,783	2,377	115,564	2,912	216,729
2	Kabupaten Boalemo	11,532	29,785	45,981	14,783	4,800	79,714	957	187,552
3	Kabupaten Pohuwato	39,705	136,024	82,613	41,572	67,038	64,329	1,009	432,290
4	Kabupaten Bone Bolango	104,744	15,710	18,816	824	-	45,004	392	185,490
5	Kabupaten Gorontalo Utara	16,173	7,953	65,454	15,556	5,576	60,437	213	171,362
6	Kota Gorontalo	-	427	-	-	-	6,291	90	6,808
Total Berdasarkan Penafsiran Citra		196,345	203,026	253,639	90,518	79,791	371,339	5,573	1,200,231
Total Berdasarkan SK Menhut No. 325/Menhut-II/2010		196,653	204,608	251,097	89,879	82,431	-	-	824,668

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2016

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan sehingga pada tahun 2016 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.186,76 Ha.

Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 2.7

Luas Kawasan Hutan dibagi berdasarkan fungsi

No	Kabupaten/Kota	Hutan Produksi					
		Terbatas	Tetap	Konversi	Hutan Lindung	Konservasi	Jumlah luas Hutan
1	Kabupaten Gorontalo	41.899,34	17.714,10	2.404,43	13.124,91	24.777,84	99.920,62
	Kabupaten Boalemo	44.240,79	14.537,49	4.783,09	28.364,91	10.970,62	102.896,90
	Kabupaten Pohuwato	83.304,56	41.476,29	10.610,28	136.278,06	39.685,14	311.355,33
	Kabupaten Bone Bolango	18.830,08	824,1	0	15.634,23	104.732,42	140.020,83
	Kabupaten Gorontalo Utara	64.326,20	15.540,08	5.554,01	7.894,38	16.207,93	109.552,60
	Kota Gorontalo	0	0	0	470,48	0	470,48
	Total	252.600,97	90.092,06	23.352,81	210.766,97	196.373,95	764.186,76

Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo, 2016

Pelepasan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi. Berikut Luas pelepasan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.8
Pelepasan Kawasan Hutan Di Provinsi Gorontalo

No	Pelepasan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo	Luas (Ha)
I.	Total Pelepasan (Perkebunan Kelapa Sawit)	55.941.85
	PT. Sawindo Cemerlang Tahun 2011	18.860.00
	PT. Sawit Tiara Nusa Tahun 2011	6.934.48
	PT. Inti Global Laksana Tahun 2011	9.257.49
	PT. Banyan Tumbuh Lestari Tahun 2012	12.026.88
	PT. Banyan Tumbuh Lestari Tahun 2014	8863.00
III.	Total Rencana Pelepasan (Transmigrasi)	571.74
	Rencana Pelepasan Transmigrasi Sandalan	571.74

Sumber : BPKH Wil XV Gorontalo. 2016

b). Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

1) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura merupakan budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:

- ✓ Kecamatan-Kecamatan: Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Talamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
- ✓ Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;
- ✓ Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
- ✓ Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
- ✓ Kecamatan-Kecamatan: Marisa, Iemito, Paguat, Patilanggio, Randangan, Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan
- ✓ Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.

2) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas peternakan lokasinya sebagai berikut:

- ✓ Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;
- ✓ Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;

- ✓ Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;
 - ✓ Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - ✓ Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.
- 3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut:
- ✓ Kecamatan-kecamatan: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Talamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: Taluditi, Lemito, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango.

c). Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan untuk perikanan terdiri dari perikanan darat (air tawar) dan perikanan pantai (payau). Di Provinsi Gorontalo, perikanan darat terutama di arahkan pada perairan Danau Limboto, sementara perikanan payau diarahkan pada kawasan pantai selatan dan pantai utara.

Perikanan payau (tambak) diarahkan pada lahan-lahan pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, diutamakan pada areal-areal dimana terdapat sungai yang langsung bermuara ke pantai dan terdapat kawasan hutan mangrove yang berbatasan dengannya atau di sekitarnya. Di banyak lokasi di Provinsi Gorontalo, lokasi tambak berbatasan dengan lokasi hutan mangrove ke arah pantai, dan berbatasan dengan sawah ke arah daratan. Luas kawasan yang dapat disawahkan

dan atau ditambakkan adalah sekitar 10.600 ha (hampir 1 % dari wilayah provinsi), menyebar terutama hampir di sepanjang pantai selatan ditambah dengan sedikit (relatif lebih sempit) di kawasan pantai utara. Kabupaten Boalemo akan menjadi andalan pengembangan sektor perikanan tambak, walaupun juga terdapat di Kabupaten Gorontalo. Luas areal pertambakan dapat lebih luas, bila sebagian wilayah pantai dapat direhabilitasi. Meskipun sebagian telah terdegradasi, kebanyakan kawasan pantai dan hutan mangrove di provinsi ini masih memiliki kondisi yang sangat baik dan dapat menunjang sektor pertambakan bila dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan yang tepat, Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu kawasan andalan untuk budidaya perikanan tambak.

Kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Gorontalo meliputi :

1. Kawasan perikanan air tawar yang lokasinya di:
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: Wonggarasi Timur, Wonggarasi Barat, Randangan, dengilo, paguat, patilangio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: suwawa, kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: telaga, telaga biru, limboto, batudaa, bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan
 - ✓ Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo.
2. Kawasan budidaya tambak yang lokasinya di:
 - ✓ Pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;
 - ✓ Pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kawasan budidaya perikanan laut terdiri atas :
 - ✓ Budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato;
 - ✓ Budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.

d). Kawasan Peruntukan Pertambangan

Selain potensi pada budidaya pertanian pada umumnya, sesuai data Dinas Pertambangan, Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi tambang yang besar, khususnya logam emas, perak, tembaga, dan batuan/mineral andesit, batu gamping, zeolit, granit, pasirkwarsa, sirtu, toseki dan kaolin. Meskipun resminya, lokasi tambang-tambang ini pada umumnya masih dalam taraf eksplorasi, kenyataannya sebagian dari tambang-tambang ini telah ditambang oleh rakyat setempat tanpa izin, dikenal di Gorontalo sebagai "PETI" (Penambangan Emas Tanpa Izin). Yang menjadi permasalahan adalah secara kebetulan, sebagian dari lokasi pertambangan ini terletak di kawasan hutan suaka alam, taman nasional atau hutan lindung, seperti di Marisa (Gunung Pani) dan di Suwawa.

Kawasan peruntukan pertambangan lokasinya berada di kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango

e). Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:

1. Kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;
3. Kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota

f). Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi:

1. Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato
2. Pantai Libuo Kecamatan Paguat;
3. Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;
4. Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;
5. Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;
6. Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;

7. Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;
8. Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;
9. Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;
10. Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;
11. Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat
12. Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan.

g). Kawasan Peruntukan Permukiman

1. Kawasan permukiman perkotaan merupakan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan. Bangunannya permukiman perkotaan cenderung terkonsentrasi di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat. Di Provinsi Gorontalo sendiri, pada kawasan ini penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun).
2. Kawasan permukiman perdesaan, didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango, bangunan-bangunan perumahan di kawasan ini diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung

h). Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya merupakan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo, dan TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur ruang wilayah dalam RTRW Provinsi Gorontalo direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul

transportasi skup nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Perencanaan sistem transportasi berorientasi pada pengembangansistem transportasi yang lebih mikro sehingga kapasitas pelayanannya sampai ke pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan produksi skala mikro perdesaan. Kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan pengembangan pusat-pusat kegiatan skup kabupaten maupun yang lebih mikro. Interkoneksi antar pusat-pusat tersebut secara fisik didukung oleh rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan informasi dan telekomunikasi, sistem jaringan energi dan sistem jaringan sumber daya air. Prasarana dan sarana lintas kabupaten kota tersebut secara sistemik direncanakan mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatannya.

Gambar 2.4
Peta Struktur Ruang Provinsi Gorontalo



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

1. Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Gorontalo

a) Sistem Pusat Perkotaan Nasional

Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lingkungan. Sebagai arahan vertikal Pemerintah Pusat, PKN dan PKW tercantum dalam RTRW Nasional 2008-2028, sementara PKL

tercantum dalam RTRW Provinsi karena merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota yang dikonsultasikan dengan Menteri. Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dikembangkan PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.

Tabel 2.9
Arahan Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Gorontalo

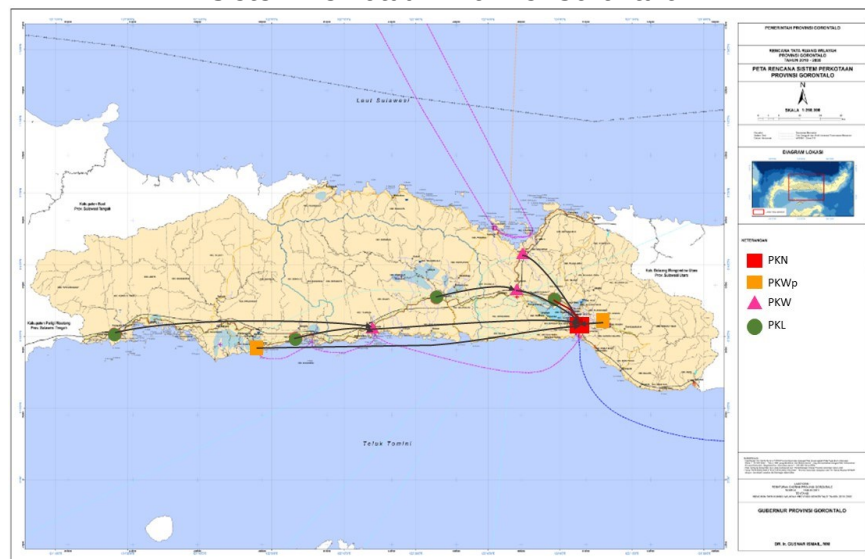
Sistem Perkotaan	PP Nomor 13 Tahun 2017	PP Nomor 26 Tahun 2008	Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011
PKN	Kota Gorontalo (II/C/1)	Kota Gorontalo (I/C/1)	Kota Gorontalo (I/C/1)
PKW	Tibawa (Kabupaten Gorontalo II/C/2)) Kwandang (Kabupaten Gorontalo Utara II/C/2)) Tilamuta (Kabupaten Boalemo II/C/2))	Isimu (Kabupaten Gorontalo II/C/2)) Kwandang (Kabupaten Gorontalo Utara II/C/2)) Tilamuta (Kabupaten Boalemo II/C/2))	Isimu (Kabupaten Gorontalo II/C/2)) Kwandang (Kabupaten Gorontalo Utara II/C/2)) Tilamuta (Kabupaten Boalemo II/C/2))
PKL			Suwawa (PKWp (Kabupaten Bone Bolango)) Marisa (PKWp (Kabupaten Pohuwato)) Limboto (Kabupaten Gorontalo) Paguyaman (Kabupaten Gorontalo) Paguat (Kabupaten Pohuwato) Popayato (Kabupaten Pohuwato)

Sumber : RTRW Nasional dan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi Gorontalo memiliki 1 PKN dan 3 PKW. Pembaharuan arahan kebijakan spasial nasional yang harus diterapkan di Provinsi Gorontalo, yakni pengalihan PKW di wilayah Kabupaten Gorontalo, dari Isimu menjadi Tibawa. Satu-satunya PKN, yakni Kota Gorontalo yang juga merupakan ibukota Provinsi Gorontalo telah mencapai tahap pengembangan/peningkatan fungsi pusat pertumbuhan, sementara Tibawa, Kwandang, dan Tilamuta merupakan PKW dengan status pengembangan baru. Sehubungan dengan arahan kebijakan spasial nasional tersebut, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Boalemo berfungsi melayani cakupan area pelayanan yang lebih besar bila dibandingkan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato dalam konteks cakupan simpul pelayanan.

Pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan secara umum berada di kawasan perkotaan. Secara umum pula kebutuhan hasil pertanian diproduksi di kawasan perdesaan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Gorontalo dan wilayah luarnya, baik berupa bahan mentah maupun barang siap konsumsi. Begitu juga sebaliknya kebutuhan barang hasil industri manufaktur diproduksi di atau disalurkan melalui kawasan perkotaan. Agar interkoneksi antar pusat kegiatan, serta pelayanan prasarana wilayah efisien dan efektif maka perlu diwujudkan sistem interkoneksi antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang berdaya guna besar. Sistem perkotaan Provinsi Gorontalo dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman.

Gambar 2.5
Sistem Perkotaan Provinsi Gorontalo



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Hirarki sistem perkotaan ditentukan dengan menetapkan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal. Daerah Perkotaan di wilayah Gorontalo mempunyai beberapa fungsi baik fungsi utama maupun pendukung. Pusat kegiatan perkotaan dalam hierarki dan skup pelayanannya, berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di kota Gorontalo, dengan jenis pelayanan Jasa Pemerintahan,

Perdagangan, dan Pertanian, Perikanan, Industri, dan Pariwisata, diarahkan sebagai kota pusat pertumbuhan ekonomi yang bergerak dinamis di sektor perdagangan dan jasa yang berorientasi pada upaya menunjang produktivitas, industri pengolahan serta distribusi komoditas unggulan di bidang pertanian, pusat pengolahan ikan tangkap, dan wisata bahari yang memanfaatkan potensi Teluk Tomini.

Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sistem perkotaan di wilayah Provinsi Gorontalo ditentukan sebagai berikut:

- Pusat Kegiatan Nasional

Kota Gorontalo ditetapkan sebagai PKN. Kota Gorontalo dengan jenis pelayanan Jasa Pemerintahan, Perdagangan, dan Pertanian, Perikanan, Industri, dan Pariwisata, diarahkan sebagai kota pusat pertumbuhan ekonomi yang bergerak dinamis di sektor perdagangan dan jasa yang berorientasi pada upaya menunjang produktivitas, industri pengolahan serta distribusi komoditas unggulan di bidang pertanian, pusat pengolahan ikan tangkap, dan wisata bahari yang memanfaatkan potensi Teluk Tomini.

Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), strategi pengembangan Kota Gorontalo yaitu:

- Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi pusat pertumbuhan wilayah kota agropolitan.
- Meningkatkan aksesibilitas ke kota Paguyaman, Kwandang, Manado, Bitung, Limboto, Toli-toli, dan Palu melalui pengembangan sistem transportasi antar-moda (jalan, pelabuhan, dan kereta api).
- Mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan baku dari sentra-sentra produksi pertanian dan kelautan/perikanan Teluk Tomini yang melayani wilayah Pulau Sulawesi.
- Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan yang terpadu dengan pengembangan potensi wisata daerah lain di Teluk Tomini melalui pengembangan dukungan aksesibilitas dan akomodasi wisata berstandar internasional.
- Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang memenuhi standar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif.

- Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya.
- Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dengan kota Paguyaman dan Kwandang dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase.
- Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
- Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Gorontalo – Tapa – Suwawa – Limboto dan Isimu untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.

- Pusat Kegiatan Wilayah

Berdasarkan RTRW Nasional, kota-kota yang ditetapkan sebagai sebagai PKW adalah Isimu, Tilamuta dan Kwandang. Pusat-pusat kegiatan Wilayah (PKW) tersebut mempunyai jenis pelayanan Jasa, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Pemerintahan dan Pariwisata.

- *Kota Isimu* diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang berorientasi pada kegiatan perdagangan dan pelayanan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan.
- *Kota Tilamuta* diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertanian dan perkebunan.
- *Kota Kwandang* diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang berorientasi pada aktivitas perkebunan dan kehutanan.
- *Kota Marisa* diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertambangan dan pariwisata.

Sedangkan Kota Marisa akan dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp). Peningkatan status tersebut didasarkan pada kondisi dan potensi serta nilai strategis

kawasan tersebut dalam fungsi dan peran melayani kegiatan-kegiatan ekonomi skala wilayah.

- Pusat Kegiatan Lokal

Ibukota-ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau dalam PKN menjadi PKL yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai jasa pemerintahan kabupaten; serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Gorontalo adalah Limboto, Paguyaman, Suwawa, Paguat, dan Popoyato. Dalam hal ini, Suwawa diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang berorientasi pada aktivitas pendidikan, pariwisata dan agroindustri.

Pusat-pusat kegiatan tersebut diarahkan mempunyai interkoneksi yang sinergis dengan sifat *simbiosis mutualistis* dengan dukungan prasarana wilayah baik berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi. Selain daripada itu fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas rekreasi dan olahraga, pasar dan sebagainya yang mendukung keadilan dan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga kualitas hidup dan berpenghidupan di semua tempat baik metropolitan, kota sedang, kota kecil maupun desa relatif sama.

Sistem perkotaan direncanakan sinergis dengan sistem perdesaan terutama dengan sentra produksi komoditas lokalnya tempat berkembangnya komunitas-komunitas lokal yang mempunyai kualitas jatidiri dan kemandirian yang tumbuh berkembang dalam tatanan yang semakin kondusif.

Kriteria PKN, PKW, PKL

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

PKN minimal memenuhi fungsinya sebagai:

1. pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang cakupan pelayanannya berskala nasional atau beberapa provinsi;

2. pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional/beberapa provinsi,
3. simpul transportasi skup pelayanan nasional/beberapa provinsi;
4. jasa pemerintahan nasional/beberapa provinsi;
5. jasa publik lainnya yang skup pelayanannya nasional/ beberapa provinsi;
6. berdaya dorong pertumbuhan wilayah sekitarnya;
7. potensil menjadi pintu gerbang internasional.

Ketersediaan minimal fasilitas umum:

- Perhubungan : pelabuhan udara (primer), dan atau pelabuhan laut (utama) dan atau terminal tipe A.
- Ekonomi : pasar induk antar wilayah, perbankan skup nasional dan internasional.
- Kesehatan : rumah sakit umum tipe A.
- Pendidikan : perguruan tinggi.

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW minimal berfungsi sebagai:

- pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang melayani beberapa kabupaten;
- pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani beberapa kabupaten;
- simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten; serta
- pusat pelayanan publik lainnya untuk beberapa kabupaten.

Fasilitas minimal yang harus tersedia di PKW:

- Perhubungan : pelabuhan udara (sekunder), dan atau pelabuhan laut (pengumpan), dan atau terminal bis tipe B.
- Ekonomi : pasar induk regional, perbankan skup provinsi dan nasional.
- Kesehatan : rumah sakit umum tipe B.
- Pendidikan : perguruan tinggi.

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL minimal berfungsi sebagai:

1. pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga;

2. simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga;
3. jasa pemerintahan kabupaten/kota; serta
4. pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan/kabupaten tetangga.

Fasilitas minimal yang harus tersedia di PKL:

- Perhubungan : terminal bis tipe C.
- Ekonomi : pasar induk kabupaten/kota, perbankan skup kab./kota.
- Kesehatan : rumah sakit umum tipe C.
- Pendidikan : SLTA.

b) Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Sistem jaringan transportasi nasional terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara yang dikembangkan secara terintegrasi agar dapat menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional. Adapun arahan sistem jaringan transportasi di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Arahan Sistem Jaringan Transportasi Nasional di Provinsi Gorontalo

Sistem Jaringan Transportasi	PP Nomor 13 Tahun 2017	PP Nomor 26 Tahun 2008	Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011
Darat			
Jalan Bebas Hambatan	- Isimu – Gorontalo (II/6) - Limboto – Gorontalo (II/6)	- Isimu – Gorontalo (II/6) - Limboto – Gorontalo (II/6)	- Isimu – Limboto - Limboto – Gorontalo - Sulawesi Utara – Atinggola – Isimu - Isimu – Marisa - Marisa – Molosipat – Sulawesi Tengah
Laut			
Pelabuhan	- Anggrek (Pelabuhan Pengumpul (II/3)) - Kwandang (Pelabuhan Pengumpul (II/3))	- Gorontalo (Pelabuhan Nasional (I/3))	- Anggrek (Pelabuhan Pengumpul) - Gorontalo

Sistem Jaringan Transportasi	PP Nomor 13 Tahun 2017	PP Nomor 26 Tahun 2008	Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011
	<ul style="list-style-type: none">- Gorontalo (Pelabuhan Pengumpul (II/3))- Tilamuta (Pelabuhan Pengumpul (II/3))- Bumbulan (Pelabuhan Pengumpul (II/3))- Gorontalo (Pelabuhan Angkutan Penyeberangan (II/1))- Marisa (Pelabuhan Angkutan Penyeberangan (II/1))		<ul style="list-style-type: none">(Pelabuhan Pengumpul)- Kwandang (Pelabuhan Pengumpul)- Tilamuta (Pelabuhan Pengumpulan)- Bumbulan (Pelabuhan Pengumpulan)
Udara	Djalaludin (Bandara Pengumpul Sekunder (II/3))	Djalaludin (Bandar Udara Sekunder (II/3))	Djalaludin (Bandar Udara Sekunder)

Sumber: Arahan Nawacita (PK RTRW Provinsi Gorontalo, 2016)

Arahan sistem jaringan transportasi darat dan udara nasional di Provinsi Gorontalo pada dasarnya tidak mengalami perubahan sejak RTRW Nasional dikonsepsikan melalui PP Nomor 26 Tahun 2008 sampai dengan PP Nomor 13 Tahun 2017. Pada sistem jaringan transportasi udara, Bandara Djalaludin yang berlokasi di wilayah Kabupaten Gorontalo berada dalam proses pemantapan sebagai bandara pengumpul sekunder. Pada sistem jaringan transportasi darat, RTRW Nasional telah mengakomodasi trase Isimu – Gorontalo dan Limboto – Gorontalo sebagai jalan bebas hambatan (bagian GORR 1 dan GORR 2), sementara trase Marisa – Tolinggula masuk kategori program strategis dalam arahan Nawacita.

Tabel 2.11

Arahan Sistem Jaringan Transportasi Nasional di Provinsi Gorontalo

No	Nama Infrastruktur	Trase	Pelaksana
1	Gorontalo Outer Ring Road 1	Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango	Kementerian PU dan Pera
2	Gorontalo Outer Ring Road 2	Kabupaten Gorontalo	Kementerian PU dan Pera
3	Marisa – Tolinggula	Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara	Kementerian PU dan Pera

Sumber: Arahan Nawacita (PK RTRW Provinsi Gorontalo, 2016)

Di sisi lain, arahan sistem jaringan transportasi laut nasional merupakan yang paling transformis dibandingkan sistem jaringan transportasi lainnya di Provinsi Gorontalo.

Meskipun belum diamanatkan untuk memiliki pelabuhan utama, Provinsi Gorontalo diarahkan memiliki 3 pelabuhan pengumpul yakni Gorontalo, Anggrek, dan Kwandang sesuai konsep RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030, serta pemantapan 2 pelabuhan pengumpul baru yakni Tilamuta dan Bumbulan yang sebelumnya berstatus sebagai pelabuhan pengumpan. Selain itu, Pelabuhan Gorontalo dan Marisa ditetapkan sebagai pelabuhan angkutan penyeberangan.

Sebagai tambahan, untuk mendukung sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Pusat melalui RTRW Nasional mengarahkan pengembangan jalur kereta api antarkota yang menghubungkan Manado – Bitung – Gorontalo. Dengan dimasukkannya agenda tersebut dalam indikasi program utama RTRW Nasional, maka jalur kereta api di Provinsi Gorontalo paling lambat akan terwujud pada tahun 2019.

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. KSP di Provinsi Gorontalo terdiri atas KSP dari sudut kepentingan:

a. Pertumbuhan Ekonomi

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Pawonsari (Paguyaman Wonosari) dan sekitarnya, KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya;
2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, yaitu KSP Kota Gorontalo dan sekitarnya dan KSP Marisa dan sekitarnya;
3. Pengembangan kawasan terpadu industri, perdagangan dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api berupa KSP Isimu;
4. Pengembangan Kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan KSP Anggrek;
5. Kawasan potensi pengembangan ekonomi Gorontalo - Paguyaman -Kwandang dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri; dan

6. Pengembangan kawasan Minapolitan, meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato serta kawasan pengelolaan Teluk Tomini.

Adapun kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ini meliputi 1) peningkatan produktifitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis; dan 2) pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif.

b. Sosial dan Budaya

KSP dari kepentingan Sosial Budaya meliputi:

1. Kota pendidikan Gorontalo, Kawasan pendidikan Kabila-Suwawa di Kabupaten Bone Bolango dan kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo;
2. Kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya Telaga-Gorontalo-Tapa.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi 1) pengembangan kawasan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya; dan 2) pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya.

c. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi yang Ramah Lingkungan

KSP dari kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan, meliputi:

1. Blok pertambangan di Kabupaten Pohuwato;
2. Blok pertambangan di Kabupaten Pohuwato-Boalemo;
3. Blok pertambangan di Kabupaten Boalemo-Gorontalo;
4. Blok pertambangan di Kabupaten Gorontalo; dan
5. Blok pertambangan di Kabupaten Bone Bolango.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi yang ramah lingkungan meliputi 1) budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; 2) pengembangan energi baru terbarukan sumberdaya pengganti bahan tambang yang akan habis; dan 3) pengembangan kegiatan minapolitan (perikanan tangkap,

budidaya dan pengelolaan hasil perikanan) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

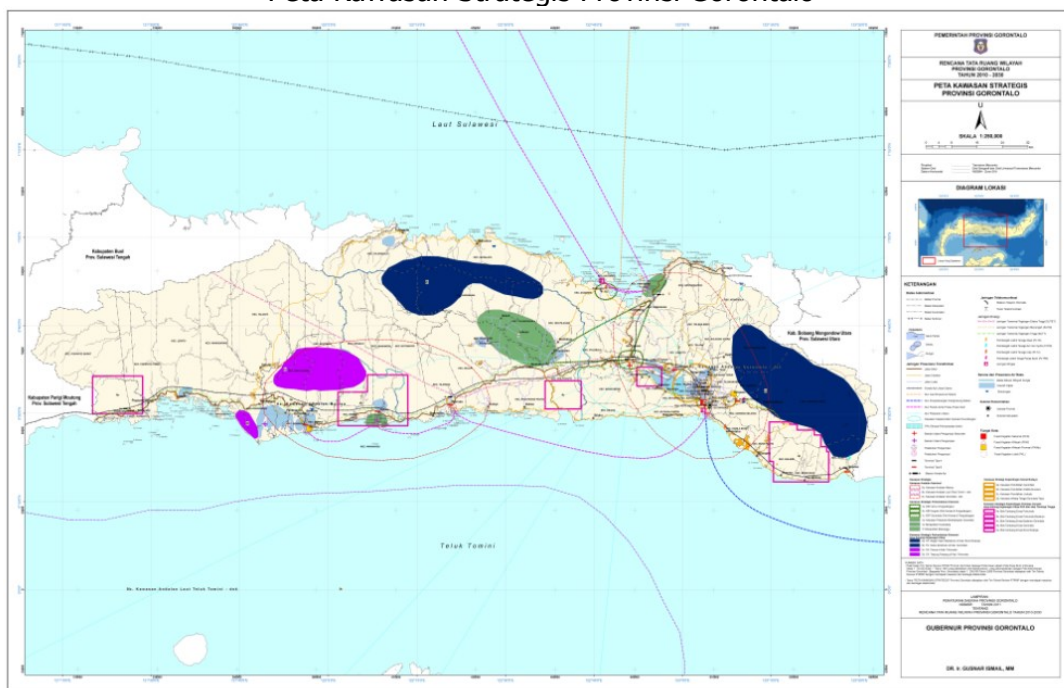
d. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

KSP dari sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan meliputi:

1. Kawasan strategis Danau Limboto;
2. Suaka Margasatwa Nantu di Desa Mohiolo di Kabupaten Gorontalo dan Desa Pangea, Kabupaten Boalemo;
3. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan
4. Kawasan strategis penanggulangan banjir di DAS Limboto-Bolango-Bone yang bermuar pada Danau Limboto.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi 1) pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung; 2) penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; dan 3) pelestarian ekosistem dan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Dalam konteks kawasan budidaya, Provinsi Gorontalo diarahkan mengembangkan kawasan budi daya bernilai strategis nasional yang memiliki kemampuan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah di sekitarnya, melalui perwujudan kawasan andalan dan kawasan strategis nasional. Kawasan andalan mencakup kawasan berfungsi strategis pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, sementara Kawasan Strategis Nasional (KSN) terdiri dari kawasan strategis pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, serta daya dukung lingkungan. Secara umum, kawasan budidaya strategis di Provinsi Gorontalo berada pada tahapan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan.

Tabel 2.12
Arahan Kawasan Budidaya Strategis di Provinsi Gorontalo

Lokasi	PP Nomor 13 Tahun 2017	PP Nomor 26 Tahun 2008	Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011
Kota Gorontalo	- Kawasan Andalan Gorontalo (Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Pertambangan - Pariwisata - Panas Bumi (II/A/2) - (II/F/2) - (II/B/2) - (III/C/2) - (II/E/2) - (II/I/2))	- Kawasan Andalan Gorontalo (Pertanian - Perikanan - Perkebunan (I/A/2) - (II/F/2) - (I/B/2) - (III/C/2))	- Kawasan Andalan Gorontalo (Pertanian, Perikanan, Perkebunan)
Kabupaten Pohuwato	- Kawasan Andalan Marisa (Pertanian - Perkebunan - Perikanan - Pertambangan (III/A/2) - (II/B/2) - (II/F/2) - (II/C/2))	- Kawasan Andalan Marisa (Pertanian - Perkebunan - Perikanan - (III/A/2) - (II/B/2) - (I/F/2))	- Kawasan Andalan Marisa (Pertanian, Perkebunan, Perikanan)
Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo		- Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya (Perikanan - Pariwisata)	- Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya (Perikanan - Pariwisata)
Kabupaten Gorontalo Utara	- KSN Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (II/E/2)		
Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara	- KSN Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo - Paguyaman - Kwandang (II/A/2)		- KSP Agrobisnis dan Agroindustri Gorontalo - Paguyaman - Kwandang
Kota Gorontalo	- KSN Lingkungan Hidup		- KSP Terpadu Sejarah,

Lokasi	PP Nomor 13 Tahun 2017	PP Nomor 26 Tahun 2008	Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011
Kabupaten Gorontalo	Danau Limboto (II/B/2)		Seni Kerajinan, dan Tirta Limboto, Gorontalo, Tapa
Kabupaten Gorontalo			- KSP Terpadu Industri, Perdagangan, dan Simpul Transportasi Isimu
Kabupaten Gorontalo Utara			- KSP Terpadu Pelabuhan, Peti Kemas, dan Pergudangan Anggrek
Kabupaten Boalemo			- KSP Pertanian Berkelanjutan Randangan, Wonosari, dsk
Kabupaten Gorontalo Utara			- KSP Minapolitan Kwandang
Kabupaten Boalemo			- KSP Minapolitan Mananggu
Kabupaten Bone Bolango			- KSP Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo			- KSP Taman Nasional Nantu
Kabupaten Pohuwato			- KSP Cagar Alam Panua
Kabupaten Pohuwato			- KSP Cagar Alam Tanjung Panjang
Kota Gorontalo			- KSP Pendidikan Gorontalo
Kabupaten Bone Bolango			- KSP Pendidikan Kabila – Suwawa
Kabupaten Gorontalo			- KSP Pendidikan Limboto
Kabupaten Pohuwato			- KSP Pertambangan Pohuwato
Kabupaten Boalemo			- KSP Pertambangan Boalemo
Kabupaten Gorontalo			- KSP Pertambangan Gorontalo
Kabupaten Bone Bolango			- KSP Pertambangan Bone Bolango

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, kawasan budaya strategis nasional di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan setelah diakomodasinya KSN Perbatasan Negara yang mencakup wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, KSN Gorontalo – Paguyaman – Kwandang yang sejak dahulu oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo diusulkan untuk menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), serta KSN Lingkungan

Hidup Danau Limboto yang sebelumnya berstatus sebagai KSP (Kawasan Strategis Provinsi). Sementara dalam hal kawasan andalan, fungsi strategis kawasan andalan laut tomini dan sekitarnya dilebur ke dalam Kawasan Andalan Gorontalo dan Kawasan Andalan Marisa karena lokasinya yang sama-sama menghadap Teluk Tomini.

Secara umum, tabel di atas memperlihatkan tumpang tindih antara KSN dengan KSP. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk peleburan, pengalihan, maupun pertimbangan kembali apakah KSP yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2011 bersifat strategis bagi pengembangan daerah. Secara ringkas penyesuaian yang perlu dilakukan terkait arahan KSN adalah pengalihan status kawasan yang sebelumnya berstatus KSP menjadi KSN, peleburan materi KSP Pendidikan menjadi muatan pola ruang peleburan dan KSP Lingkungan Hidup yang dalam tabel dideskripsikan sebagai Cagar Alam, Suaka Alam, dan Taman Nasional menjadi Kawasan Lindung.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi.

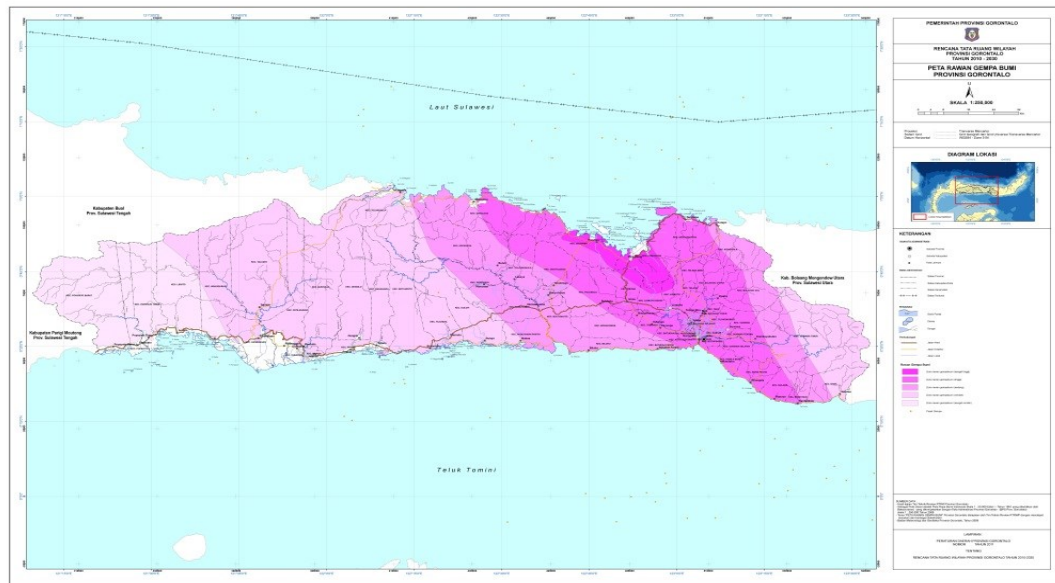
Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempabumi tektonik.

Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

Kawasan rawan bencana di Provinsi Gorontalo diantaranya adalah kawasan rawan gempa. Kawasan yang rawan bencana gempa bumi di Provinsi Gorontalo terdapat pada dua kawasan, yaitu kawasan laut pantai Utara dan kawasan laut pantai Selatan. Pusat gempa yang berada di bagian laut utara bersifat merusak, sedangkan yang ada di laut selatan merupakan sebaran gempa yang tidak merusak. Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik endogen yang menyebabkan patahan. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal.

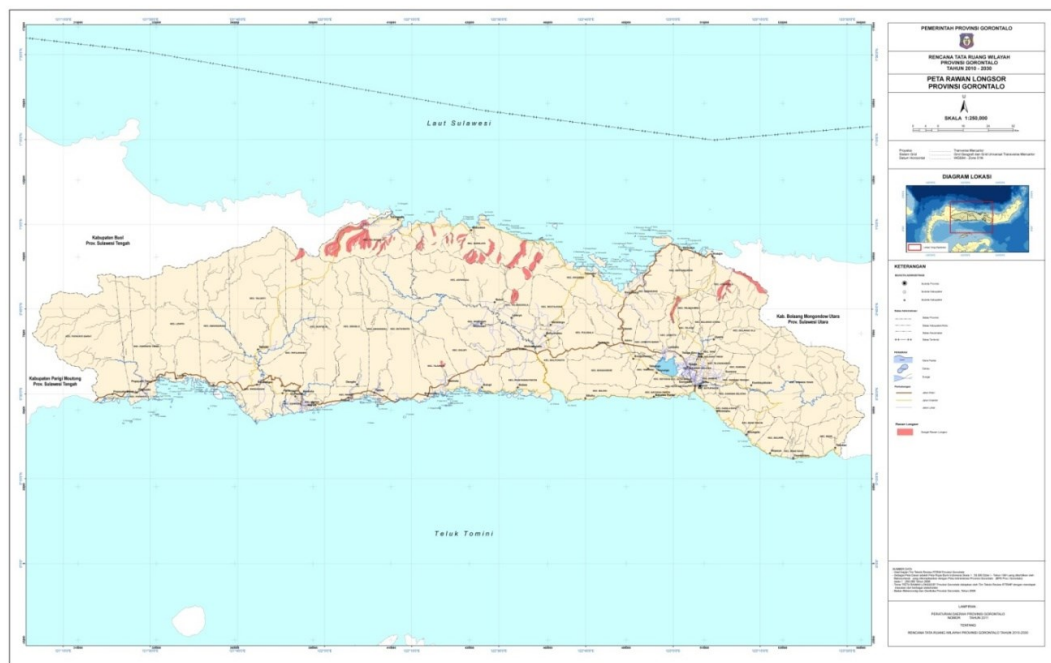
Kawasan Rawan Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsor tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada

vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsor dan banjir bandang.

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula seperti terlihat dalam peta kawasan rawan longsor, gambar 2.8

Gambar 2.8
Peta Kawasan Rawan Longsor



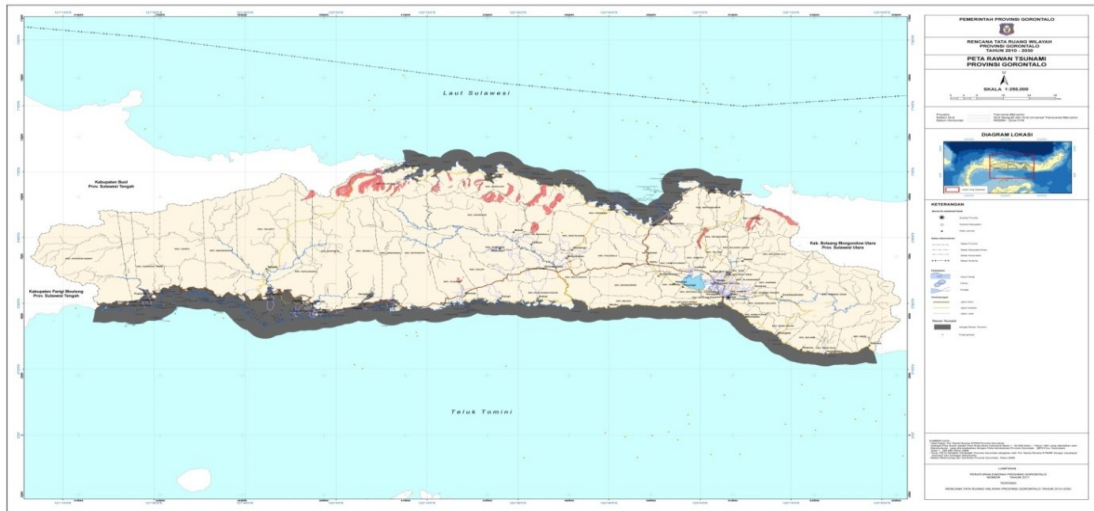
Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai $\pm 655,8$ km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh

wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan. Hal ini seperti terlihat dalam gambar 2.9

Gambar 2.9
Peta Kawasan Rawan Tsunami



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

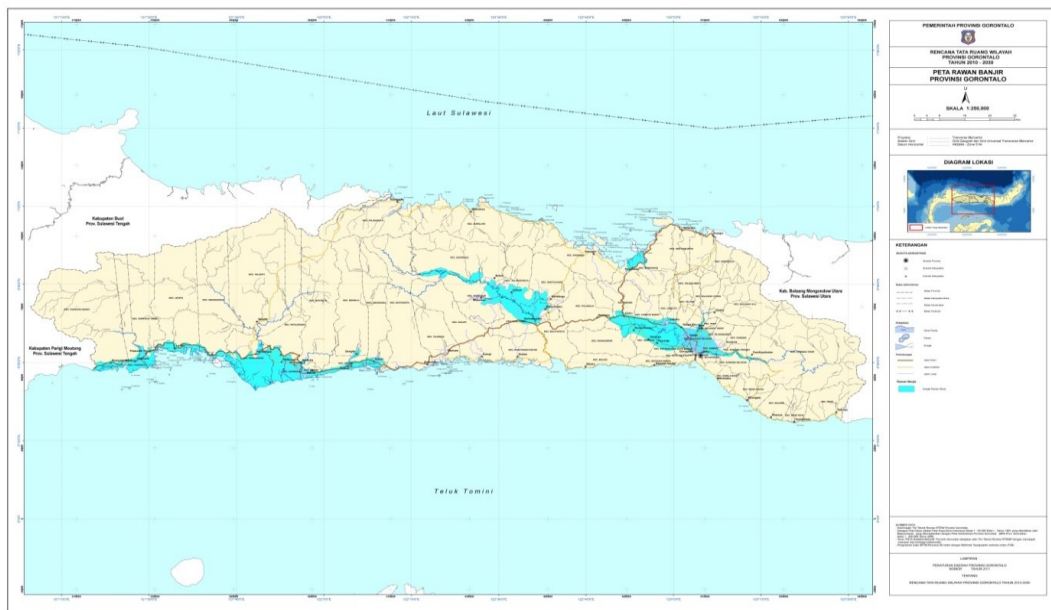
Kawasan Rawan Banjir

Banjir terjadi di samping karena faktor alam juga disebabkan faktor manusia seperti pembuangan sampah yang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan badan air sungai, sehingga menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal akibatnya aliran air terhambat, menjadi meluap dan menggenang. Selain itu, kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan-bangunan yang jelas tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya tergenang. Penebang-penebang pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air sudah sangat sedikit. Faktor alam lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras.

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan

Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata seperti terlihat dalam peta rawan banjir, gambar 2.10

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Banjir



Sumber :Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.3 Demografi

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk, penduduk Provinsi Gorontalo menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 berpenduduk sebanyak 1.150.765 jiwa, yang terdiri dari 576.482 jiwa penduduk laki-laki dan 574.283 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk 2015-2016 sebesar 1,55 persen. Sementara Rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap perempuan (*sex ratio*) sebesar 100,38. Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo rata-rata Provinsi Gorontalo yaitu 94 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk di 6 Kabupaten/Kota yang cukup beragam. Kepadatan tertinggi

terletak di Kota Gorontalo dengan kepadatan sebesar 3.130 jiwa/Km², dan terendah di Kabupaten Pohuwato sebesar 34 jiwa/km². Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 336.734 dengan rata-rata anggota KK 3,42 jiwa (3-4 jiwa).

Tabel 2.13

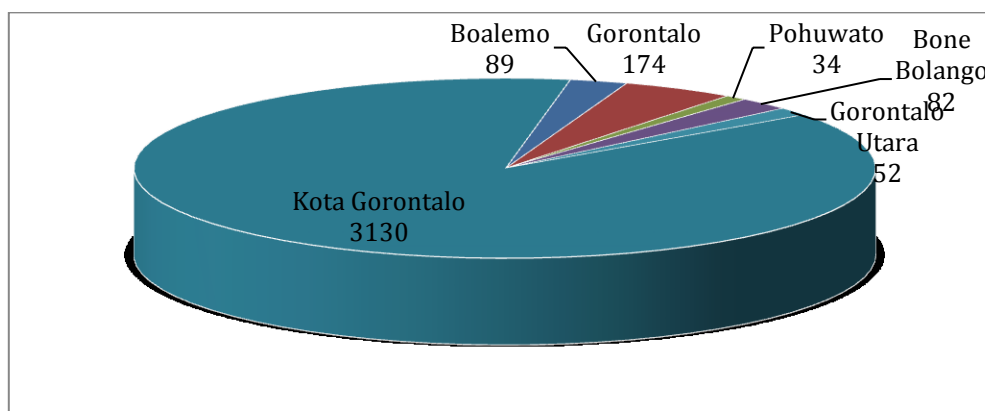
Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
01	Kab. Gorontalo	363.146	365.781	368.149	370.441	372.856
02	Kab. Boalemo	137.476	141.547	145.580	149.832	154.008
03	Kab. Pohuwato	136.324	139.675	143.338	146.896	150.385
04	Kab. Bone Bolango	146.773	148.971	151.094	153.166	155.238
05	Kab. Gorontalo Utara	107.092	108.324	109.502	110.700	111.824
06	Kota Gorontalo	189.476	193.692	197.970	202.202	206.454
Provinsi Gorontalo		1.080.287	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Gambar 2.11

Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel 2.14

Jumlah Penduduk Gorontalo dan *Sex Ratio* menurut Kabupaten/kota, 2016

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	<i>Sex Ratio</i>
1.	Kabupaten Gorontalo	186.388	186.468	372.856	99,96
2.	Kabupaten Boalemo	78.117	75.891	154.008	102,93
3.	Kabupaten Pohuwato	76.202	74.183	150.385	102,72
4.	Kabupaten Bone Bolango	77.805	77.433	155.238	100,48
5.	Kabupaten Gorontalo Utara	56.589	55.235	111.824	102,45
6.	Kota Gorontalo	101.381	105.073	206.454	96,49
Provinsi Gorontalo		576.482	574.283	1.150.765	100,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Gorontalo menurut kelompok Umur,
Provinsi Gorontalo tahun 2016

No	Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	56.579	54.386	110.965
2	5 – 9	54.792	52.091	106.883
3	10 – 14	54.023	51.481	105.504
4	15 – 19	54.773	53.364	108.137
5	20 – 24	53.124	53.513	106.637
6	25 – 29	48.157	48.383	96.540
7	30 – 34	44.129	44.571	88.700
8	35 – 39	43.487	43.730	87.217
9	40 – 44	41.722	41.143	82.865
10	45 – 49	36.087	35.411	71.498
11	50 – 54	28.653	28.651	57.304
12	55 – 59	22.006	22.514	44.520
13	60 – 64	16.240	16.937	33.177
14	65 – 69	10.855	12.242	23.097
15	70 – 74	6.452	7.851	14.303
16	75+	5.403	8.015	13.418

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan komposisi jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo beragama islam sebesar 96,82 % atau 1.114.174 jiwa, sedangkan 3,18 % atau 36.479 jiwa dari jumlah penduduk beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk menurut Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Wilayah	AGAMA				
	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
Kota Gorontalo	198.328	5.043	2.671	248	970
Kabupaten Gorontalo	367.829	2.125	1.081	37	21
Kabupaten Boalemo	148.647	2.156	1.386	2.634	35
Kabupaten Pohuwato	139.738	7.398	1.789	1.443	-
Kabupaten Bone Bolango	154.648	403	186	-	10
Kabupaten Gorontalo Utara	104.980	6.005	827	11	-
Provinsi Gorontalo	1.114.170	23.130	7.940	4.373	1.036

Sumber: Biro Kesra dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, 2016

Penduduk menurut Pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

Tabel 2.17

Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2015

Kabupaten/Kota	Tidak Punya	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
Kabupaten Gorontalo	32,00	32,51	12,91	16,82	5,75
Kabupaten Boalemo	31,00	38,90	11,89	13,83	4,40
Kabupaten Pohuwato	29,16	37,55	12,28	14,29	6,72
Kabupaten Bone Bolango	19,83	36,79	13,95	19,89	9,54
Kabupaten Gorontalo Utara	32,65	35,10	13,38	14,91	3,96
Kota Gorontalo	12,97	30,10	9,97	32,56	14,40
Provinsi Gorontalo	26,41	34,39	12,34	19,23	7,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2016

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

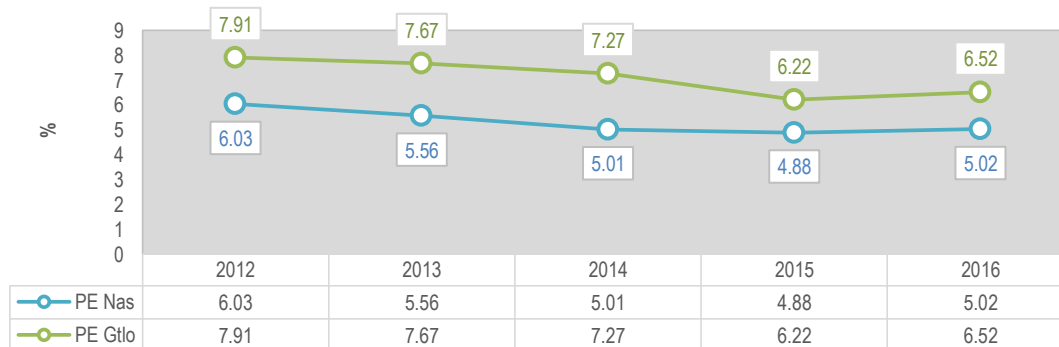
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016), Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang fluktuatif, seperti yang tergambar pada grafik berikut :

Gambar 2.12

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo 2012-2016

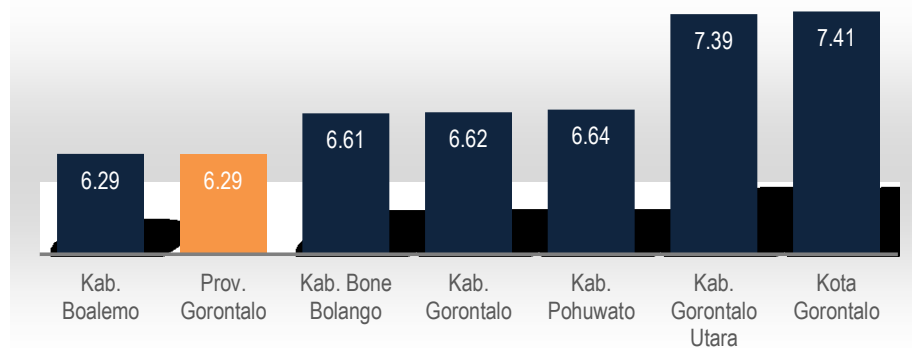


Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2016)

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama periode 2012-2016 mengalami beberapa kali perlambatan. Tercatat, selama periode tersebut hanya pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menunjukkan percepatan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian, baik global maupun nasional, yang juga sedang mengalami perlambatan. Fluktuasi Ekonomi Provinsi Gorontalo seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi secara Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Nasional juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Pelambatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2015 disebabkan karena beberapa sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir mengalami degradasi. Seperti halnya untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman maupun rendahnya Nilai Tukar Petani. Perekonomian Gorontalo tidak terlepas dari dukungan pembangunan sektor ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi adalah Kota Gorontalo sebesar 7,41 persen.

Gambar 2.13

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Struktur Perekonomian Gorontalo terdiri dari kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier, dengan komposisi kontribusi dari sektor primer (sektor pertanian kehutanan dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian) sebesar 38,64%. Sementara sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air bersih) sebesar 16,28%, sedangkan 43,13% terbagi kedalam sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi, sektor komunikasi dan informasi, sektor keuangan, sektor jasa lainnya).

PDRB Gorontalo atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Seri 2010
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2016 Provinsi Gorontalo (dalam Milyar rupiah)

Kategori	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.402,93	37,64	8.271,86	37,38	9.511,57	37,75	10.584,22	37,09	11.916,05	37,44
B	Pertambangan dan Penggalian	286,91	1,46	305,45	1,38	331,42	1,32	375,72	1,32	380,96	1,20
C	Industri pengolahan	797,72	4,06	887,84	4,01	1.051,64	4,17	1.191,32	4,18	1.333,94	4,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,84	0,06	10,72	0,05	11,71	0,05	10,08	0,04	12,99	0,04
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,84	0,05	11,00	0,05	12,76	0,05	14,01	0,05	16,94	0,05
F	Konstruksi	2.318,14	11,79	2.608,11	11,79	2.971,32	11,79	3.525,79	12,35	3.820,19	12,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.954,36	9,94	2.271,11	10,26	2.624,85	10,42	2.997,64	10,51	3.484,22	10,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1.132,51	5,76	1.327,83	6,00	1.535,45	6,09	1.790,68	6,27	1.974,18	6,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	423,80	2,15	484,25	2,19	540,44	2,15	639,59	2,24	721,03	2,27
J	Informasi dan Komunikasi	585,65	2,69	570,28	2,58	631,10	2,50	721,78	2,53	828,34	2,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	766,90	3,90	847,09	3,83	930,75	3,69	1.077,03	3,77	1.316,27	4,14
L	Real Estate	363,92	1,85	413,05	1,87	463,94	1,84	541,92	1,90	617,52	1,94
M,N	Jasa Perusahaan	19,31	0,10	21,59	0,10	24,30	0,10	28,07	0,10	31,20	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	185,68	9,59	2.035,69	9,20	2.214,14	8,79	2.358,85	8,27	2.422,50	7,61
P	Jasa Pendidikan	755,63	3,84	907,52	4,10	1.051,89	4,18	1.186,51	4,16	1.288,66	4,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	665,92	3,39	769,34	3,48	862,82	3,42	1.014,32	3,55	1.144,74	3,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	346,67	1,76	386,55	1,75	423,69	1,68	478,63	1,68	513,92	1,61
	PDRB	19.669,72	100,00	22.129,28	100,00	25.193,78	100,00	28.536,15	100,00	31.823,65	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.19

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Seri 2010
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2016 Provinsi Gorontalo (dalam Milyar rupiah)

Kategori	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.763,85	37,60	7.232,59	37,34	7.698,32	37,04	8.024,61	36,37	8.540,21	36,33
B	Pertambangan dan Penggalian	265,97	1,48	273,91	1,41	283,11	1,36	294,31	1,33	294,53	1,25
C	Industri pengolahan	737,13	4,10	796,02	4,11	843,80	4,06	883,01	4,00	941,23	4,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,72	0,07	13,70	0,07	15,29	0,07	15,55	0,07	17,42	0,07
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,94	0,05	9,54	0,05	10,25	0,05	10,50	0,05	12,06	0,05
F	Konstruksi	2.136,49	11,88	2.290,42	11,83	2.470,12	11,89	2.711,44	12,29	2.849,21	12,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.806,27	10,04	1.991,51	10,28	2.151,87	10,35	2.275,61	10,31	2.500,71	10,64
H	Transportasi dan Pergudangan	1.022,92	5,69	1.112,50	5,74	1.207,88	5,81	1.324,74	6,00	1.410,38	6,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	383,57	2,13	417,94	2,16	446,92	2,15	482,90	2,19	524,98	2,23
J	Informasi dan Komunikasi	495,65	2,76	538,65	2,78	587,23	2,83	644,77	2,92	710,71	3,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	675,93	3,76	710,31	3,68	742,57	3,60	817,90	3,71	968,63	4,12
L	Real Estate	337,57	1,88	367,40	1,90	396,25	1,91	428,83	1,94	464,45	1,98
M,N	Jasa Perusahaan	17,73	0,10	19,05	0,10	20,19	0,10	21,32	0,10	22,57	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	1.685,04	9,37	1.783,31	9,21	1.906,73	9,18	1.978,49	8,96	1.976,63	8,41
P	Jasa Pendidikan	692,83	3,85	787,96	4,07	894,72	4,31	958,61	4,34	994,83	4,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	610,73	3,40	667,36	3,45	726,38	3,50	803,68	3,64	871,82	3,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	333,76	1,86	355,40	1,83	374,18	1,80	392,59	1,78	406,47	1,73
	PDRB	17.987,07	100,00	19.367,57	100,00	20.775,80	100,00	22.068,59	100,00	23.507,15	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Perkembangan laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 selama periode 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2013-2016 (persen)

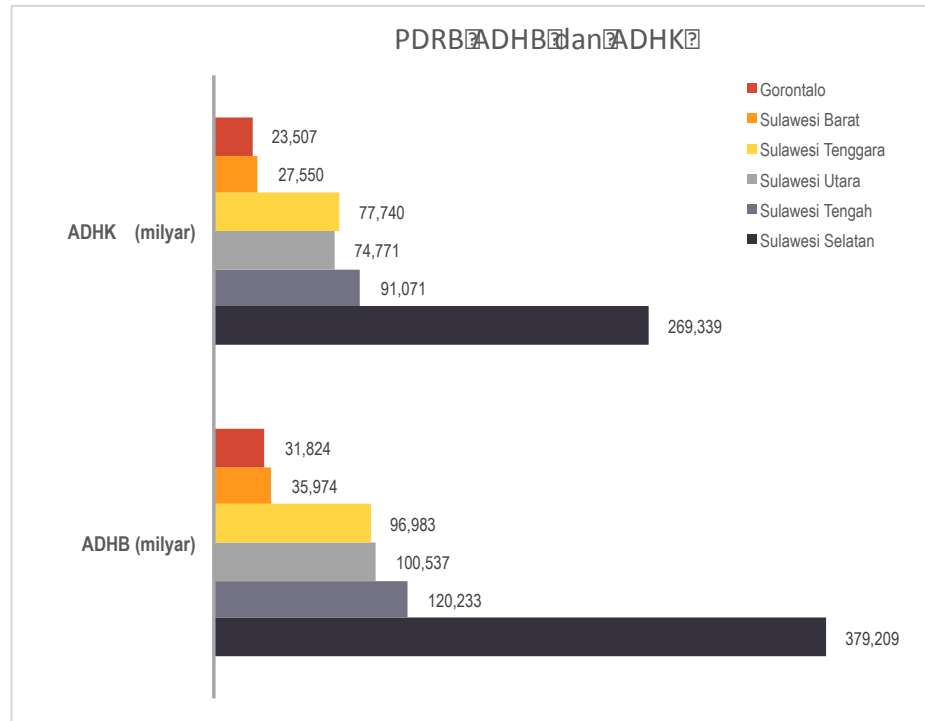
Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,93	4,26	4,24	6,43	2,61	2,40	1,57	2,34
B	Pertambangan dan Penggalian	2,98	3,95	3,95	0,08	0,04	0,05	0,05	0,00
C	Industri Pengolahan	7,99	4,66	4,66	6,58	0,33	0,25	0,19	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,70	1,72	1,72	12,04	0,01	0,01	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,78	2,46	2,46	14,92	0,00	0,00	0,00	0,01
F	Konstruksi	7,20	9,77	9,77	5,09	0,86	0,93	1,16	0,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,26	5,75	5,73	9,91	1,03	0,83	0,59	1,02
H	Transportasi dan Pergudangan	8,76	9,67	9,67	6,47	0,50	0,49	0,56	0,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,96	8,05	8,05	8,71	0,19	0,15	0,17	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	8,67	9,80	9,80	10,23	0,24	0,25	0,28	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,09	10,15	10,15	18,45	0,19	0,17	0,36	0,68
L	Real Estate	8,84	8,22	8,22	8,31	0,17	0,15	0,16	0,16
M,N	Jasa Perusahaan	7,48	5,57	5,57	5,91	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,83	3,76	3,76	-0,09	0,55	0,64	0,35	-0,01
P	Jasa Pendidikan	13,73	7,14	7,14	3,78	0,53	0,55	0,31	0,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,27	10,64	10,64	8,48	0,31	0,30	0,37	0,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,48	4,92	4,92	3,54	0,12	0,10	0,09	0,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,67	7,27	6,22	6,52	7,67	7,27	6,22	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Jika dibandingkan Provinsi lainnya se-Sulawesi, menunjukkan bahwa Nilai PDRB Provinsi Gorontalo baik diukur berdasarkan Harga Berlaku maupun Harga Konstan paling rendah dibanding Provinsi lainnya, seperti yang tergambar pada grafik berikut :

Gambar 2.14

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi se-Sulawesi Tahun 2016

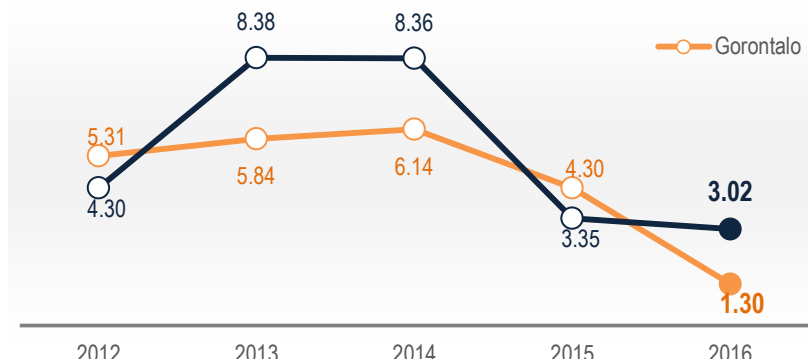


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2.2.1.2 Laju Inflasi

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Tabel 2.26 memperlihatkan perkembangan laju Inflasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan pola yang dinamis dan fluktuatif dari Tahun 2012-2016, dengan angka inflasi tertinggi terjadi Tahun 2014 yaitu sebesar 6,14%, hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu kenaikan harga barang dan jasa serta beberapa bahan pokok lain di pasar. Selanjutnya Tahun 2015 angka inflasi turun menjadi 4,30%, dan terus menurun hingga mencapai 1,30 % tahun 2016.

Gambar 2.15
Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2012-2016



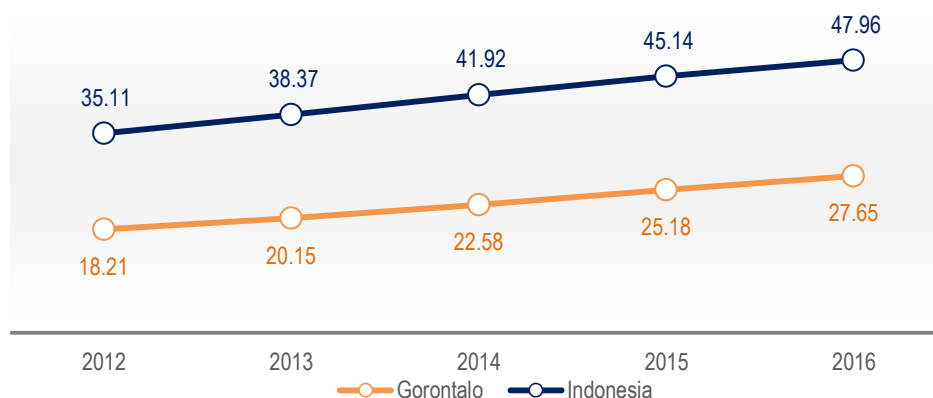
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Keberhasilan untuk menurunkan tingkat inflasi tidak lepas dari peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sehingga Provinsi Gorontalo berhasil menekan laju inflasi ditengah tingginya inflasi Nasional. Sehingga pada tahun 2016 Provinsi Gorontalo berhasil meraih penghargaan dalam kategori TPID inovatif yang berhasil menekan inflasi melalui terobosan program dan kebijakan dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah. Meskipun demikian tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo di masa depan adalah bagaimana menekan harga barang dan jasa di perkotaan, serta bagaimana menjaga distribusi barang dan jasa hingga ke pedesaan yang berpengaruh terhadap tingginya harga barang dan jasa dipedesaan.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam arti bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Provinsi Gorontalo sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend yang positif.

Gambar2.16
PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016



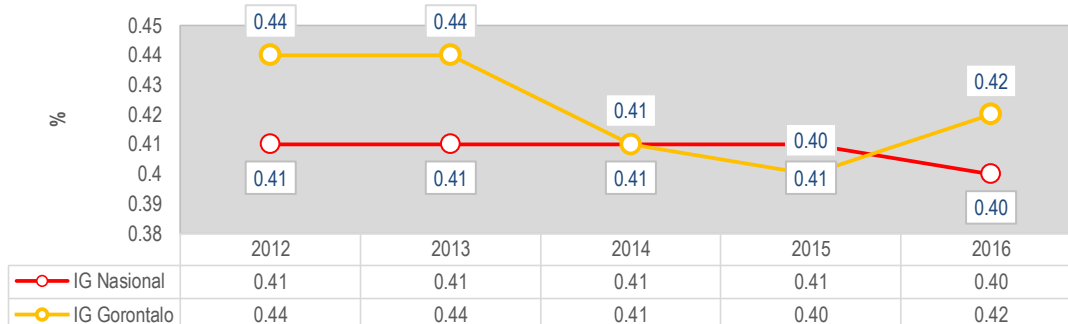
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini Ratio menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan/kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan tersebut dapat terjadi diantaranya karena ketimpangan pembangunan antar wilayah yang disebabkan perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, maupun tingkat perekonomian di suatu wilayah.

Koefisien gini dibagi menjadi tiga indikator, yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 persen menunjukkan ketimpangan menengah, dan lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi. Statistik menunjukkan bahwa indeks gini Provinsi Gorontalo berada pada level menengah.

Gambar 2.17
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2012– 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 2.18
Indeks Gini Provinsi se-Sulawesi, tahun 2016



*) Kondisi Bulan Maret

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Perbandingan ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan relative seimbang, bahkan ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan, seperti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Indeks Gini Pedesaan dan Perkotaan Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016

No	Tahun	Indeks Gini	
		Perkotaan	Pedesaan
1	2012	0,365	0,419
2	2013	0,443	0,428
3	2014	0,445	0,444
4	2015	0,391	0,366
5	2016	0,402	0,397

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

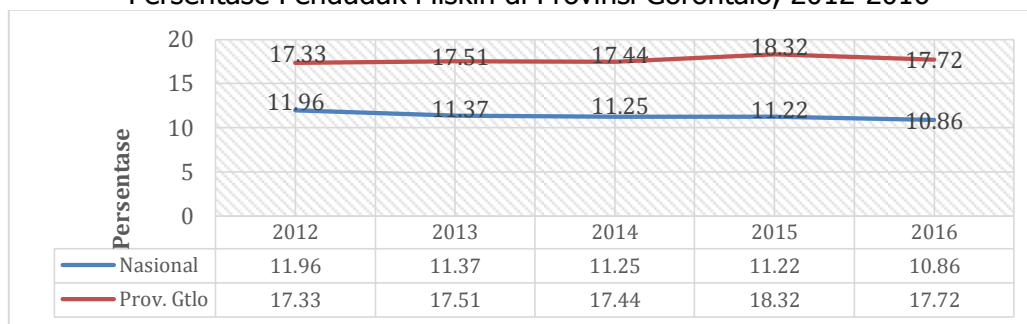
2.2.1.5 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%.

Garis Kemiskinan dipilah menurut komponen makanan yang disebut Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan bukan makanan yang disebut Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 untuk wilayah perkotaan sebesar

Rp209.232 dan perdesaan sebesar Rp224.958, ini berarti mempunyai selisih yaitu sebesar Rp15.726. Sedangkan bila diperhatikan GKNM pada Maret 2016 untuk wilayah perkotaan sebesar Rp75.076 dan perdesaan sebesar Rp59.232, maka terlihat ada perbedaan sebesar Rp15.844. Hal ini tentunya dipengaruhi di perkotaan kebutuhan akan perumahan, kesehatan, pakaian dan perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan.

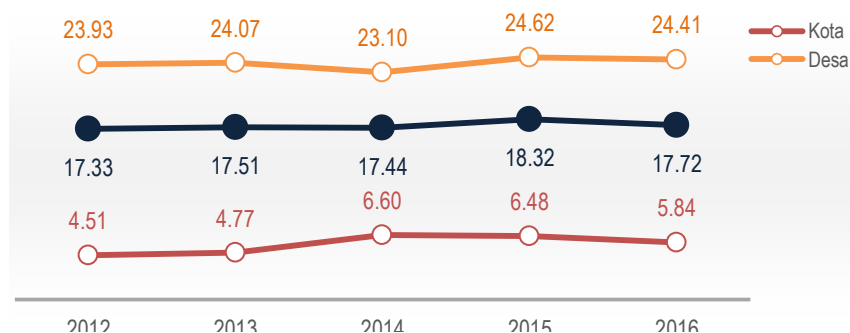
Gambar 2.19
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Kondisi penduduk miskin Provinsi Gorontalo masih terkonsentrasi di Pedesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 24,41 persen penduduk miskin berada di pedesaan, sedangkan di perkotaan lebih rendah sebesar 5,84 persen.

Gambar 2.20
Persentase Penduduk Miskin menurut Klasifikasi Wilayah (Desa dan Kota), 2012-2016 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara itu, indikator kemiskinan lainnya , yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan(P_1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P_2) yang disajikan dalam bentuk Indeks. Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil, yang

artinya semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengindikasikan ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin. Pada periode Tahun 2012-2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami perkembangan yang fluktuatif, seperti diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.22
Indikator Kemiskinan Provinsi Gorontalo, Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012			2013			2014			2015			2016		
		Kota	Desa	Desa + Kota	Kota	Desa	Desa + Kota	Kota	Desa	Desa + Kota	Kota	Desa	Desa + Kota	Kota	Desa	Desa + Kota
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	16.51	169.02	186.76	17.73	173.71	191.44	25.21	168.96	194.17	25.37	181.48	206.84	24.02	179.67	203.19
2	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	4.51	23.93	17.33	4.77	24.07	17.51	6.60	23.10	17.44	6.48	24.62	18.32	5.84	24.41	17.72
2	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	209.422	201.065	203.907	224.622	219.827	221.457	246.633	241.936	243.547	263.288	263.846	263.652	284.308	284.190	283.232
3	Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1)	0.28	4.29	2.92	0.32	4.65	3.18	0.93	4.52	3.29	1.02	5.53	3.97	0.90	5.93	4.12
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0.03	1.06	0.71	0.03	1.34	0.90	0.21	1.26	0.90	0.23	1.78	1.24	0.20	2.18	1.47

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Persentase tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 21,17 persen, dan terendah berada di Kota Gorontalo dengan persentase sebesar 6,05%.

Tabel 2.23
Jumlah dan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Maret 2016

No	Wilayah	Jumlah Penduduk	Persentase Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
1	Kabupaten Gorontalo	372.856	21,03	78,36
2	Kabupaten Boalemo	154.008	21,11	32,29
3	Kabupaten Pohuwato	150.385	21,17	31,66
4	Kabupaten Bone Bolango	155.238	17,97	27,80
5	Kabupaten Gorontalo Utara	111.824	18,51	20,65
6	Kota Gorontalo	206.454	6,05	12,43
7	Provinsi Gorontalo	1.150.765	17,72	203,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

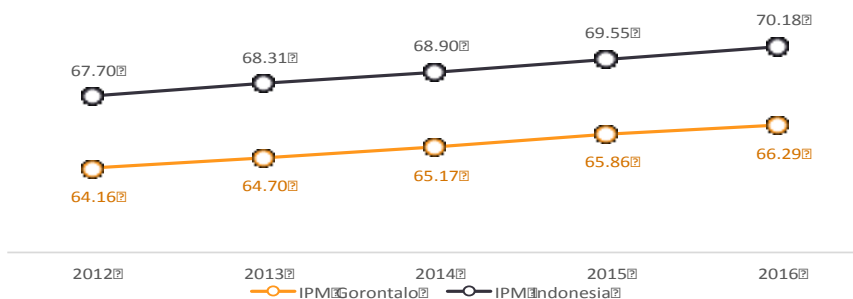
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini ditunjukkan melalui Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM meliputi :Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah

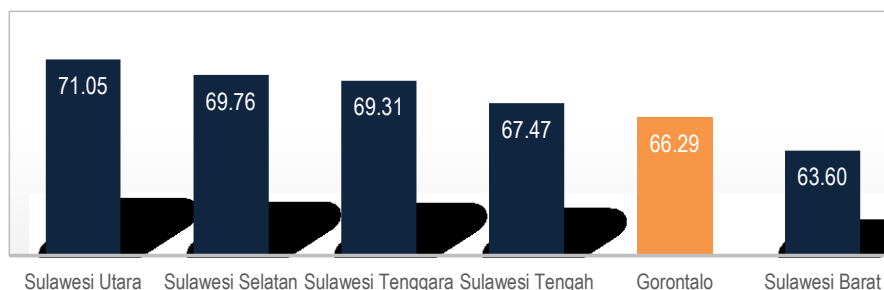
(RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.21
Trend Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2016)

Grafik 2.22
Indeks Pembangunan Manusia se-Sulawesi Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2016)

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo tahun 2016 IPM Provinsi Gorontalo sebesar 66,29, masih dibawah rata-rata IPM Nasional sebesar 70,18. Dalam kurun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata 0,87 persen per tahunnya. Peningkatan terjadi di masing-masing indikator pembentuk IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Hasil perhitungan IPM se-Provinsi Gorontalo khusus untuk tahun 2012-2016 diuraikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

Provinsi/ Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)					Harapan Lama Sekolah (tahun)					Rata-rata Lama Sekolah (tahun)					Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/kapita/tahun))					IPM				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
GORONTALO	66,76	66,92	67,00	67,12	67,13	11,78	12,13	12,49	12,70	12,88	6,92	6,96	6,97	7,05	7,12	8.673	8.719	8.762	9.035	9.175	64,16	64,70	65,17	65,86	66,29
Boalemo	66,94	67,12	67,29	67,49	67,67	11,32	11,60	11,89	12,07	12,34	6,01	6,12	6,15	6,23	6,30	7.516	7.566	7.598	7.817	7.895	61,11	61,71	62,18	62,86	63,42
Gorontalo	66,50	66,51	66,53	66,63	66,66	11,42	11,60	11,89	11,99	12,31	6,25	6,31	6,53	6,63	6,64	7.914	7.973	8.032	8.398	8.589	61,87	62,22	62,90	63,63	64,22
Pohuwato	61,86	62,09	62,33	62,43	62,65	11,31	11,48	11,68	12,03	12,28	6,26	6,53	6,54	6,62	6,67	8.644	8.889	8.925	9.146	9.381	60,48	61,38	61,74	62,50	63,17
Bone Bolango	67,41	67,45	67,50	67,60	67,65	12,18	12,26	12,33	12,76	13,05	7,45	7,67	7,70	7,73	7,81	8.332	8.601	8.669	8.900	9.115	65,13	65,82	66,03	66,83	67,48
Gorontalo Utara	64,73	64,76	64,79	64,99	65,06	11,37	11,52	11,68	11,96	12,26	6,07	6,53	6,59	6,61	6,62	7.847	7.948	7.999	8.178	8.270	60,71	61,60	61,92	62,55	63,02
Kota Gorontalo	71,57	71,62	71,68	71,69	71,74	13,28	13,34	13,76	14,18	14,19	10,00	10,24	10,28	10,29	10,30	10.943	10.965	11.019	11.269	11.360	74,06	74,43	74,97	75,62	75,75

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2016)

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Kesetaraan Gender dalam pembangunan dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Perhitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan.

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2015

NO	Wilayah	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	PROV. GORONTALO	84,54	84,57	85,09	85,87
2	Kab. Boalemo	75,05	77,63	78,92	79,32
3	Kab. Gorontalo	74,44	77,32	79,23	80,13
4	Kab. Pohuwato	88,72	89,32	90,32	90,57
5	Kab. Bone Bolango	82,57	84,40	85,99	86,00
6	Kab. Gorontalo Utara	74,85	77,89	79,85	79,99
7	Kota Gorontalo	82,84	84,37	85,17	85,51

Sumber : Buku Pembangunan Manusia berbasis Gender, 2016

Sedangkan perhitungan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi. Terdapat 3 komponen yang dijadikan tolak ukur pemberdayaan gender yaitu : (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai tenaga Manajer, Profesional, Administrasi dan Teknisi, serta (3) Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Dari ketiga komponen tersebut, diperoleh Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 69,62.

Tabel 2.26
Indeks Pemberdayaan Gender menurut Komponen
Provinsi Gorontalo Tahun 2015

NO	Wilayah	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
1	PROV. GORONTALO	28,89	58,53	25,05	69,26
2	Kab. Boalemo	20,00	58,98	27,52	64,58
3	Kab. Gorontalo	22,86	56,74	25,79	65,71
4	Kab. Pohuwato	20,00	66,55	36,18	69,08
5	Kab. Bone Bolango	4,35	61,35	28,40	49,64
6	Kab. Gorontalo Utara	16,00	60,72	26,90	61,06
7	Kota Gorontalo	24,00	55,05	29,00	69,63

Sumber : Buku Pembangunan Manusia berbasis Gender, 2016

Tabel 2.27

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

NO	Wilayah	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	PROV. GORONTALO	62,08	60,89	67,36	69,62
2	Kab. Boalemo	50,20	52,68	62,84	64,58
3	Kab. Gorontalo	57,38	56,75	64,08	65,71
4	Kab. Pohuwato	72,05	74,89	71,41	69,08
5	Kab. Bone Bolango	51,58	52,23	47,98	49,64
6	Kab. Gorontalo Utara	51,71	54,79	61,55	61,06
7	Kota Gorontalo	69,23	66,82	69,04	69,63

Sumber : Buku Pembangunan Manusia berbasis Gender, 2016

2.2.2.3 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus di mengerti apa yang di baca atau di tulisnya. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan sehingga indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia serta dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program.

Tabel 2.28Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 sd 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	355.174	400.032	524.019	511.107	647.357
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	373,867	401,316	525,701	512,594	648.590
3	Angka melek huruf (persen)	95,00%	99,68%	99.68%	99.71%	99.81%

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Selama kurun waktu 2012-2016, Angka Melek Huruf mengalami peningkatan rata-rata 1,29 persen pertahun. Tahun 2016 angka melek huruf Provinsi Gorontalo telah mencapai 99,81 persen.

Tabel 2.29
Angka Melek Huruf Tahun 2016 menurut kabupaten/kota
Provinsi Gorontalo

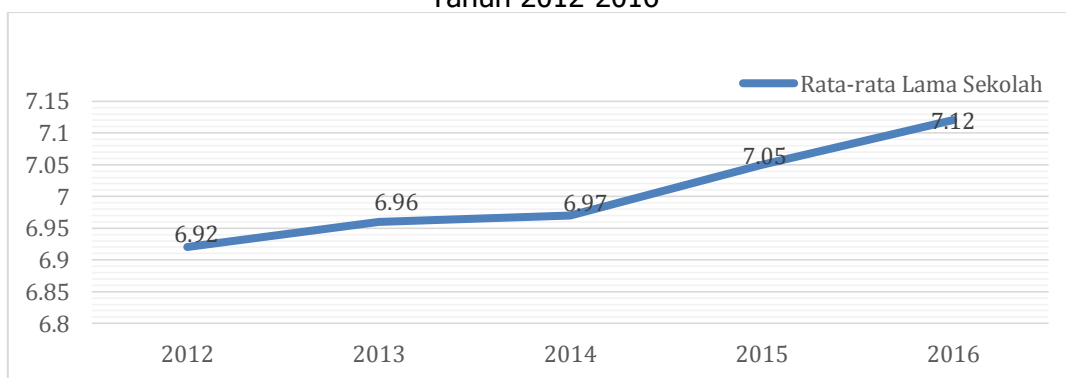
NO	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kota Gorontalo	124.939	125,064	99,90
2	Kab. Gorontalo	288,040	288,452	99,86
3	Kab. Boalemo	72.782	73,038	99,65
4	Kab. Pohuwato	22.202	22,417	99,04
5	Kab. Bone Bolango	85.912	86,034	99,86
6	Kab. Gorontalo Utara	53.482	53,585	99,81
	Jumlah	647.357	648.590	99,81

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2017

2.2.2.4 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. MYS bersama dengan angka melek huruf, merupakan salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia (IPM/HDI).

Gambar 2.23
Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016



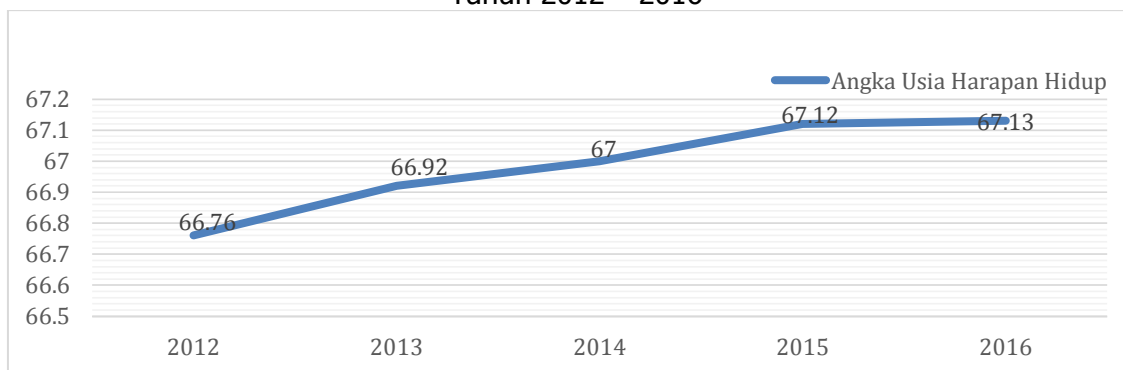
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Angka rata-rata lama sekolah selama periode 2012-2016 mengalami peningkatan dari 6,92 tahun menjadi 7,12 tahun atau sebesar 0,2 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP Kelas I). Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo, masih perlu didorong dalam rangka perwujudan wajib belajar 9 tahun hingga 12 tahun.

2.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (*Age Specific Rate*) merupakan salah satu indikator indeks Pembangunan Manusia. Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia harapan hidup Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 sampai 2016 terus mengalami peningkatan, Peningkatan UHH Provinsi Gorontalo seiring dengan peningkatan IPM, dari 67,00 tahun ditahun 2015 meningkat menjadi 67,12 tahun di tahun 2016.

Gambar 2.24
Trend Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 – 2016



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2016

2.2.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk mengalami perkembangan yang fluktuatif, terjadi kenaikan tahun 2015 hingga mencapai 5,7%. Hal ini disebabkan oleh antara lain faktor kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat. Ini akan mengakibatkan kemampuan kognitif dari balita yang menderita gizi buruk tidak berkembang maksimal dan mudah sakit. Untuk 2016 kembali terjadi penurunan hingga 4,56%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 2.25
Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

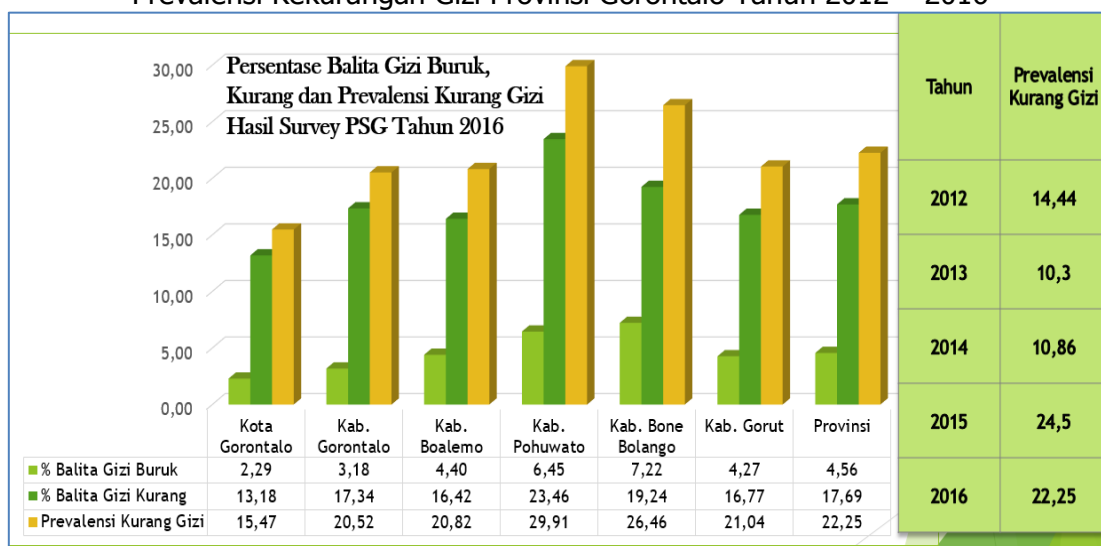


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

2.2.2.7 Prevalensi Gizi Kurang

Perkembangan prevalensi kekurangan gizi dan persentase balita gizi buruk pada balita selang tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.26
Prevalensi Kekurangan Gizi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016



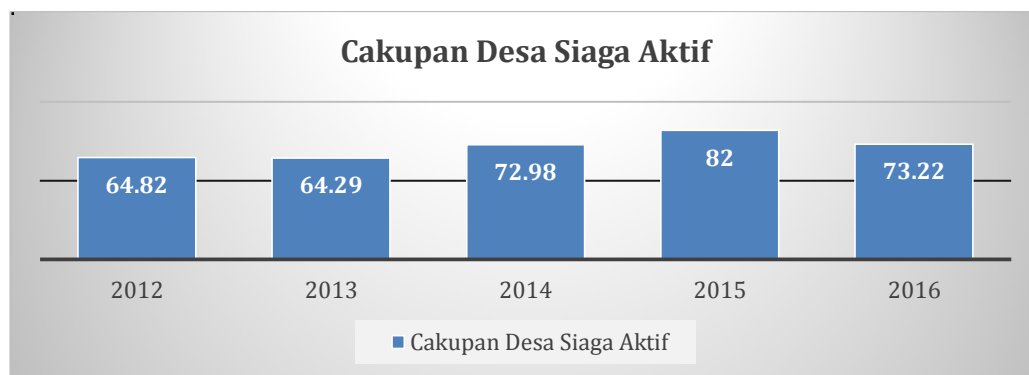
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Peningkatan prevalensi gizi kurang berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin. Tahun 2014 – 2016 terjadi peningkatan prevalensi gizi kurang dari 10,86 tahun 2014 menjadi 24,5 tahun 2015, namun pada tahun 2016 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik menjadi 22,25%.

2.2.2.8 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah. Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Cakupan desa siaga aktif yang meliputi 357 desa siaga aktif di Provinsi Gorontalo. Berikut adalah persentase cakupan desa siaga aktif yang dibentuk di provinsi Gorontalo selama 2012-2016 :

Gambar 2.27
Cakupan Desa Siaga Aktif Provinsi Gorontalo, 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

2.2.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk yang aktif bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja maka semakin besar pula modal suatu wilayah dalam mencapai target pembangunan. Hal ini karena jumlah angkatan kerja menggambarkan ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi dalam memproduksi barang dan jasa. Tahun 2016, jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan rata-rata 4,5% setiap tahunnya.

Tabel 2.30
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016

Jenis Kegiatan Utama	2012	2013	2014	2015	2016
I. Angkatan Kerja	479.702	478.813	500.056	517.788	562.196
1. Bekerja	458.409	458.930	479.137	493.687	546.668
2. Menganggur	21.293	19.883	20.919	24.101	15.528
II. Bukan Angkatan Kerja	286.734	300.266	295.761	295.718	265.935
1. Sekolah	27.038	76.509	84.448	78.825	75.928
2. Mengurus Rumah Tangga	193.136	182.719	174.438	185.526	168.119
3. Lainnya	66.560	41.038	36.875	31.367	21.888
Jumlah/Total	766.436	779.079	795.817	813.506	828.131
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,14	61,46	62,84	63,65	67,89
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,56	95,85	95,82	95,35	96,15
Tingkat Pengangguran	4,44	4,15	4,18	4,65	2,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Dilihat dari data penduduk yang bekerja berdasarkan Jenis Kegiatan Utama yang bagi menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK Perempuan. Sementara jumlah pengangguran perempuan lebih besar dibanding Laki-laki.

Tabel 2.31

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Gorontalo tahun 2016

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
III. Angkatan Kerja	340.335	221.861	562.196
1. Bekerja	332.847	213.821	546.668
2. Menganggur	7.448	8.040	15.528
IV. Bukan Angkatan Kerja	70.154	195.781	265.935
1. Sekolah	33.825	42.103	75.928
2. Mengurus Rumah Tangga	23.147	144.972	168.119
3. Lainnya	13.182	8.706	21.888
Jumlah/Total	410.489	417.642	828.131
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	82,19	53,12	67,89
Tingkat Pengangguran	2,20	3,62	2,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 167.445 jiwa atau 30,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Meskipun merupakan yang paling dominan, namun selama periode 2012-2016 persentasenya cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan dan sektor jasa cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 2.32

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2012-2016

Lapangan Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian	173.235	169.416	188.033	171.104	167.445
Industri	38.774	35.129	41.165	35.684	40.665
Perdagangan	69.647	78.174	84.147	97.500	109.389
Jasa Kemasyarakatan	86.734	90.725	85.080	102.859	137.175
Lainnya	90.019	85.486	80.712	86.540	91.994
Total	458.409	458.930	479.137	493.687	546.668

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Secara sederhana, sektor formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja pada sektor formal adalah mereka yang bekerja/berusaha dengan dibantu buruh

tetap; dan buruh/karyawan. Sementara itu, pekerja pada sektor informal adalah mereka yang bekerja/berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap; pekerja bebas (di pertanian dan non pertanian); dan pekerja keluarga/takdibayar. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada tahun 2016 tercatat sebanyak 216.948 orang atau 39,69 persen pekerja di Provinsi Gorontalo yang bekerja pada sektor formal dan 329.720 orang atau 60,31 persen pekerja yang bekerja pada sektor informal.

Tabel 2.33

Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal-Informal
Provinsi Gorontalo, 2012-2016

Sektor Formal-Informal	2012	2013	2014	2015	2016
Formal	167,789	162,944	160,122	183,333	216.948
Informal	290,620	295,986	319,015	310,354	329.720
Jumlah	458,409	458,930	479,137	493,687	546.668

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Berdasarkan status pekerjaan utama, pekerja di Provinsi Gorontalo didominasi oleh pekerja buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 196.671 orang atau sebesar 35,98 persen pekerja di Provinsi Gorontalo berstatus buruh/karyawan/pegawai. Selanjutnya, diikuti pekerja dengan status berusaha sendiri sejumlah 131.916 orang (24,13%); dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 87.761 orang (16,05%). Sementara itu, pekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap merupakan yang paling sedikit ditemukan di Provinsi Gorontalo, yaitu hanya sebanyak 20.277 orang atau 3,71 persen.

Tabel 2.34

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Status Pekerjaan Utama 2012-2016

Status Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	104,114	120,921	114,649	124,472	131,916
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	70,819	74,299	79,911	70,515	87.761
Berusaha dibantu Buruh Tetap	23,621	15,509	16,316	19,155	20.277
Buruh/Karyawan/Pegawai	144,168	147,435	143,806	164,178	196.671
Pekerja Bebas di Pertanian	25,642	23,972	31,366	32.437	25.661
Pekerja Bebas di Non Pertanian	25,457	18,695	27,389	27.220	20.756
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	64,588	58,099	65,700	55,710	63.626
Jumlah	458,409	458,930	479,137	493,687	546.668

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Pada Agustus 2016, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 atau 14,07 persen.

Tabel 2.35

Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan 2013-2016

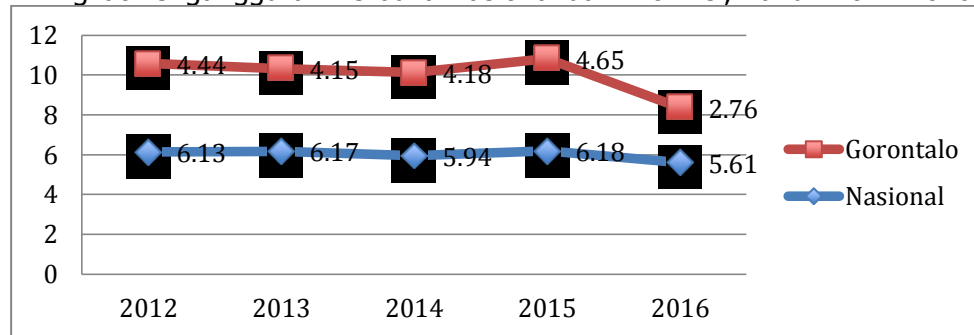
Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2013		2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Februari	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<= SD	287,635	281,336	297,908	281,462	297,908	297,908	292.861	281.607
SMP – SMA	138,409	134,075	157,060	158,284	157,060	157,060	193.133	188.165
Universitas	47,709	43,519	62,719	53,941	62,719	62,719	55.555	76.896
Jumlah	473,753	458,930	517,687	493,687	517,687	517,687	541.549	546.668

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2.2.2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 sebesar 2,76 persen. Capaian tersebut merupakan yang terendah selama periode 2012-2016. Angka ini berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 5,61 persen. Penurunan TPT yang terjadi di tahun 2016 tersebut salah satunya dipengaruhi oleh makin terbukanya lapangan pekerjaan di Provinsi Gorontalo, terutama pada sektor perdagangan.

Gambar 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi, Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

2.3 Aspek Daya Saing

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Akhir Rumah Tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut Pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi Konsumsi Akhir Rumah Tangga.

Tabel 2.36
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Gorontalo,
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Total Konsumsi Rumah Tangga (Milyar Rp)					
	a. ADHB	12.229,03	13.717,79	15.403,97	17.483,66	19.292,19
	b. ADHK 2010	11.038,73	11.791,87	12.590,34	13.382,97	14.286,29
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	62,17	61,99	61,14	61,27	60,62
3	Rata-rata Konsumsi per RT/Thn (Ribu Rp)					
	a. ADHB	48.242,66	53.235,75	58.825,20	65.723,10	71.404,95
	b. ADHK 2010	43.546,99	45.761,69	48.080,44	50.308,14	52.876,92
4	Rata-rata Konsumsi per Kapita/thn (Ribu Rp)					
	a. ADHB	11.320,17	12.493,55	13.807,38	15.428,07	16.764,66
	b. ADHK 2010	10.218,33	10.793,51	11.285,38	11.809,51	12.414,60
5	Pertumbuhan (%)					
	a. Total Konsumsi RT	6,55	6,82	6,77	6,30	6,75
	b. Per Rumah Tangga	4,78	5,09	5,07	4,63	5,11
	c. Per Kapita	4,80	5,10	5,08	4,64	5,12
6	Jumlah RT (Ribu RT)	253,49	257,68	261,86	266,02	270,18
7	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	1.080,29	1.097,99	1.115,63	1.133,24	1.150,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012-2016, Konsumsi Akhir Rumah Tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai Konsumsi Rumah Tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2012 s.d. 2016 menunjukkan tren yang menurun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu 62,17 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu 60,62 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya

belanja untuk konsumsi, termasuk Konsumsi Rumah Tangga, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan dan sebagainya) Data statistik menunjukkan rata-rata konsumsi setiap rumah tangga di Provinsi Gorontalo meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Kondisi yang sama juga terjadi pada rata-rata konsumsi per kapita, yang mengalami peningkatan secara "riil" pada tahun 2012-2016, berkisar antara 4,80-5,12 persen.

Tabel 2.37

Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang (Makanan dan Non Makanan) Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (Rupiah), 2016

No.	Kabupaten/kota	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Gorontalo	323.408	264.767	588.175
2.	Kab. Boalemo	351.001	371.662	722.663
3.	Kab. Pohuwato	383.799	316.776	700.575
4.	Kab. Bone Bolango	382.801	421.811	804.612
5.	Kab. Gorontalo Utara	314.535	250.596	565.131
6.	Kota Gorontalo	510.596	641.594	1.152.190
Provinsi Gorontalo		380.934	393.591	774.525

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012, total Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 4.843,22 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 7.215,17 miliar rupiah. Demikian halnya dengan Konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan 2010, juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.38
Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Gorontalo,
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Total Konsumsi Pemerintah (Milyar Rp)					
	a. ADHB	4.843,22	5.497,58	6.077,54	6.809,07	7.215,17
	b. ADHK 2010	4.169,00	4.437,28	4.555,45	4.832,72	4.938,62
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	24,62	24,84	24,12	23,86	22,67
3	Konsumsi Pemerintah per Kapita/thn (Ribu Rp)					
	a. ADHB	4.483,27	5.006,95	5.447,62	6.008,51	6.269,89
	b. ADHK 2010	3.859,16	4.041,27	4.083,28	4.264,53	4.291,59
4	Pertumbuhan (%)					
	a. Total Konsumsi Pemerintah	5,64	6,44	2,66	6,09	2,19
	b. Per Kapita	3,91	4,72	1,04	4,44	0,63
6	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	1.080,29	1.097,99	1.115,63	1.133,24	1.150,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

3. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana program pembangunan pertanian menunjukkan kinerja positif adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada prinsipnya, Nilai Tukar Petani ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (dalam persentase). NTP merupakan instrumen untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, disisi lain, NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Karena itu, semakin tinggi NTP, secara relatif menunjukkan semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Sedangkan, kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya. NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga output pertanian, harga input pertanian,

harga output sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga input sektor non-pertanian.

Tabel 2.39
Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2016

NTP (Subsektor)	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanaman Pangan	91,76	88,58	96,43	98,34	108,38
Hortikultura	110,33	113,63	113,92	123,61	116,75
Tanaman Perkebunan	129,87	123,89	97,71	94,13	97,05
Peternakan	91,36	88,62	102,47	101,10	102,62
Perikanan(Nelayan)	105,73	107,70	100,11	99,64	101,37
NTP Umum	102,33	100,71	101,33	102,29	105,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Dari data menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo telah baik, hal ini dapat ditunjukkan dari Nilai Tukar Petani di Provinsi Gorontalo selang waktu 2012-2016 diatas 100. Artinya, hasil atau nilai produksi yang diterima lebih besar dari nilai yang dikeluarkan petani, baik untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga Tahun 2016 NTP Gorontalo tercatat sebesar 105,46, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 102,29. Pada tahun tersebut, NTP subsektor perkebunan tercatat memiliki capaian terendah, yaitu sebesar 97,05 persen, sementara itu subsektor hortikultura memiliki capaian NTP tertinggi (112,50 %).

4. Angka kriminalitas

Dari sisi stabilitas politik dan keamanan, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang merupakan daerah yang masih dalam status aman. Namun demikian, masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya kesenjangan ekonomi menjadi pemicu tindak kejahatan. Sehingga perlunya penyelesaian permasalahan secara komprehensif agar angka kriminalitas dapat lebih ditekan.

Tabel 2.40
Jumlah Tindak Pidana
Provinsi Gorontalo Tahun 2014 s.d 2016

NO	Wilayah	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kab. Boalemo	493	404	495
2	Kab. Gorontalo	1.233	1.398	1.431
3	Kab. Pohuwato	962	898	535
4	Kab. Bone Bolango	623	649	805
5	Kota Gorontalo	2.008	1.795	1.837
6	Kepolisian Daerah	310	333	233
	Total	5.619	5.477	5.336

Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.41
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort
di Provinsi Gorontalo (persen) 2014-2016

Kepolisian Resort	2014	2015	2016
1. Boalemo	25,15	76,49	84,85
2. Gorontalo	48,98	42,56	49,41
3. Pohuwato	60,6	54,34	45,61
4. Bone Bolango	66,29	48,69	24,97
5. Kota Gorontalo	28,24	32,98	29,23
Kepolisian Daerah Gorontalo	50,65	35,44	64,38
Jumlah	43,48	44,15	42,34

Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, 2016

5. Rasio ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Data menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi semakin menurun.

Tabel 2.42

Rasio Ketergantungan Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	319.832	320.367	321.208	322.262	335.767
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	41.169	43.411	45.754	48.233	45.496
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	361.001	363.778	366.962	370.495	381.263
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	719.286	734.212	748.671	762.742	769.502
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	50,19	49,55	49,02	48,57	49,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan terus ditingkatkan melalui program pendidikan formal maupun non formal diantaranya adalah: Program PAUD, program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan untuk kesetaraan, masyarakat, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan khusus serta pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin. Kemudian melalui program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.

Dari berbagai program dan kebijakan tersebut capaian sektor hingga tahun 2016 relatif cukup baik dapat dilihat dari pencapaian indikator Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di hampir semua tingkatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2016 mengalami penurunan 4,76 persen dibanding tahun 2012. Sementara APS penduduk usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,89 persen

pertahun. Untuk APS penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,46 persen pertahun (2012-2016).

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 sd 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	131.413	136.430	139.082	141.510	114.900
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	136.362	138.297	137.746	139.199	125.196
1.3.	APS SD/MI	963,71	986,50	1.009,70	1.016,60	917,76
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	45.004	47.623	47.442	49.720	49.130
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	64.301	66,189	64,936	66,470	65.126
2.3.	APSSMP/MTs	699,90	719,50	730,60	748,01	754,38
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	36,343	39,477	35,221	43,532	45.093
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	65.720	60,968	53,470	61,021	59.232
3.3.	APS SMA/MA/SMK	553	647,50	658,71	713,39	761,29

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APS	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/ SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APS
1	Kota Gorontalo	16.540	18.313	903,18	9.738	11.528	844,73	9.385	8.815	1064,66
2	Kab. Gorontalo	34.820	38.101	913,89	15.839	19.727	802,91	12.218	15.887	769,06
3	Kab. Boalemo	18.069	19.164	942,86	6.638	9.897	670,71	6.504	9.792	664,22
4	Kab. Pohuwato	14.850	15.963	930,28	5.710	7.252	787,37	4.509	6.853	657,96
5	Kab. Bone Bolango	18.431	20.358	905,34	6.136	9.190	667,68	5.153	8.322	619,20
6	Kab. Gorontalo utara	12.190	13.297	916,75	5.069	7.550	671,39	4.252	6.025	705,73
	JUMLAH	114.900	125.196	917,76	49.130	65.126	754,38	42.021	55.694	754,50

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu (7-12/SD 13-15/SMP 16-18/SMA) yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan pula untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan kata lain bahwa APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan sebaran APM per kabupaten/kota diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.45

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 sd 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	131.413	136.430	139.082	141.510	114.900
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	136.362	138.297	137.746	139.199	125.196
1.3.	APM SD/MI	96,37	98,65	100,97	101,66	98,34
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	45.004	47.623	47.442	49.720	49.130
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	64.301	66,189	64,936	66,470	65.126
2.3.	APM SMP/MTs	69,99	71,95	73,06	74,80	75,43
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	36,343	39,477	35,221	43,532	45.093
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	65.720	60,968	53,470	61,021	59.232
3.3.	APM SMA/MA/SMK	55.30	64.75	65.87	71.34	76.13

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Tabel 2.46

Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Kota Gorontalo	16.540	18.313	97.10	9.738	11.528	91.18	9.385	8.815	81,06
2	Kab. Gorontalo	34.820	38.101	99.62	15.839	19.727	83.66	12.218	15.887	62,37
3	Kab. Boalemo	18.069	19.164	84.12	6.638	9.897	61.35	6.504	9.792	66,42
4	Kab. Pohuwato	14.850	15.963	97.51	5.710	7.252	82.13	4.509	6.853	65,40
5	Kab. Bone Bolango	18.431	20.358	76.56	6.136	9.190	54.87	5.153	8.322	52,17
6	Kab. Gorontalo utara	12.190	13.297	98.37	5.069	7.550	81.67	4.252	6.025	61,96
	JUMLAH	114.900	125.196	98,34	49.130	65.126	75.43	42.021	55.694	76,13

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Angka Partisipasi Kasar

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Perkembangan APK PAUD mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 8,08%. Sementara APK SD/MI dari 2012-2016 terus mengalami peningkatan bahkan telah melampaui 100%. Sedangkan APK SMP/MTs mengalami peningkatan rata-rata 0,75 persen pertahun. Demikian pula untuk APK SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai rata-rata 6,18 persen pertahun.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAUD/KB					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan PAUD/KB	51.385	55.707	51.303	49.798	51.185
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 0-6 tahun	126.810	95.943	108.404	98.806	96.737
1.3.	APK PAUD/KB	40,52	58,06	47,33	50,40	52,91
2	SD/MI					
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	151.416	158.060	156.535	159.007	139.473
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	136.362	138.297	137.746	139.199	125.196
2.3.	APK SD/MI	111.04	114.29	113.64	114.23	111,40
3	SMP/MTs					
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	62.366	64.243	63.520	65.706	64.967
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	64.301	66.189	64.936	66.470	65.126
3.3.	APK SMP/MTs	96.99	97.06	97.82	98.85	99.75
4	SMA/MA/SMK					
4.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	48.692	51.933	47.155	54.870	52.100
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	65.720	60.968	53.470	61.021	55.694
3.3.	APK SMA/MA/SMK	74.09	85.18	88.19	89.92	93.54

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Tabel 2.48
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016
menurut kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APK
1	Kota Gorontalo	21.659	18.313	115,74	11.958	11.528	118,07	11.194	8.815	113,60
2	Kab. Gorontalo	48.421	38.101	116,39	20.692	19.727	107,26	14.093	15.887	83,66
3	Kab. Boalemo	18.133	19.164	94,62	9.029	9.897	87,40	8.190	9.792	84,56
4	Kab. Pohuwato	17.247	15.963	108,05	7.179	7.252	103,27	6.136	6.853	90.08
5	Kab. Bone Bolango	18.591	20.358	91,32	8.839	9.190	87,60	7.276	8.322	78,37
6	Kab. Gorontalo utara	15.422	13.297	115,98	7.270	7.550	114,14	5.211	6.025	82,88
	Jumlah	139.473	125.196	111.40	64.967	65.126	99,75	52.100	55.694	93,54

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/KB Tahun 2016
menurut kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/kota	SD/MI		
		jumlah siswa bersekolah di PAUD/KB	jumlah penduduk usia 4-6 th	APK PAUD/KB
1	Kota Gorontalo	7.593	14.963	50,75
2	Kab. Gorontalo	14.910	23.843	62,53
3	Kab. Boalemo	5.172	7.303	70,82
4	Kab. Pohuwato	9.321	16.251	57,36
5	Kab. Bone Bolango	8.503	18.169	46,80
6	Kab. Gorontalo utara	5.686	16.208	35,08
	Provinsi Gorontalo	51.185	96.737	52,91

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2012 sampai 2016, Persentase lulusan SD/ sederajat relatif lebih besar dibandingkan dengan SMP/ setara dan SMA/ setara. Pada tingkat SD/ setara, angka pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan rata-rata peningkatan 0,39% pertahun, sementara perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SMP/ Mts meningkat sebesar 10,4% pertahun. Pada jenjang SMA/ MA/ SMK cenderung mengalami penurunan rata-rata 2,51% pertahun. Untuk lebih jelasnya, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

NO	APT	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	19.776	19.233	21.193	18.269	19.715
2.	SMP /MTs	11.840	12.304	13.794	14.337	17.448
3.	SMA/MA /SMK	13.916	16.399	11.425	11.540	11.708

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Tabel 2.51
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

NO	APT	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Kota Gorontalo					
I.1.	SD/MI	3.085	3.304	3.396	3.291	3.679
I.2.	SMP /MTs	2.649	3.184	2.973	3.133	4.955
I.3.	SMA/MA/SMK	3.076	3.076	3.086	3.227	3.741
II.	Kab. Gorontalo					
II.1.	SD/MI	6.727	5.877	7.089	6.932	4.646
II.2.	SMP /MTs	3.657	3.965	4.241	5.237	3.722
II.3.	SMA/MA/SMK	2.308	2.475	2.347	2.698	2.535
III.	Kab. Boalemo					
III.1.	SD/MI	2.104	2.842	2.841	2.247	2.985
III.2.	SMP /MTs	1.704	1.934	1.934	1.771	2.855
III.3.	SMA/MA/SMK	924	1.494	1.298	846	873
IV.	Kab. Pohuwato					
IV.1	SD/MI	3.110	2.002	3.019	2.763	2.777
IV.2	SMP/MTs	1.923	516	1.584	1.221	2.201
IV.3	SMA/MA/SMK	1.279	1.226	1.484	1.620	1.426
V.	Kab. Bone Bolango					
V.1	SD/MI	2.719	2.866	2.592	2.246	3.046
V.2	SMP/MTs	1.270	1.629	1.647	1.603	2.018
V.3	SMA/MA/SMK	934	1.498	1.182	1.489	1.890
VI.	Kab. Gorontalo Utara					
VI.1	SD/MI	2.072	2.337	2.256	2.262	2.582
VI.2	SMP/MTs	667	1.386	1.415	1.372	1.697
VI.3	SMA/MA/SMK	840	1.186	999	1.067	1.243

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Provinsi Gorontalo telah mampu meningkatkan tingkat kelulusan di semua jenjang pendidikan. Data menunjukkan sejak tahun 2015, angka kelulusan 100% disemua jenjang pendidikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.52
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	97.79	100	100	100	100
2.	SMP /MTs	99.74	89,58	99,96	100	100
3.	SMA/MA /SMK	97.13	94,24	99,88	100	100

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah ini merupakan alat ukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Selama tahun 2012-2016 angka putus sekolah bagi kelompok usia baik jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah mengalami penurunan. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan Provinsi Gorontalo sudah cukup baik.

Tabel 2.53

Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	0.07	0.02	0.10	0.00	0.00
2	SMP/MTs	0.10	0.04	0.10	0.04	0.03
3	SMA/MA/SMK	0.50	0.12	0.14	0.01	0.01

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

RasioKetersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Keberlangsungan pendidikan tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, utamanya adalah ketersediaan sekolah yang memadai dan terjangkau. Berdasarkan data pendidikan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Provinsi Gorontalo tahun 2016 Provinsi Gorontalo telah memiliki fasilitas pendidikan, mulai dari Taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah. Taman Kanak-kanak (TK) Negeri/Swasta berjumlah = 887 sekolah, Sekolah dasar (SD) Negeri/swasta = 925 unit, madrasah ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta = 88 unit. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta = 336 unit, Madrasah Tsawiyah (MTs) Negeri/Swasta = 69 unit sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/swasta = 60 Unit, madrasah Aliyah (MA) Negeri/Swasta = 36 unit dan sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta = 52 Unit. Rasio ketersediaan sekolah di Provinsi Gorontalo dan sebaran per Kabupaten/Kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.54

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI						
1.	Jumlah gedung sekolah	929	1000	1036	1001	1013
2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	136.362	138.297	137.746	139.199	125.196
3.	Rasio	68,10	72,30	75.21	71.91	80,91
SMP/MTs						
1.	Jumlah gedung sekolah	333	418	445	447	405
2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	64.301	66.189	64.936	66.470	65.126
3.	Rasio	51,79	63,13	68.46	67.18	62,18
SMA/SMK/MA						
1.	Jumlah gedung sekolah	99	100	146	135	148
2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	65.720	60.968	53.470	61.021	55.694
3.	Rasio	15.06	16,34	27.39	22.12	26.57

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Tabel 2.55

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

NO	KABUPATEN/KOTA	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 16-18 th	Rasio
1	Kota Gorontalo	128	18.313	69,89	31	11.528	26,89	18	8.815	20,42
2	Kab. Gorontalo	326	38.101	85.56	153	19.727	77,55	42	15.887	26,44
3	Kab. Boalemo	146	19.164	76.18	62	9.897	62,64	23	9.792	23,49
4	Kab. Pohuwato	137	15.963	85.82	57	7.252	78,6	24	6.853	35,02
5	Kab. Bone Bolango	138	20.358	67,78	48	9.190	52,23	21	8.322	25,23
6	Kab. Gorontalo Utara	138	13.297	103,78	54	7.550	71,52	20	6.025	33,19
	Jumlah	1.013	125.196	72,77	405	65.126	62,19	148	55.694	26,57

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Dari jumlah gedung sekolah sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas, masih terdapat 8,9 persen gedung sekolah tahun 2016 yang tidak dalam kondisi baik (kurang

layak digunakan dalam proses belajar mengajar). Melalui program peningkatan akses layanan pendidikan yang dilaksanakan selama 2012-2016 yang diprioritaskan pada pembangunan dan rehab gedung sekolah dan ruang kelas, maka angka tersebut mengalami penurunan rata-rata sebesar 15,3 persen dari tahun 2012.

Tabel 2.56
Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik

Persentase Sekolah kondisi bangunan baik	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
-SD/MI	78,05	84,43	92.30	87.00	87.02
- SMP/MTs	81,67	83,03	96.13	90.50	91.00
- SMA/MA	89,75	88,81	90.28	91.22	93.00
- SMK	88,98	88,62	93.73	94.52	93.60

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2017

Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru dimasing-masing tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan.

Perkembangan Rasio guru murid selama kurun waktu 2012-2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya, untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2016 sebesar 681,92 per 10.000 murid, ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 17 murid (perbandingan rasio guru murid SD/MI 1:17), sedangkan pada sekolah setingkat SMP/MTs sebesar 809,64 per 10.000 murid, yang berarti bahwa setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid (perbandingan rasio guru murid SMP/MTs 1:12). Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK rasio guru murid sebesar 802,69 per 10.000 murid, yang mengindikasikan bahwa setiap guru mengajar anak didik SMA/MA/SMK sebanyak 13 murid (perbandingan rasio guru murid SMA/MA/SMK 1:13). Sementara sebagaimana Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 dan SPM Pendidikan, bahwa rasio ideal guru murid untuk SD/MI 1:32, SMP/MTs 1 : 36 dan SMA/MA/SMK 1 : 20. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2016 Provinsi Gorontalo masih kelebihan Guru.

Tabel 2.57

Jumlah Guru dan Murid jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI						
1.	Jumlah Guru	9.725	10.039	9.993	9.920	8.706
2.	Jumlah Murid	151.416	158.060	156.535	159.007	139.473
3.	Rasio	642,27	635,13	638,38	623,87	681,92
SMP/MTs						
1.	Jumlah Guru	4.734	3.694	5.638	5.234	5.260
2.	Jumlah Murid	62.366	64.243	63.520	65.706	64.967
3.	Rasio	759,06	575	887,59	796,57	809,64
SMA/SMK/MA						
1.	Jumlah Guru	3.371	3.453	3.795	3.824	4.182
2.	Jumlah Murid	48.692	51.933	47.155	54.870	52.100
3.	Rasio	692,31	664,89	804,79	696,92	802,69

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Dilihat dari sisi kuantitas, Provinsi Gorontalo mengalami kelebihan jumlah guru. Namun yang menjadi permasalahan adalah distribusi guru yang belum merata di masing-masing Kabupaten/Kota. Berikut adalah sebaran jumlah guru dimasing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.58

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Menurut kabupaten/kota Tahun 2016 Provinsi Gorontalo

NO	KABUPATEN /KOTA	SD/MI				SMP/MTs				SMA/SMK/MA			
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Perbandingan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Perbandingan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Perbandingan
1	Kota Gorontalo	1.280	25.300	505,9	1 : 19	873	10.628	821,4	1 : 12	921	10.024	987,8	1 : 11
2	Kab. Gorontalo	2.230	53.935	747,6	1 : 24	1.712	24.675	693,8	1 : 14	1.108	10.265	536,6	1 : 9
3	Kab. Boalemo	1.320	21.552	612,2	1 : 16	739	8.459	873,6	1 : 11	593	9.128	831,9	1 : 15
4	Kab. Pohuwato	1.290	21.650	595,8	1 : 16	707	7.650	924,2	1 : 11	512	8.021	850,4	1 : 16
5	Kab. Bone Bolango	1.322	12.510	755,0	1 : 9	734	9.258	791,1	1 : 12	624	8.214	865,0	1 : 13
6	Kab. Gorontalo Utara	1.276	15.311	832,8	1 : 12	495	5.739	862,5	1 : 11	424	6.448	818,4	1 : 15
	Jumlah	8.706	139.473	681,92	1 : 16	5260	64.967	809,64	1 : 12	4.182	52.100	802,69	1 : 12

Sumber : Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Untuk mencapai layanan pendidikan yang bermutu, selain focus pada distribusi guru, juga perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

Tahun 2016 guru yang berijazah Diploma 4/S1 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 77%, guru jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 84%, dan guru jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 85% berijazah Diploma 4/S1, dan 9 % sarjana Strata 2/Lebih.

Tabel 2.59

Jenjang Pendidikan Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Provinsi Gorontalo
Tahun 2014-2016

Guru Jenjang Pendidikan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<=SLTA	2.596	1.986	1.265	397	409	333			
PGSLP/Diploma 1	49	1.938	39	210	153	107	112	112	126
Diploma 2	1.312	843	511	219	108	58	39	15	20
Diploma 3 / Sarmud	112	874	191	146	131	95	118	113	109
Diploma 4 / S1	5.749	10.057	7.319	4.438	4.193	4.362	3.131	3.231	3.557
S2/Lebih	127	10.214	194	226	241	227	370	360	394

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2017

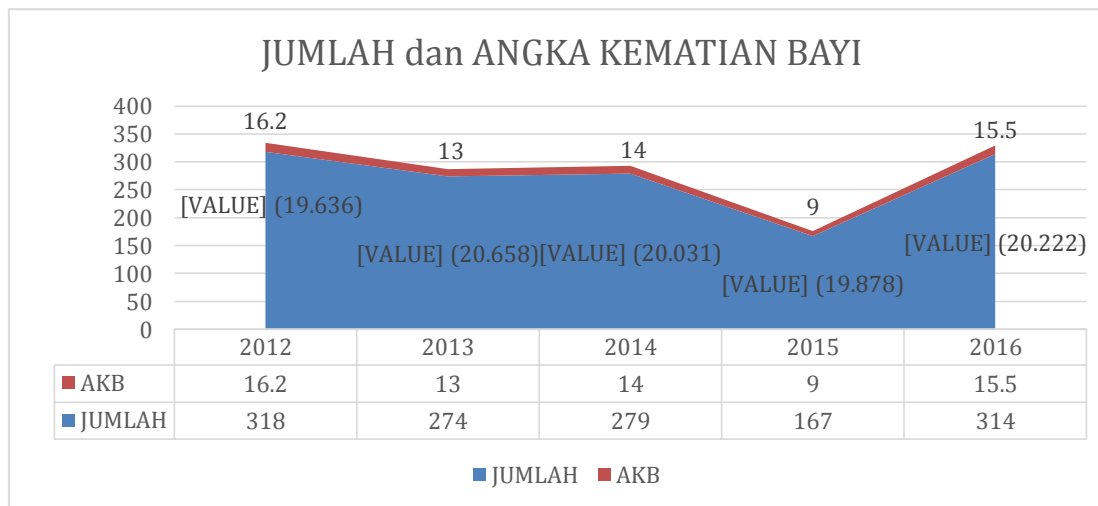
2.4.1.2 Kesehatan

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo 2012-2016 dilihat dari aspek akses dan mutu pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Provinsi Gorontalo selang Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi/*Infant Mortality Rate* (IMR) berumur kurang dari 1 (satu) tahun. Dalam 5 tahun terakhir Angka Kematian Bayi (AKB) terjadi fluktuatif dalam penurunnya sebagaimana grafik dibawah ini :

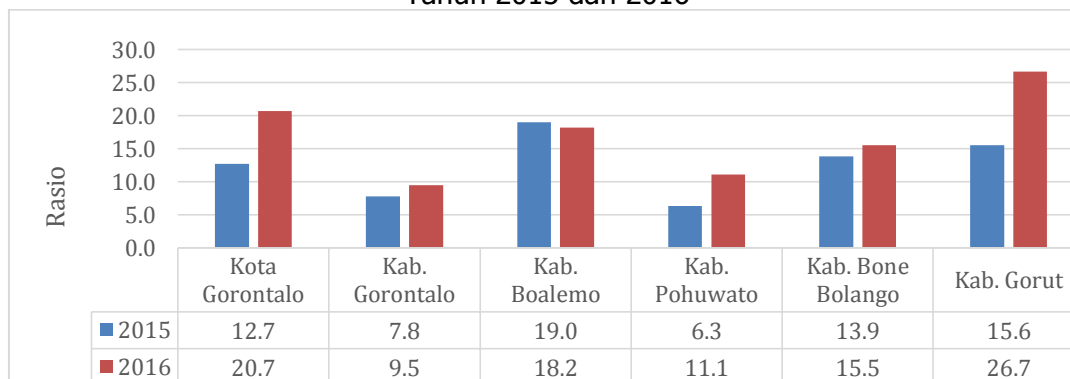
Gambar 2.29
Trend Jumlah dan Angka Kematian Bayi
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016



Sumber data : Profil Kesehatan Tahun 2012 - 2016

Penyebab kematian pada kelompok umur ini disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 27% dan Asfiksia sebanyak 21%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan kedepan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Gambaran Angka Kematian Bayi berdasarkan Kabupaten/Kota selang Tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.30
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
Tahun 2015 dan 2016

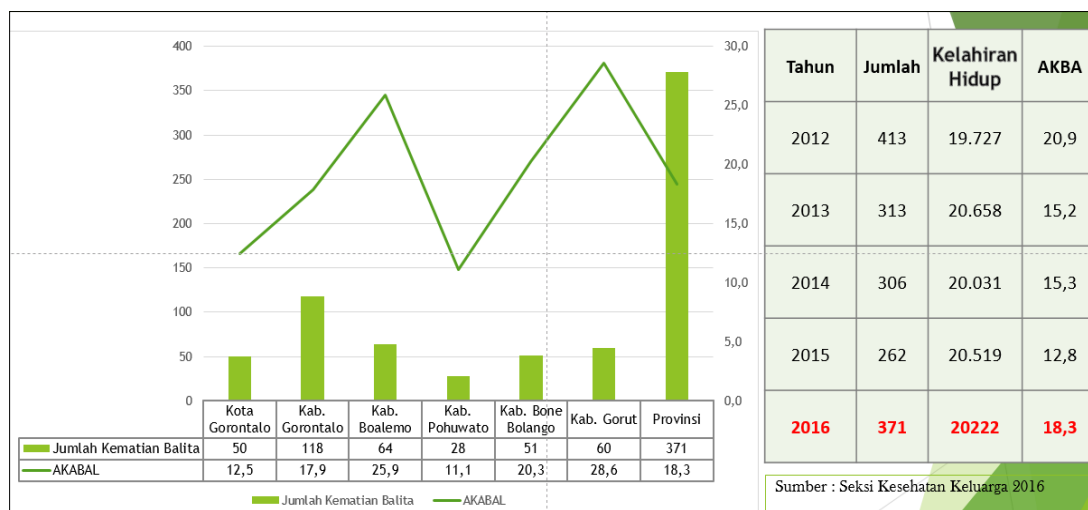


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

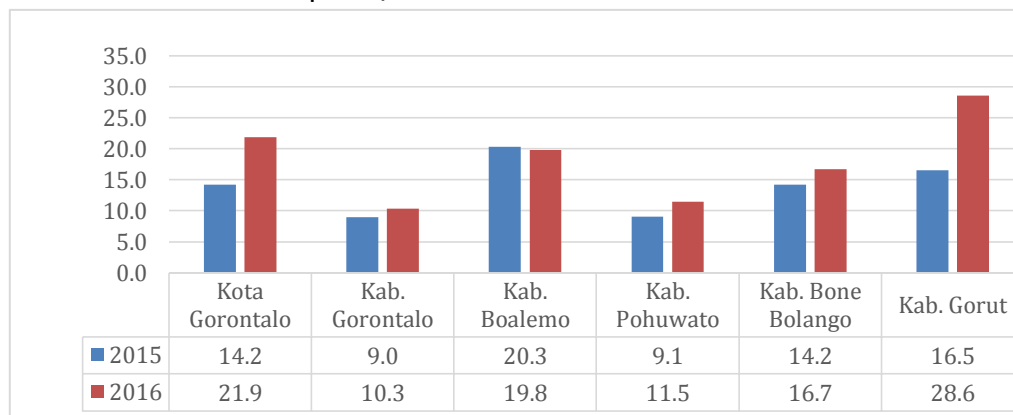
Jumlah balita usia sampai 59 bulan yang meninggal dunia Tahun 2016 di Provinsi Gorontalo adalah 320 orang. Penyebab kematian balita di Provinsi Gorontalo antara lain disebabkan oleh Diare : 20%, Ispa : 8%, Typoid : 4%, Kelainan saluran cerna : 4%, Lain-lain : 64%. Berikut ini gambaran AKABA di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 -2016.

Gambar 2.31
Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 -2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 2.32
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup
menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dan 2016



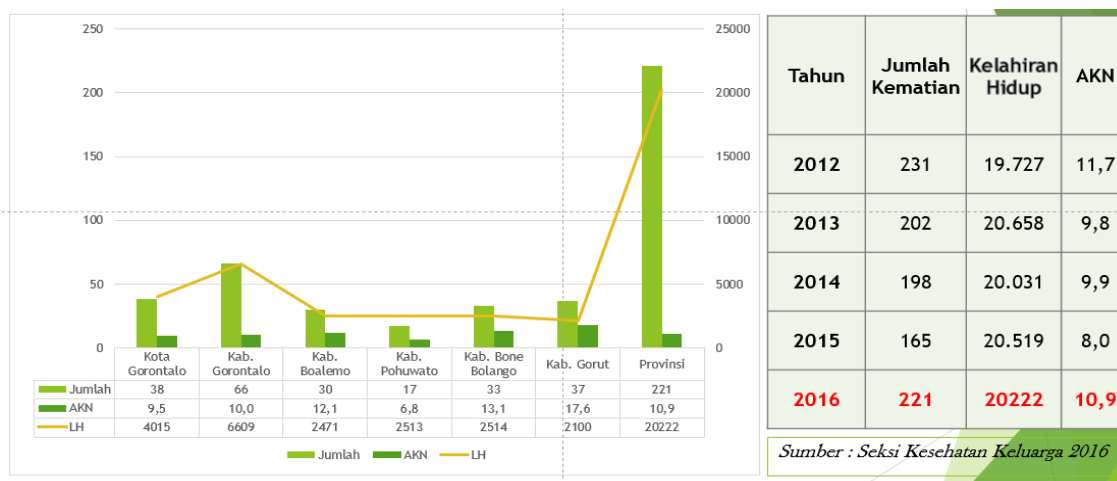
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup.

Tahun 2016, jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal dunia adalah 221 bayi dari 20.222 kelahiran hidup, sehingga berdasarkan formula capaian AKN Tahun 2016 mencapai 10,9/1000 KH. Angka ini mengalami kenaikan dari capaian tahun 2015 yakni hanya 8/1000 KH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.33

Jumlah dan Angka Kematian Neonatal
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Penyebab utama kematian neonatal yang paling tinggi adalah disebabkan oleh Asfiksia 36%, di susul oleh BBLR 35%, kelainan kongenital : 7,87 dan penyebab lain-lain : 16,36.

Hal ini dipengaruhi antara lain perilaku ibu dan keluarga seperti :

- 1) BBLR : ibu hamil kurang gizi, ibu hamil kurang darah (anemia), jarak kelahiran kurang dari 2 tahun, dan ibu berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.
- 2) Asfiksia : perdarahan saat hamil dan persalinan, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, bayi lahir dengan tindakan, dan BBLR.

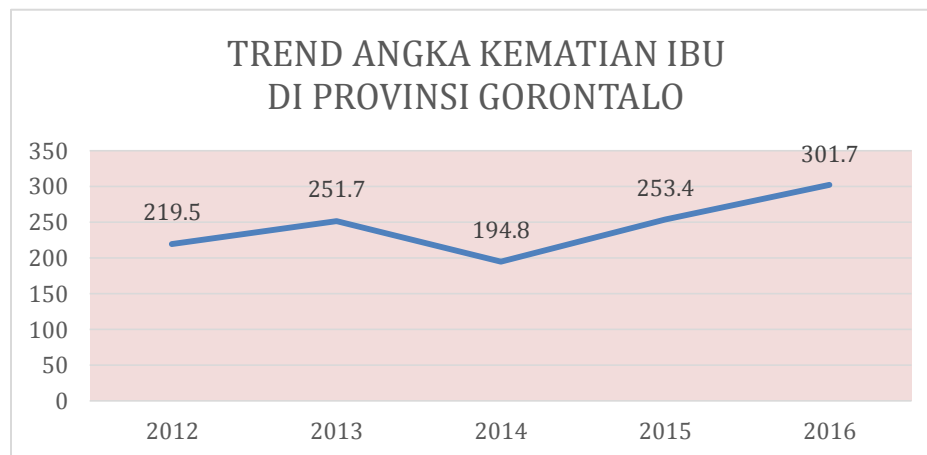
Selain BBLR dan Asfiksia, penyebab lainnya yakni kelainan kongenital, hal ini dipengaruhi oleh pada saat ibu hamil sering mengonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok (perokok pasif).

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas pelayanan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan *post partum*. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal *Care dilaksanakan dengan baik*. Tahun 2016 AKI mengalami peningkatan signifikan mencapai 301,7 per 100.000 kelahiran hidup.

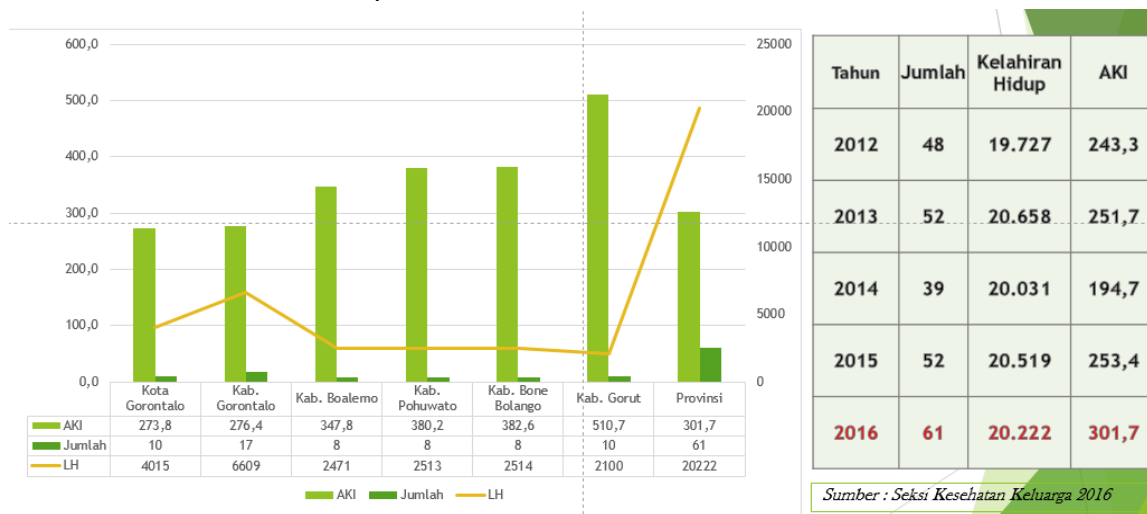
Gambar 2. 34

Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo
Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 2.35
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2016



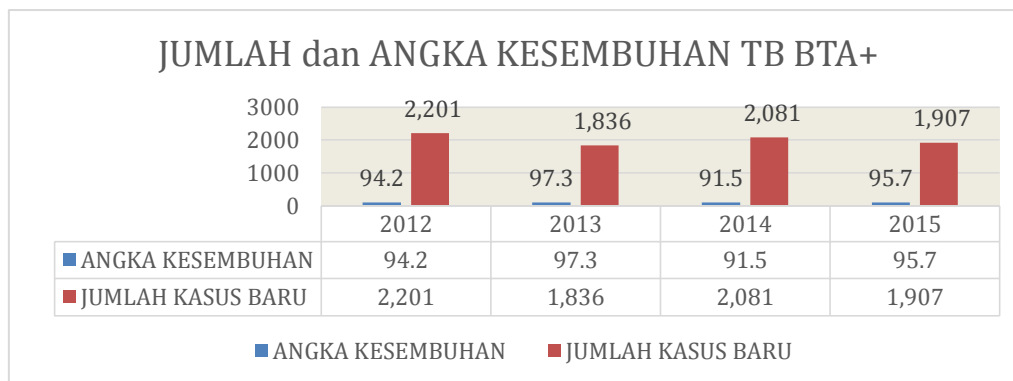
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Angka Kesakitan (Morbidity).

Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, di Provinsi Gorontalo beberapa indikator morbiditas penyakit tertentu yang merupakan keterkaitan dengan komitmen global.

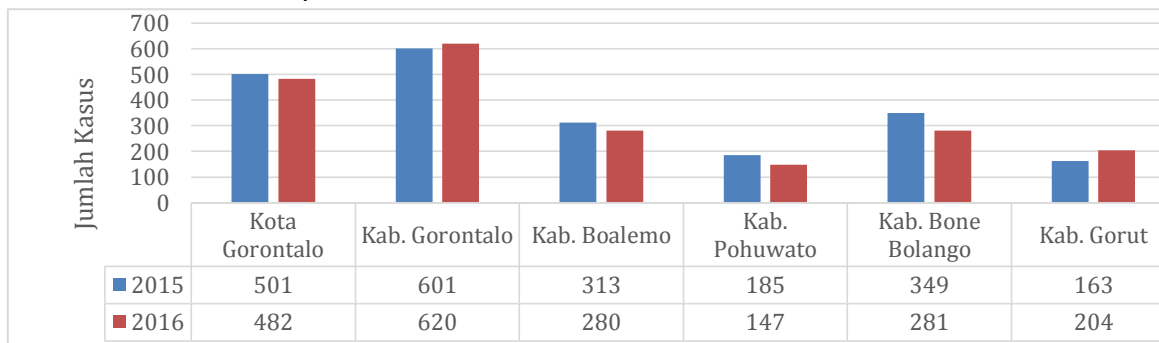
Persentase kesembuhan TB BTA+ tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tahun 2016 penemuan kasus TB BTA+ sebanyak 2.014 kasus tetapi persentase angka kesembuhan belum dapat dihitung karena masih ada yang belum selesai pengobatan.

Gambar 2.36
Jumlah dan persentase kesembuhan dan jumlah penemuan kasus baru TB BTA+
Provinsi Gorontalo tahun 2012 s/d 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

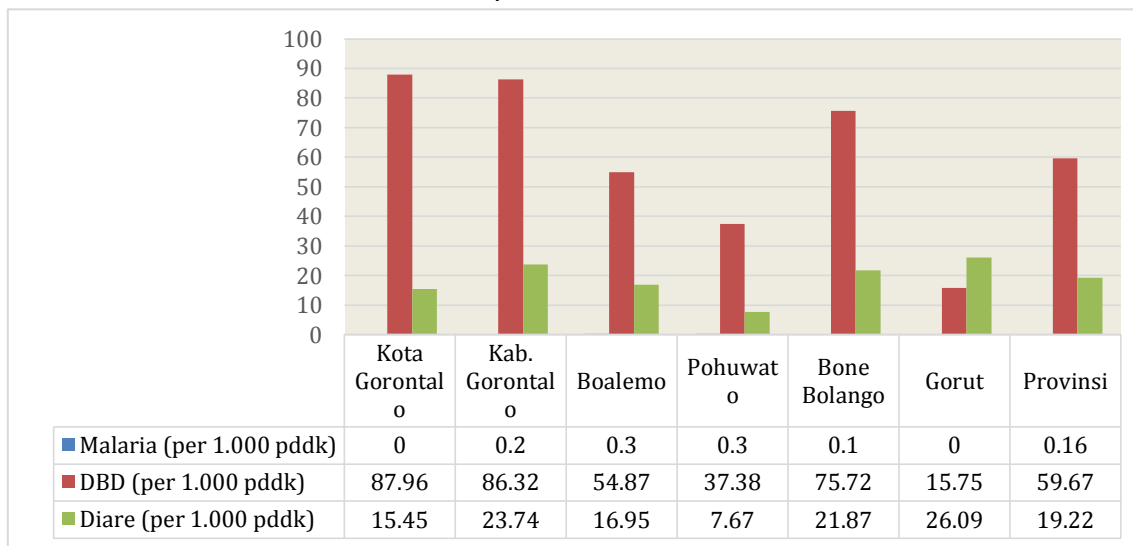
Gambar 2.37
Jumlah Kasus TB BTA+
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2015 s/d 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Disamping itu untuk angka kesakitan Penyakit Malaria, DBD dan Diare di Provinsi Gorontalo sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Gambar 2.38
Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare
Di Kabupaten / Kota Tahun 2016

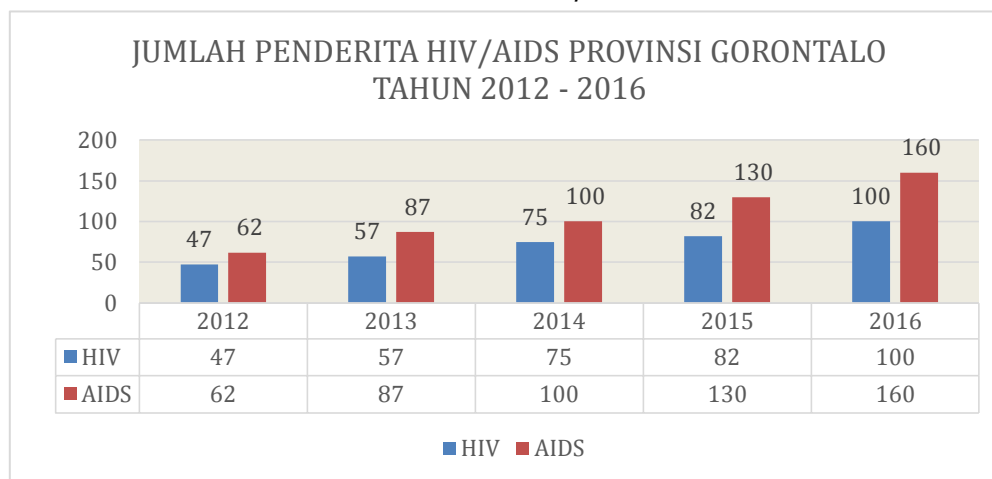


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Kecenderungan prevalensi kasus HIV dan AIDS Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Penanganan intensif secara menyeluruh dan terpadu untuk mencegah dan

menanggulangi HIV AIDS perlu digalakkan diantaranya sosialisasi pencegahan HIV AIDS pada kelompok potensial.

Gambar 2.39
Jumlah Penderita HIV/AIDS Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 s/d 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Upaya Kesehatan Masyarakat

- Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan intensif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Cakupan komplikasi kebidanan di Provinsi Gorontalo selang tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.60

Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012 - 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	66,3	66,5	59,8	79,7	89,81
2	Kabupaten Gorontalo	77,1	81,3	55,1	93,4	100
3	Kabupaten Boalemo	88,9	89,5	101,7	93,0	106,1
4	Kabupaten Pohuwato	80,9	101,9	98,5	43,9	72,5
5	Kabupaten Bone Bolango	69,0	87,0	127,1	89,5	99,7
6	Kabupaten Gorontalo Utara	49,0	36,6	17,0	16,9	85,3
	Provinsi Gorontalo	73,0	78,8	73,61	75,47	92,57

Sumber Data : Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

- CakupanPertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi
Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai kala I sampai kala IV persalinan. Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan.Tahun 2012 - 2016 jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan berdasarkan kabupaten/kota ditunjukkan dalam dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.61

Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012 - 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	96,7	99,0	92,8	95,8	95,9
2	Kabupaten Gorontalo	85,1	89,5	87,4	92,5	84,0
3	Kabupaten Boalemo	96,6	94,3	91,8	88,5	72,3
4	Kabupaten Pohuwato	97,6	103,5	99,1	95,2	96,9
5	Kabupaten Bone Bolango	76,4	99,8	83,9	86,7	75,7
6	Kabupaten Gorontalo Utara	106,3	109,1	99,2	95,7	68,3
	Provinsi Gorontalo	90,5	96,8	91,0	92,4	82,9

Sumber Data : Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan gambaran dimana $\geq 87,5\%$ dari jumlah bayi yang ada disuatu desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Berikut ini gambaran pencapaian UCI kurun waktu 2012-2016.

Tabel 2.62
Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCIProvinsi Gorontalo
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012 - 2016

NO	Kabupaten Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	80,00	6800	66,00	92,00	94,00
2	Kabupaten Gorontalo	61,00	73,70	83,90	97,07	92,68
3	Kabupaten Boalemo	94,00	95,10	92,90	90,48	88,10
4	Kabupaten Pohuwato	53,00	90,30	99,00	96,19	98,08
5	Kabupaten Bone Bolango	72,00	84,20	85,50	70,91	84,24
6	Kabupaten Gorontalo Utara	59,00	70,70	89,50	79,67	83,74
	Provinsi Gorontalo	67,00	80,00	85,70	87,02	89,60

Sumber Data : Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

- Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk. Perawatan gizi buruk dilaksanakan melalui prosedur rawat inap dan rawat jalan. Bagi anak-anak gizi buruk yang disertai komplikasi penyakit dapat dirawat di puskesmas, rumah Sakit, dan Therapeutic Feeding Centre (TFC), sedangkan bagi anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat dirawat jalan. Perawatan anak di rumah dilakukan melalui pembinaan petugas kesehatan dan kader.

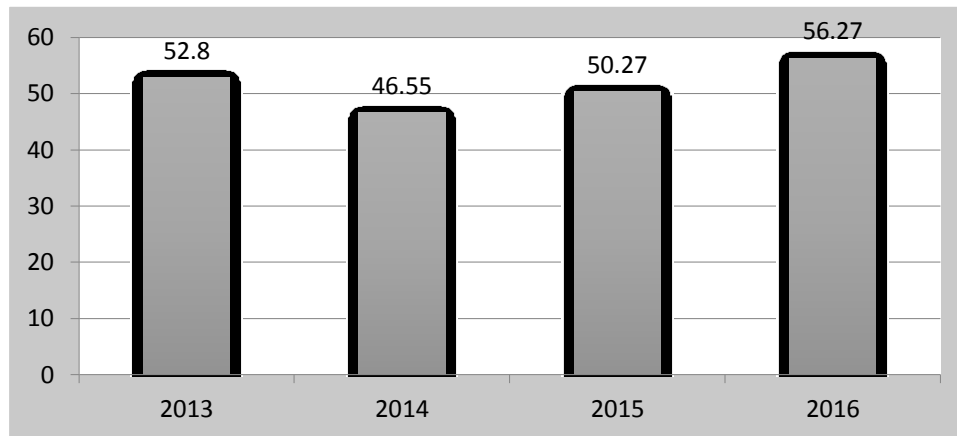
Di Provinsi Gorontalo balita gizi buruk dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis yang terdeteksi semuanya (100%) mendapat perawatan baik itu berupa rawat inap di TFC, puskesmas perawatan dan rumah sakit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan dan rumah sakit.

- Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga di daerah kota maupun desa. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 56,27%. Data selengkapnya dapat di lihat pada grafik berikut

Gambar 2.40
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat
Tahun 2013-2016



Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target akses sanitasi dasar yaitu:

- a). Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama agar masyarakat dapat mengadopsi perilaku yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.
 - b). Program Pamsimas baru menjangkau 2 kabupaten dari total 6 Kabupaten/Kota
 - c). MCK tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena masalah teknis dan kebersihan, sehingga tidak dihitung sebagai akses jamban.
- Persentase rumah tangga pengguna air bersih dan sehat

Pengadaan akses air bersih sangat penting untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat di provinsi Gorontalo tahun 2014 yaitu 42,5% meningkat di tahun 2015 menjadi 63,8% dan tahun 2016 meningkat menjadi 69,5% sebagaimana target yang ditetapkan tahun 2016 yakni 69,56%.

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan strata 1 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh miskin di wilayah kabupaten/kota. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin di Provinsi Gorontalo selang tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.63
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Maskin
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	11,5	12,5	0	1,9	7,61
2	Kabupaten Gorontalo	0,3	0	0	0	0,88
3	Kabupaten Boalemo	4,4	0,8	0,8	2,4	29,94
4	Kabupaten Pohuwato	10,0	0,7	0	1,6	2
5	Kabupaten Bone Bolango	6,1	8,6	6,0	2,4	3,1
6	Kabupaten Gorontalo Utara	0,6	0,4	0	1,4	2,10
	Provinsi Gorontalo	3,5	2,9	3,4	1,8	7,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2016

Tenaga dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah dan Rasio Posyandu di Provinsi Gorontalo diperoleh dengan menggunakan formula ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.64
Jumlah Posyandu dan Balita
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah posyandu	1.316	1.298	1.310	1.304	1.308
2.	Jumlah balita	100.820	105.857	106.786	125.200	110.965
3.	Rasio	13,0	12,3	12,3	10,28	11,79

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.65
Jumlah Posyandu dan Balita Provinsi Gorontalo
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

NO	Kabupaten/kota	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kota Gorontalo	126	19.317	6,5
2	Kabupaten Gorontalo	464	17.795	26,1
3	Kabupaten Boalemo	149	15.011	9,9
4	Kabupaten Pohuwato	140	41.782	3,3
5	Kabupaten Bone Bolango	206	17.551	11,7
6	Kabupaten Gorontalo Utara	219	13.744	15,9
	Jumlah	1.304	125.200	10,4

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun 2016

- Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Jumlah sarana kesehatan puskesmas dan jaringannya di Provinsi Gorontalo selang Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.66

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 sd 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Puskesmas	88	92	93	93	93
2.	Jumlah Poliklinik	4	9	22	19	19
3.	Jumlah Pustu	207	243	242	232	232
4.	Jumlah Penduduk	1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,003	0,008	0,02	0,02	0,02
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,13	0,22	0,21	0,21	0,21

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Keberadaan puskesmas pembantu (pustu) juga sangat penting dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat, yang merupakan bagian integral dari puskesmas. Masalah akses dan ketersediaan sarana transportasi untuk menjangkau pelayanan kesehatan, sehingga menjadikan pustu menjadi pilihan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Tabel 2.67

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Provinsi Gorontalo
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

NO	Kabupaten/ kota	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Kota Gorontalo	205.187	10	0,05	9	0,04	31	0,15
2	Kabupaten Gorontalo	374.771	21	0,06	0	0,00	80	0,21
3	Kabupaten Boalemo	154.403	11	0,07	3	0,02	38	0,25
4	Kabupaten Pohuwato	136.544	16	0,12	0	0,00	0	0,00
5	Kabupaten Bone Bolango	171.589	20	0,12	5	0,03	32	0,02
6	Kabupaten Gorontalo Utara	124.445	15	0,12	2	0,02	2	0,02
	Jumlah	1.166.939	93	0,08	19	0,02	232	0,02

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Tabel 2.68
Cakupan Puskesmas Tahun 2012 sd 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas	88	92	93	93	93
2	Jumlah Kecamatan	70	76	78	77	77
3	Persentase Cakupan	125,7	121,0	119,2	120,8	120,8

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Tabel 2.69
Cakupan Puskesmas Pembantu
Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas Pembantu	207	243	242	232	174
2	Jumlah seluruh desa	729	731	732	731	731
3	Persentase Cakupan	28,4	33,2	33,1	31,7	23,8

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

- Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo periode 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah Prov)	-	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	1	-	-	-
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	7	7	8	8	8
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	4
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	10	12	12	12	13
7.	Jumlah Penduduk	1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765
8.	Rasio	0,009	0,011	0,011	0,011	0,012

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Tabel 2.71

Jumlah Rumah Sakit Provinsi Gorontalo
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

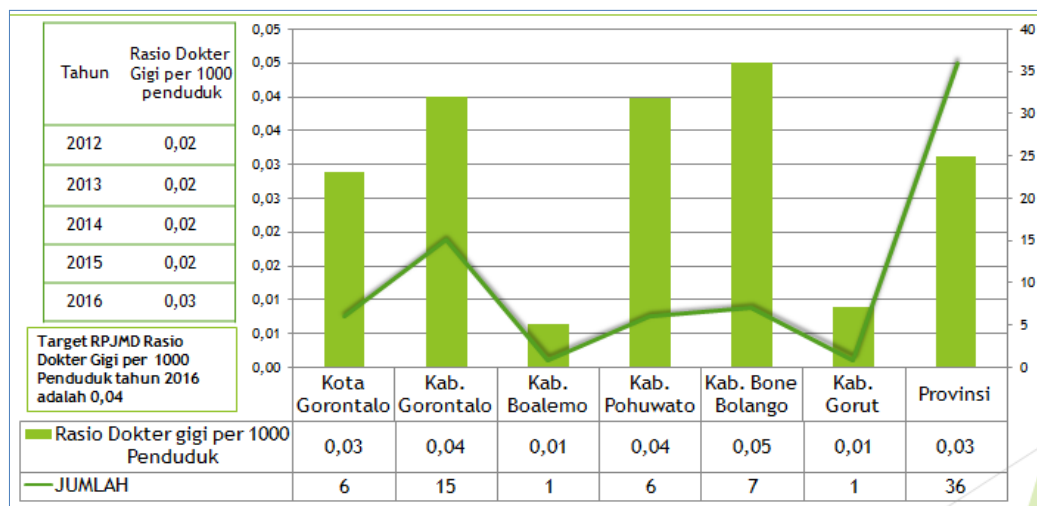
NO	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	Rumah Sakit Daerah	Rumah Sakit Swasta	Total	
								Jumlah	Rasio
1	Kota Gorontalo	205.187	-	-	-	2	4	6	0,03
2	Kabupaten Gorontalo	374.771	1	-	-	1	-	2	0,005
3	Kabupaten Boalemo	154.403	-	-	-	1	-	1	0,006
4	Kabupaten Pohuwato	136.544	-	-	-	1	-	1	0,007
5	Kabupaten Bone Bolango	171.589	-	-	-	2	-	2	0,011
6	Kabupaten Gorontalo Utara	124.445	-	-	-	1	-	1	0,008
	Jumlah	1.166.939	1	-	-	8	4	13	0,011

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

- Rasio Dokter per satuan Penduduk
 - *Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk*

Gambar 2.41

Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

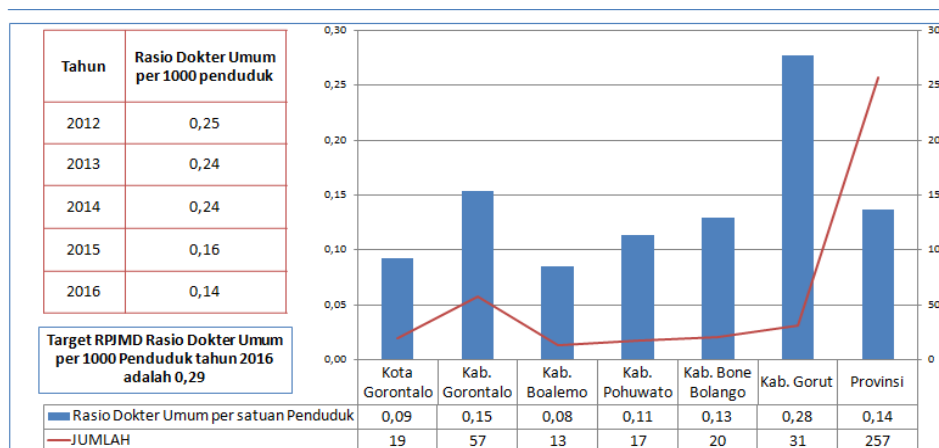


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

- *Rasio Dokter Umum per 1.000 penduduk*

Gambar 2.42

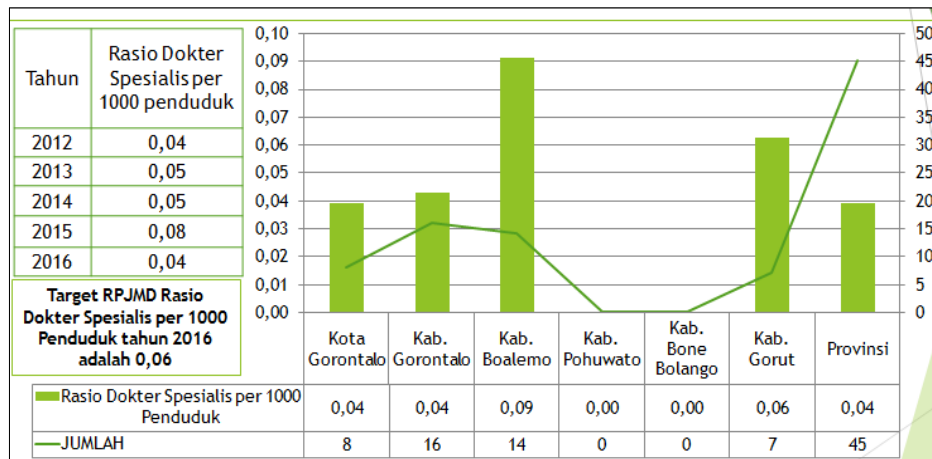
Rasio Dokter umum Per Satuan Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

- Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk

Gambar 2.43
Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

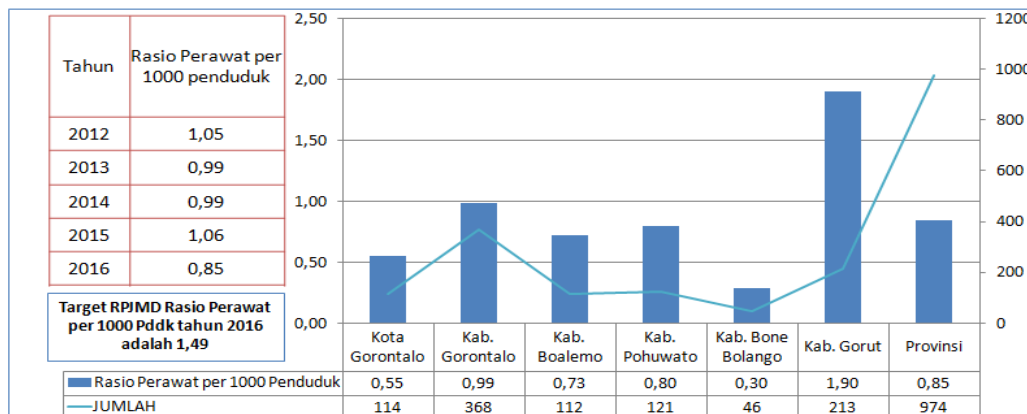


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

- Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

- Rasio Perawat Per Satuan penduduk

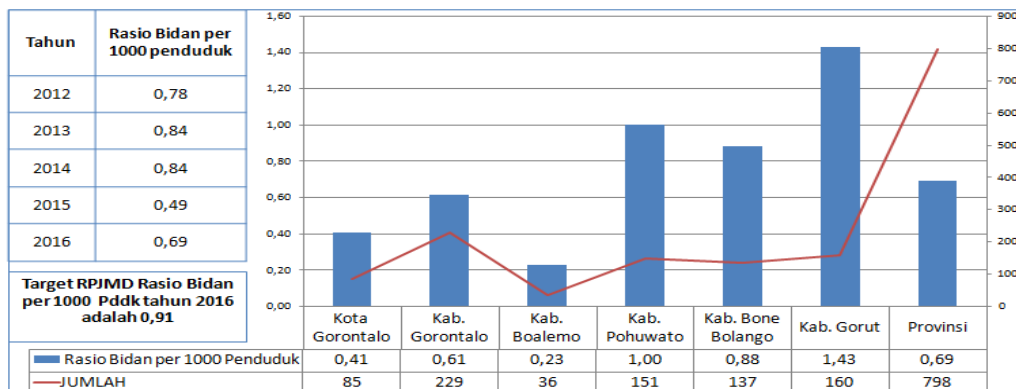
Gambar 2.44
Rasio Perawat Per Satuan Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

- Rasio Bidan per Satuan Penduduk

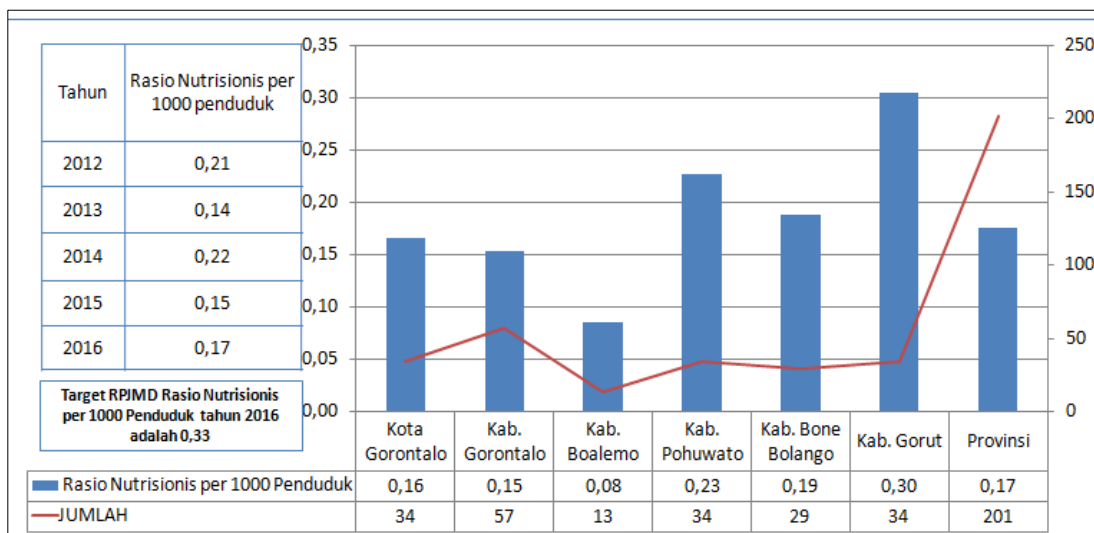
Gambar 2.45
Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

- Rasio Nutrisionis per Satuan Penduduk

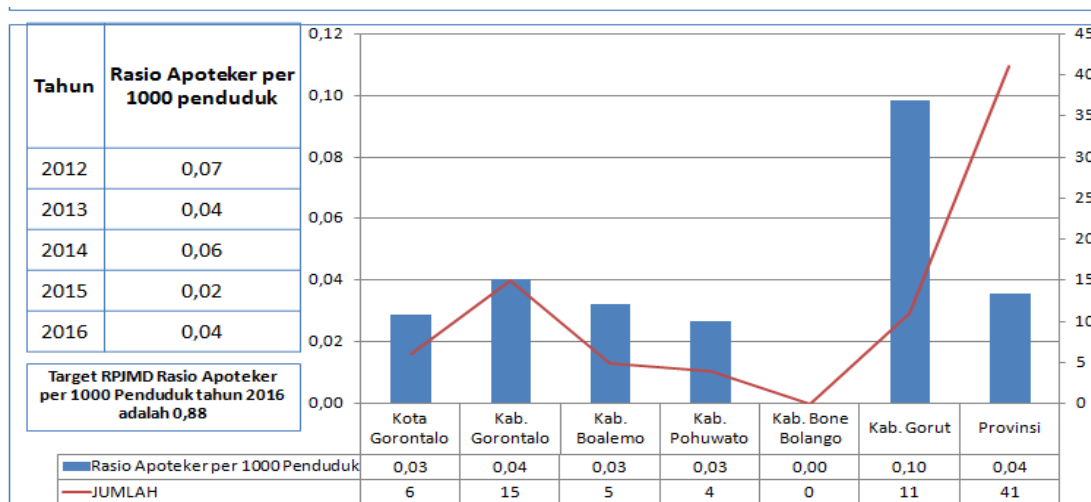
Gambar 2.46
Rasio Nutrisionis Per Satuan Penduduk
Tahun 2012-2016 di Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

- Rasio Tenaga Apoteker per Satuan Penduduk

Gambar 2.47
Rasio Tenaga Apoteker Tahun 2012-2016 di Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Berdasarkan Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota, maka panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km, sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km.

Tabel 2.72

Panjang Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)		
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kab/Kota
1.	Kab. Gorontalo	141,27	47,39	1.891,40
2.	Kab. Bone Bolango	68,32	64,08	435,45
3.	Kab. Gorontalo Utara	204,09	45,00	-
4.	Kota Gorontalo	21,24	26,44	158,87
5.	Kab. Boalemo	164,20	118,60	626,30
6.	Kab. Pohuwato	149,48	131,00	525,53
	Jumlah	748,60	432,51	3.637,55

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, 2016

Panjang jalan Nasional Provinsi Gorontalo dengan kondisi baik sebesar 70,65%, kondisi sedang sebesar 19,21%, untuk kondisi rusak ringan sebesar 3,21%, sementara kondisi jalan dengan kategori rusak berat sebesar 6,93%.

Sementara kondisi jalan Provinsi yang memiliki kondisi baik sebesar 48,32%, kondisi sedang rusak sebesar 3,65%, untuk kondisi rusak ringan sebesar 5,65%, sementara kondisi jalan dengan kategori rusak berat sebesar 16,95 persen. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut, maka kondisi mantap jalan provinsi sebesar 41,15%.

Tabel 2.73

Panjang Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

No	Kondisi jalan	Panjang jalan (Km) tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Jalan Nasional	606.70	606.70	606.70	748.6	748.61
	- Baik	153.87	232.55	322.99	440.12	528.91
	- Sedang	278.91	302.90	251.72	228.16	143.79
	- Rusak ringan	91.41	34.85	19.89	11.07	24.00
	- Rusak Berat	82.51	36.4	12.1	69.25	51.90
	- Aspal	197.13	193.13	197.13	748.60	719.21
	- Berbatu	-	-	-	-	-
	- Hotmix (Aspal Beton)	606.70	606.70	606.70	-	-
	- Cor Beton	-	-	-	-	-
	- Kerikil	125.43	125.43	125.43	-	-
	- Tanah	-	-	-	-	-

No	Kondisi jalan	Panjang jalan (Km) tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
2.	Panjang Jalan Provinsi	432.51	432.51	432.51	432.51	432.51
	- Baik	174.11	174.11	196.97	209,00	209.00
	- Sedang	24.83	24.83	21.05	15,80	15.80
	- Rusak ringan	39.58	39.58	27.43	24,43	24.43
	- Rusak Berat	84.05	84.05	77.51	73,33	73.33
	- Aspal (Lapen)	197.13	197.13	197.13	197.13	197.13
	- Berbatu	-	-	-	-	-
	- Hotmix (Aspal Beton)	-	-	-	-	-
	- Cor Beton	-	-	-	-	-
	- Kerikil	125.43	125.43	125.43	89.15	89.15
	- Tanah/ Belum Terbuka	109.95	109.95	109.95	90.20	90.20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, 2016

Program pembangunan bidang infrastruktur salah satunya adalah dengan Pembangunan Jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi maupun strategis provinsi. Sampai dengan Tahun 2016, total panjang ruas jalan yang dibangun dan yang ditingkatkan adalah 59.01 Km. Untuk total ruas jalan strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 32,94 Km, dan untuk panjang pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi adalah sepanjang 71,95 Km.

Tabel 2.74

Data Jalan Provinsi Dan Jalan Strategis Provinsi Yang Dibangun Dan Ditingkatkan Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Ruas Jalan Provinsi Yang Dibangun dan Yang Ditingkatkan	Km ²	-	7.34	27.86	13.81	10
2.	Panjang Ruas Jalan Strategis Provinsi Yang Dibangun dan Yang Ditingkatkan	Km ²	-	7.12	5.70	10.12	10
3.	Panjang Pemeliharaan Berkala Pada Ruas Jalan Provinsi	Km ²	19.79	12.85	8.14	22.99	8.18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, 2016

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Gorontalo, sejak tahun 2014 telah dibangun jalan lingkaran luar Gorontalo atau Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 45 Km, yang menghubungkan 3 wilayah yaitu Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango, yang dibagi dalam tiga segmen. Untuk segmen 1 sepanjang 15 kilometer dan segmen 2 sepanjang 11 kilometer, dan segmen 3 sepanjang 26 Km. Pembangunan GORR telah diamanatkan dalam RTRW Nasional maupun RTRW Provinsi.

Sesuai data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, sampai dengan tahun 2016, jembatan yang dibangun di ruas jalan Provinsi sebanyak 3 buah, sementara jembatan yang dibangun pada ruas jalan strategis Provinsi sebanyak 9 buah. Untuk total panjang jembatan di ruas jalan provinsi yang dipelihara yaitu sebesar 853,52 meter.

Tabel 2.75
Data Jumlah dan Kondisi Jembatan
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jembatan yang dibangun Diruas Jalan Provinsi	Jembatan	1	1	1	-	-
2.	Jembatan yang dibangun Pada Ruas Jalan Strategis Provinsi	Jembatan	4	2	2	-	1
3.	Panjang Jembatan Diruas Jalan Provinsi yang Dipelihara	Meter	-	189.50	531.31	477.85	345,14
4	Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Buah	52	53	54	54	54

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, 2016

2. Sumber Daya Air dan Irigasi

Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi sangat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian. Luas lahan sawah irigasi di Provinsi Gorontalo dibedakan berdasarkan kewenangan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat kewenangan, yaitu :

- Kewenangan pusat dengan luas lahan sawah > 3.000 ha
- Kewenangan provinsi dengan luas lahan sawah antara 1.000 – 3.000 ha
- Kewenangan kabupaten dengan luas lahan sawah < 1.000 ha

Adapun pembagian daerah irigasi berdasarkan kewenangannya di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada table berikut. :

Tabel 2.76
Daerah Irigasi Provinsi Gorontalo

No	Nama daerah irigasi (DI)	Jumlah DI	Luas lahan (Ha)
I.	Kewenangan Pusat (> .3000 Ha)	3	13,471
1.	DI. Paguyaman		6,880
2.	DI. Irigasi Lomaya/Ale		3,148
3.	DI. Alo Pohu		3,443
II.	Kewenangan Provinsi (1.000 – 3.000 Ha)	7	10,313
1.	DI. Pilohanayangan		1,045
2.	DI. Hudupitango		1,150
3.	DI. Taluduyunu		2,576
4.	DI. Bongo		1,298
5.	DI. Tolinggula		1,337
6.	DI. Bulia		1,549
7.	DI. Tabulo Latula		1,358
III.	Kewenangan Kabupaten (< 1.000 Ha)	110	17,892
A.	Kabupaten Boalemo	5	649
1.	DI. Karya Agung		361
2.	DI. Kramat		35
3.	DI. Mekar Jaya		103
4.	DI. Pangea		100
5.	DI. Tutulo		50
B.	Kab. Bone Bolango	9	721
1.	DI. Posolo		55
2.	DI. Molonuayo		26
3.	DI. Sambapuga		40
4.	DI. Butaiyo Daa		35
5.	DI. Tunggulo		65
6.	DI. Bongopini		120
7.	DI. Ulanta		70
8.	DI. Perintis		170
9.	DI. Pinogu		140
C.	Kab. Gorontalo	48	9,367
1.	DI. Bumela		125
2.	DI. Hunggaluwa		276
3.	DI. Molalahu		155
4.	DI. Tombiu		496
5.	DI. Beringin		200
6.	DI. Bina Jaya		40
7.	DI. Boliyohuto Kiki		130
8.	DI. Buhu		103
9.	DI. Bululi		150
10.	DI. Hunggaluwa/Helumo		864
11.	DI. Iloponu		50
12.	DI. Isimu Selatan		150
13.	DI. Karyamukti (Motobuloo Daa)		130
14.	DI. Kayubulan Bawah		130

No	Nama daerah irigasi (DI)	Jumlah DI	Luas lahan (Ha)
15.	DI. Limehe Timur		203
16.	DI. Moahudu (Manggulipa)		250
17.	DI. Modelidu		150
18.	DI. Mohiyolo		361
19.	DI. Mohiyolo I		200
20.	DI. Milalahu I		564
21.	DI. Molamahu		200
22.	DI. Molamahu I		120
23.	DI. Molamahu II		130
24.	DI. Monggelomo		40
25.	DI. Ombulo (Marisa I)		94
26.	DI. Padengo		80
27.	DI. Pangahu		570
28.	DI. Paris		190
29.	DI. Parungi		50
30.	DI. Payunga		100
31.	DI. Polohungo		250
32.	DI. Pongongaila		35
33.	DI. Prima		300
34.	DI. Puncak		50
35.	DI. Satria		130
36.	DI. Serayu		250
37.	DI. Serikat Tani I		75
38.	DI. Serikat Tani II		4
39.	DI. Sidodadi		200
40.	DI. Sidomukti		200
41.	DI. Tabongo (Ilowotia)		82
42.	DI. Talumopatu		100
43.	DI. Tenilo		200
44.	DI. Tenilo (Marisa III)		216
45.	DI. Toidito		185
46.	DI. Tonala		250
47.	DI. Tunggulo		339
48.	DI. Yosonegoro (Marisa II)		200
C.	Kab. Gorontalo Utara	36	5,567
1.	DI. Didinga		641
2.	DI. Leboto		142
3.	DI. Poso		310
4.	DI. Pulahenti		411
5.	DI. Sokiat		515
6.	DI. Abati I		125
7.	DI. Abati II		150
8.	DI Bohulo		120
9.	DI. Boalemo		11
10.	DI Buata		150
11.	DI. Bubode		150
12.	DI. Buloia Kanan		190
13.	DI. Buloila Kiri		100
14.	DI. Deme I		200
15.	DI. Deme II		80
16.	DI. Di Pulahenti II		145
17.	DI. Dulukapa		200
18.	DI. Ilangata		80

No	Nama daerah irigasi (DI)	Jumlah DI	Luas lahan (Ha)
19.	DI. Imana Tengah		37
20.	DI. Imana Ulu		165
21.	DI. Kasia		15
22.	DI. kota Jin		10
23.	DI. Mebongo		195
24.	DI. Molingkapto		130
25.	DI. Monano		250
26.	DI. Monggopu		40
27.	DI. Mootinelo		50
28.	DI. Umulo		80
29.	DI. Umulo II		75
30.	DI. Pintoyongan		75
31.	DI. Siagaso		185
32.	DI. Tenilo		125
33.	DI. Tolango		65
34.	DI. Tolongio		150
35.	DI. Tudi		50
36.	DI Wubudu		150
E.	Kab. Pohuwato	12	1,588
1.	DI Karangeten		234
2.	DI. Bunuyo		150
3.	Iloheluma		142
4.	DI. Ilota		170
5.	DI. Malango		15
6.	DI. Manunggal Karya		50
7.	DI. Marisa VI		200
8.	DI.molosipat		114
9.	DI. Panca Karsa I		40
10.	DI. Pamca karsa II		15
11.	DI. Sari Murni		55
12.	DI. Taluditi		403

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, 2016

Luas Daerah Irigasi potensial yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah 23.600,80 Ha di antaranya 17.131 Ha merupakan lahan fungsional. Kondisi jaringan irigasi saat ini cukup memprihatinkan akibatnya kinerja tingkat pelayanan irigasi menurun. Lahan irigasi yang ada di Provinsi Gorontalo mengalami alih fungsi, disisi lain perlu perluasan layanan jaringan irigasi guna menunjang stok pangan nasional.

Disamping itu, dalam rangka meningkatnya infrastruktur pengendalian daya rusak air, maka selama 2012-2016 penanganan pengaman badan sungai dan tebing mencapai 11.322,18 meter. Sementara panjang penanganan bangunan pengaman pantai sepanjang 1.058 meter.

3. Sanitasi dan Air Minum

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersih untuk perkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersediaan air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telah dilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu :

1. Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
2. PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
3. DAK Air Minum dan sanitasi

Tabel 2.77

Data Akses Air Bersih, Bangunan Penyediaan Sanitasi Dan Jumlah KK Yang Terlayani Sistem Jaringan Dan Pengelolaan Air Limbah Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah SR Yang Terlayani Akses Air Bersih Melalui Fasilitasi dan Sistem Penyediaan Air Bersih Dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	SR	5.265.00	379.00	8.370.00	2.648.00	5.816.00
2.	Jumlah Bangunan Penyediaan Sanitasi Yang Terbangun	Unit	149.00	52.00	64.00	28.00	55.00
3.	Jumlah KK Yang Terlayani Melalui Penyediaan system Jaringan dan Pengelolaan Air Limbah (KK)	Kawasan	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2016

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih, sudah cukup baik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Berikut adalah cakupan akses air minum.

Tabel2.78

Data Cakupan Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 – 2016

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Akses Air Minum Layak	Persen (%)	54,62	56,80	63,30	66,47	71,59
2.	Akses Sanitasi Layak	Persen (%)	47,96	50,25	54,07	54,96	59,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Sumber air minum masyarakat yang berasal dari PAM selama tahun 2012-2016 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,3%. Sementara sumber air minum yang berasal dari mata air dan sumber dari tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan seperti yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel2.79

Jumlah Sumber Air Minum
Di Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2016

No	Sumber air minum	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mata air	Buah	10,934	3,072	3,304	1,538	1,538
2.	PAM / Air dalam kemasan	Buah	6.860	28,470	31,007	51,675	51,675
3.	Pompa Listrik / tangan	Buah	8,749	10,365	10,553	14,874	14,874
4.	Sumur	Buah	86,732	72,620	68,101	66,000	66,000

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa total jumlah pelanggan PDAM sebanyak 65.096 pelanggan, Sementara total air yang disalurkan tahun 2016 mencapai 13.518.379 m³, mengalami peningkatan 11 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.80

Jumlah Pelanggan, Volume Dan Nilai Air Yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2016

No	Kabupaten/kota	2015		2016	
		Pelanggan	Air disalurkan (M ³)	Pelanggan	Air disalurkan (M ³)
1.	Boalemo	4.970	732.023	7.791	1.108.913
2.	Gorontalo	10.255	2.079.998	10.263	2.785.647
3.	Pohuwato	11.820	2.079.998	13.658	1.709.571
4.	Bone Bolango	9.742	751.799	5.361	845.628
5.	Gorontalo Utara	5.539	596.966	6.761	530.496
6.	Kota Gorontalo	20.772	6.456.067	21.262	6.538.124
	Provinsi Gorontalo	63.098	12.233.041	65.096	13.518.379

Sumber : PDAM Gorontalo, 2016

Dari total 65.096 jumlah pelanggan air bersih, 91,6 persen pelanggan berasal dari konsumsi rumah tangga, sementara 8,40 persen berasal dari instansi, niaga, social, industri dan pelanggan khusus.

Tabel 2.81

Jumlah Pelanggan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota Dan Kategori Pelanggan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Kabupaten/kota	Sosial	Rumah tangga	Instansi	Niaga	Industri	Khusus	Jumlah
1.	Boalemo	150	7.383	131	114	8	5	7.791
2.	Gorontalo	541	9.325	157	239	-	1	10.263
3.	Pohuwato	461	12.925	173	87	4	8	13.658
4.	Bone Bolango	100	5.141	63	41	-	-	5.361
5.	Gorontalo Utara	155	6.510	67	8	17	4	6.761
6.	Kota Gorontalo	939	18.335	264	1.722	-	2	21.262
	Provinsi Gorontalo	2.346	59.619	855	2.217	29	20	65.096

Sumber : PDAM Gorontalo, 2016

4. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan. Jumlah tempat ibadah di Provinsi Gorontalo sebanding dengan dengan jumlah pemeluk agama, yang diukur berdasarkan rasio perbandingan antara jumlah tempat peribadatan dan jumlah pemeluk agama.

Tabel 2.82
Rasio Tempat Ibadah Provinsi Gorontalo
Tahun 2013 sd 2016

NO	Bangunan tempat ibadah	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1.	Mesjid	2.175	1.053.388	0.21	2.171	1.063.074	0.20	2.175	1.087.742	0.20	2540	1.114.170	0.23
2.	Gereja Protestan	129	19.337	0.67	129	23.168	0.56	133	19.970	0.67	145	23.130	0.63
3.	Gereja Katolik	22	2.377	0.94	22	7.796	0.28	33	2.454	1.34	12	7.940	0.15
4.	Pura	24	4.213	0.57	24	3074	0.78	32	4.351	0.74	34	4.373	0.78
5.	Vihara	3	864	0.35	3	988	0.30	4	893	0.45	4	1.036	0.38
	Jumlah	2.353	1.080.287		2.349	1.097.990		2.377	1.115.633		2.735	1.150.765	

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tahun 2016

Penataan Ruang

Penataan ruang menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang atau dengan kata lain proses perencanaan kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk spasial yang ditindaklanjuti dengan arahan dan rumusan program dan rencana pembangunan. Adapun tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dalam perwujudan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Majudan Mandiri. Sehingga untuk mengantisipasi pembangunan Gorontalo kedepan, perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi syarat mutlak dalam penyusunan setiap kegiatan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan, fisik, dan RTRW seluruh kabupaten dan kota, serta RTRW Nasional dan pulau Sulawesi.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Tahun 2017 RTRW Provinsi Gorontalo dilakukan revisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan

bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 % pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi.

Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Idealnya Ruang terbuka hijau 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Tabel 2.83

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	521,7	521,7	521,7	521,7	521,7
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB*	2.013,47	2.018,50	2.023,54	2.028,61	2.033,68
3.	Luas wilayah (Ha)	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,259	0,258	0,257	0,257	0,256

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2016

Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Idealnya Ruang terbuka hijau 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan angka yang stabil di kisaran 0,256-0,259. Walaupun demikian, rasio ini menurun dari waktu ke waktu, dengan luas ruang terbuka hijau yang terbilang tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, luas wilayah ber HPL/HGB sebaliknya bertambah dari tahun 2012-2016 dikarenakan maraknya pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hal inilah yang menyebabkan angka rasio ruang terbuka hijau per luas wilayah ber HPL/HGB menurun.

Adapun untuk rasio ruang terbuka hijau per luas wilayah ber HPL/HGB untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.84

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Kabupaten Gorontalo	214.348	350,39	98,87	0,28
2.	Kabupaten Boalemo	173.661	428,09	102,63	0,23
3.	Kabupaten Pohuwato	445.560	411,73	168	0,41
4.	Kabupaten Bone Bolango	189.149	230,71	140,54	0,61
5.	Kabupaten Gorontalo Utara	214.186	465,76	8	0,02
6.	Kota Gorontalo	6.596	147	3,66	0,02
	Jumlah	1.243.500	2.033,68	521,7	0,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2016

7. Luas wilayah produktif

Tabel 2.85

Rasio luas Wilayah Produktif Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Wilayah produktif*	319.808,88	318.211,84	317.416,31	316.622,76	315.831,21
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	798.474,41	798.474,41	798.474,41	798.474,41	798.474,41
3.	Rasio (1./2.)	0,399	0,398	0,397	0,396	0,395

*Kawasan pertanian dan perkebunan

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo

Rasio luas wilayah produktif per luas seluruh wilayah budidaya di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan *trend* yang menurun. Pada tahun 2016, rasio luas wilayah produktif per luas seluruh wilayah budidaya di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 0,395 atau 39,5%. Adapun untuk wilayah produktif yang dimaksud disini adalah kawasan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan produk pangan. Pada kurun waktu 5 tahun ini, luas kawasan budidaya stabil (mengacu pada periode RTRW) sedangkan untuk luas wilayah produktif menurun dari tahun ke tahun (dikarenakan adanya konversi lahan).

Tabel 2.86
Persentase Luas Wilayah Produktif
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2016

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kab. Gorontalo	91.518,84	175.284,24	0,52
2.	Kab. Boalemo	70.533,23	142.856,57	0,49
3.	Kab. Pohuwato	58.269,03	258.037,68	0,22
4.	Kab. Bone Bolango	43.891,21	70.831,94	0,61
5.	Kab. Gorontalo Utara	49.595,67	147.077,21	0,33
6.	Kota Gorontalo	2.023,23	4.386,77	0,46
	Jumlah	315.831,21	798.474,41	0,39

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rasio Rumah Layak Huni

Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Gorontalo sampai dengan 2017 sebanyak 5.525 unit, terrealisasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 3.897 unit. Tahun 2017 ditargetkan 700 unit rumah layak huni yang akan dibangun yang tersebar seluruh kabupaten/kota.

Tabel 2.87
Rumah Layak Huni (Mahyani) yang dibangun
Selang tahun 2012 s/d 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Mahyani yang dibangun	525 Unit	1.000 Unit	800 Unit	711 Unit	861 Unit

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PDT Provinsi Gorontalo, 2016

Disamping pembangunan rumah layak huni yang dialokasikan melalui anggaran APBD, Provinsi Gorontalo juga mendapat support anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun Rumah Layak Huni bagi nelayan. Sejumlah rumah khusus nelayan tersebut, dibangun di tiga lokasi, yaitu sebanyak 75 unit dengan anggaran Rp11 miliar di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto. Kedua, sebanyak 50 unit dengan anggaran Rp7,9 miliar di Kelurahan Buhu, Kecamatan Telaya Jaya. Kemudian di desa Tabumela, sebanyak 75 unit dengan anggaran Rp10,9 miliar. Untuk Tahun 2016 telah diresmikan 75 dari 200 rumah khusus nelayan yang dibangun. Peresmian dilakukan di Kelurahan kayubulan, Kabupaten Gorontalo.

Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tenaga listrik merupakan sumber energy yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kegiatan rumah tangga, industry, komersial dan kebutuhan public lainnya. Tahun 2015 total kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 358,51 GWH, dengan kebutuhan tertinggi adalah untuk kebutuhan rumah tangga sebesar 75,23%, kebutuhan komersial sebesar 16,21 %, kebutuhan public sebesar 5,07% dan untuk kebutuhan industry sebesar 4,92%. Untuk daya terpasang saat ini sebesar 85,60MW, daya mampu 60 MW dan beban puncak 90 MW, sementara beban pemakaian listrik sebesar 67,8, dengan beban puncak sampai dengan 85MW. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya masih terdapat kekurangan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo, sehingga masih sering terjadi pemadaman di beberapa titik. Untuk itu Pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah pusat terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Anggrek yang direncanakan akan beroperasi tahun 2017.

Tabel 2.88

Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik
Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kebutuhan	GWH					
	- rumah tangga	GWH	205.95	214.76	246.43	269.82	199.89
	-Komersial	GWH	44.11	46.40	52.45	58.13	45.65
	- Public	GWH	16.44	15.64	17.20	18.20	13.15
	- Industri	GWH	19.63	17.60	17.34	17.65	12.29
2.	Susut & Losses (T&D)	%	8.9	7.54	13.59	12.36	12.52
3.	Susut Pemakaian Sendiri	%	0	0	0	0	0
4.	Total Susut & Losses	%	8.9	7.54	13.59	12.36	12.52
5.	Faktor Beban	MW	68.1	67.2	68.7	67.8	70.1
6.	Produksi	GWH	333.39	384.38	424.56	453.57	336.16
7.	Beban Puncak	MW	54	62.7	73.4	85	63.8
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW	153.5	181.5	192.8	221.3	247.1
9.	Cummulated Committed Projects	MW					
10.	TOTAL KAPASITAS SISTEM	MW	76.27	82.44	79.27	80.11	90.95
11.	DAYA YANG DIBUTUHKAN*	MW	48.48	71.78	59.27	65.70	66.99

Sumber : Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi 2016

Tabel 2.89
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Provinsi Gorontalo

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016 (agustus)
1.	RT dengan daya 450 watt	77.387	92.474	104.840	114.257	130.922
2.	RT dengan daya 900 watt	48.754	55.205	60.885	67.287	68.528
3.	RT dengan daya 1.300 watt	9.864	14.524	14.419	16.645	20.475
4.	RT dengan daya 2.200 watt	2.841	4.067	4.253	4.523	4.704
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	744	1.278	1.422	1.521	1.651
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	139.590	167.548	185.819	204.233	226.280
7.	Jumlah Rumah Tangga	259.798	260.655	273.288	280.885	Data BPS belum rilis
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	54%	64%	68%	73%	Data BPS belum rilis

Sumber : Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi 2016

Selang tahun 2012 sampai dengan 2015, Pemerintah Provinsi memberikan subsidi untuk pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga miskin mencapai 31.569 RTM, atau rata-rata sebesar 7.892 RTM pertahunnya. Jumlah subsidi pemasangan jaringan listrik kepada RTM tersebut mencapai 15,26 persen dari 206.843 jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo yang tercatat tahun 2015. Dari catatan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 subsidi pemasangan listrik bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 3.483 RTM, Tahun 2013 berjumlah 4.162 RTM, Tahun 2014 sejumlah 7.624 RTM, dan pada tahun 2015 sejumlah 16.300 RTM.

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menjaga memelihara keamanan dan ketertiban umum, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat sangat berperan dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah, sebagaimana Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu:

- Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

- Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Tabel 2.90

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas Tahun 2012 sd 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah polisi pamong praja	124	124	125	153	192
2.	Jumlah penduduk	1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,14	1,13	1,12	1,35	1.67

Sumber : Kantor Satpol PP dan Linmas Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.91

Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sd 2016

N o	Kabupaten/ Kota	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)
1.	Kab. Gorontalo	80	368.053	2.17	194	365.781	5.30	168	368.149	4.56	180	370.441	4.86	142	372.856	3.81
2.	Kab. Boalemo	168	136.269	12.33	149	141.547	10.53	132	145.580	9.07	156	149.832	10.41	156	154.008	10.13
3.	Kab. Pohuwato	168	135.338	12.41	163	139.675	11.67	168	143.338	11.72	172	146.896	11.71	198	150.385	13.17
4.	Kab. Bone Bolango	111	147.692	7.52	106	148.971	7.12	108	151.094	7.15	108	153.166	7.05	113	155.238	7.28
5.	Kab. Gorontalo Utara	-	108.079	-	-	108.324	-	103	109.502	9.41	133	110.700	12.01	124	111.824	11.09
6.	Kota Gorontalo	291	188.761	15.42	262	193.692	13.53	271	197.970	13.69	290	202.202	14.34	278	206.454	13.47
	Total Keseluruhan	774	1.084.192	7.14	998	1.097.990	9.09	1.115	1.115.633	9.99	1.192	1.133.237	10.52	1.203	1.150.765	10.45

Sumber : Kantor Satpol PP dan Linmas Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.1.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Perubahan yang terjadi pada satu sektor pembangunan akan berpengaruh dan berdampak terhadap perkembangan disektor kesejahteraan sosial.

Dalam kaitan inilah pemerintah menyadari betapa perlunya pembangunan kesejahteraan sosial, dimana fungsi pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan agar berbagai masalah seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan/ketertinggalan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Hal ini dipandang sebagai bagian dari investasi sosial untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.

Tabel. 2.92

Jumlah PMKS Penerima Bantuan di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	19.472	22.175	25.825	75.258	171.391
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	234.625	231.922	222.971	222.971	222.971
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	8.3	9.6	11.6	33.7	76,9

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo, 2016

Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)

Sarana dan Prasarana penunjang dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sangat dibutuhkan untuk pengembangan, pemulihan, serta bimbingan sebagai upaya untuk memberikan manfaat sehingga para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat mandiri dalam menjalankan fungsi sosial di kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.93

Jumlah Panti Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Panti Anak	30	35	37	44	44
2	Jumlah Panti Werdha	2	2	2	2	2
3	Jumlah Panti Disabilitas	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo, 2016

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua unsur pemerintahan, hal ini dilakukan agar dampak dari permasalahan sosial tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap urusan pemerintahan yang lain, upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial tersebut ditangani dengan cara pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, pembinaan, dan perlindungan sosial dengan tujuan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat hidup sesuai dengan fungsi sosial yang normal.

Tabel 2.94

Jumlah PMKS Yang Tertangani di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS yang tertangani	15.369	18.235	19.860	56.118	133.685
2	Jumlah PMKS yang ada	234.625	231.922	222.971	222.971	222.971
3	Persentase Penanganan PMKS	6.5	7.9	8.9	25.2	60,00

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo, 2016

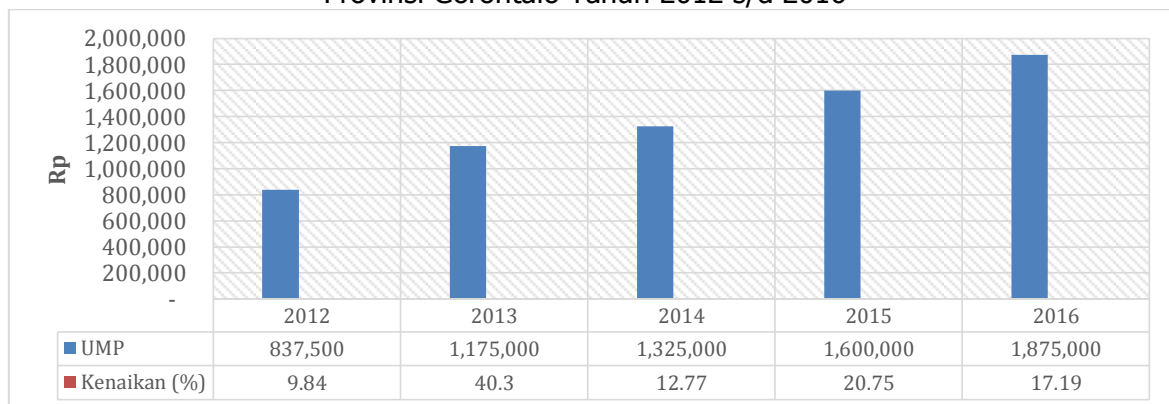
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Upah Minimum Provinsi

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti Asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Provinsi Gorontalo. Pada Tahun 2012 UMP Provinsi Gorontalo sebesar Rp.837.500,- yang meningkat menjadi Rp.1.875.000,- pada Tahun 2016, atau meningkat 22,75% pertahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.48
Perkembangan UMP dan KHM / KHL
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh lembaga pemerintah baik nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan program pembangunan. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan politik.

Perempuan telah memiliki peranan penting dilembaga pemerintahan maupun swasta di Provinsi Gorontalo. Eksistensi perempuan pada lembaga pemerintah provinsi misalnya, untuk jumlah pegawai perempuan yang memegang jabatan strategis eselon IV sampai eselon I sejumlah 256 orang, atau sebesar 38,61 persen dari jumlah pegawai yang memiliki jabatan. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Eksistensi Perempuan pada Lembaga Pemerintah Provinsi tahun 2016

No	Jenis kelamin	Eselon				Jumlah Eselon	Non Eselon	Total
		I	II	III	IV			
1	Laki-Laki	-	25	113	269	407	1.239	1.646
2	Perempuan	1	3	52	200	256	1.229	1.485
	Total	1	25	165	469	663	2.428	3.131

Sumber : Badan Kepegawaian Prov. Gorontalo, 2016

Menurut jenis kelamin penduduk di Provinsi Gorontalo terdiri dari laki-laki berjumlah 576.482 orang sedangkan perempuan berjumlah 574.283 orang dengan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 100,38 atau masih terbilang berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terindikasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotipe, kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan bias gender. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih perlu mendapat perhatian.

Di bidang pendidikan, perempuan Provinsi Gorontalo telah mengimbangi laki-laki, hal ini dapat dilihat dari rasio Angka Partisipasi Sekolah perempuan terhadap laki-laki di Provinsi Gorontalo pada tahun 2016. Dimana angka partisipasi sekolah perempuan sebesar 73,33%, sementara laki-laki sebesar 70,18%. Angka ini menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Di bidang ketenagakerjaan, ketimpangan gender juga masih terjadi. Tercatat jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah sebesar 332.847 laki-laki dan 213.821 perempuan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 82,91 laki-laki dan 53,12 perempuan serta tingkat pengangguran 2,20 laki-laki dan 3,62 perempuan. Namun di sisi lain Jumlah Pencari Kerja penduduk 15 tahun ke atas untuk laki-laki sebesar 10.833 orang sedangkan perempuan sebesar 15.093 orang. Dari sini terlihat masih ada kesenjangan kesempatan kerja terhadap perempuan dibandingkan terhadap laki-laki.

Sementara partisipasi politik perempuan di Provinsi Gorontalo berjumlah 42 orang atau 19,4% dari jumlah anggota Dewan secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.96

Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga
DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2014-2019

No.	Prov, Kab/Kota	Jumlah Perempuan	Jumlah Anggota Dewan	Persentase Partisipasi Perempuan(%)
1.	Prov. Gorontalo	45	13	29
2.	Kota Gorontalo	25	6	24
3.	Kab. Gorontalo	35	8	23
4.	Kab. Boalemo	25	5	20
5.	Kab. Pohuwato	25	5	20
6.	Kab. Bone Bolango	23	1	4
7.	Kab. Gorontalo Utara	25	4	16
	Total	203	42	19,4

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo, 2016

Disamping itu, peran pemerintah dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melaksanakan berbagai program kegiatan baik sifatnya preventif maupun kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan. Pemerintah Provinsi juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban tindak kekerasan yang dilaksanakan sebagai upaya kuratif.

Data Polda Gorontalo menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Selama tahun 2014-2016, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 898 kasus. Dari tabel dibawah menunjukkan bahwa tahun 2016, jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak sebesar 235 kasus, mengalami penurunan 35 persen dibanding tahun 2014.

Tabel 2.97

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, tahun 2014-2016

No	Jenis Tindak Pidana	2014	2015	2016
1	Kejahatan thdp kesusilaan	35	20	5
2	KDRT	116	116	63
3	Kejahatan terhadap anak	174	153	146
4	Penganiayaan	38	75	21
	Total	363	364	235

Sumber : Data Kepolisian Daerah Gorontalo, 2016

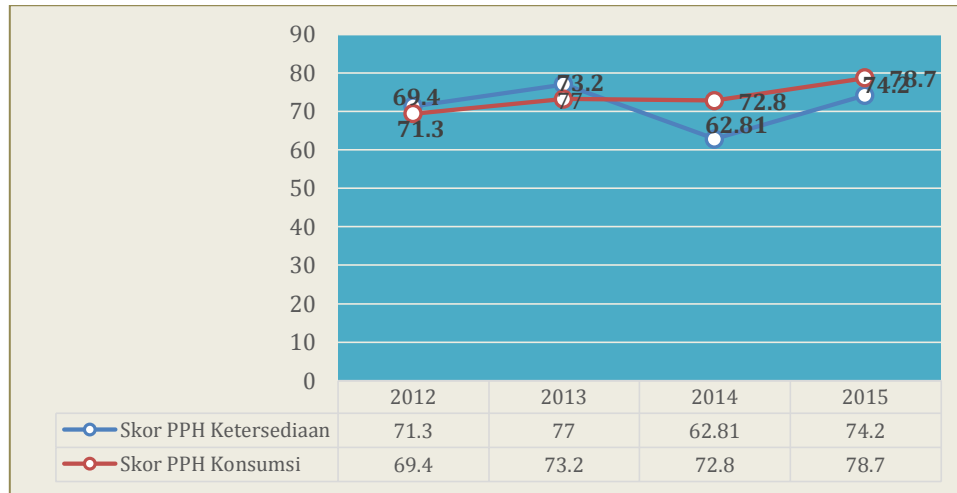
Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus *Human Trafficking* adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Disamping itu Tahun 2016, Provinsi Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan; b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi : perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan b. perlindungan khusus anak.

2.4.2.3 Urusan Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH tinggi, maka ketersediaan dan konsumsinya semakin beragam. PPH ketersediaan di Gorontalo, mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi ini diakibatkan oleh tidak dinamisnya peningkatan produksi. PPH ideal yang diharapkan pada tahun 2020 adalah 100, sedangkan PPH aktualnya berkisar antara 62.81-77. Untuk kondisi tahun 2015, PPH Ketersediaan mencapai 74,2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 62,81.

Sementara Performance PPH konsumsi yang menggambarkan keberagaman tingkat konsumsi masyarakat selang 2012-2016 belum mencapai sasaran sampai pada angka 80,9. Ketidakberagaman ini disebabkan oleh dominannya tingkat konsumsi kelompok pangan padi-padian khususnya beras dan masih rendahnya konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Oleh karena itu telah dilakukan upaya penganeekaragaman pola konsumsi pangan melalui program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kampanye “**One day no rice**”. Namun demikian, Skor PPH Konsumsi selama selang tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2015 mencapai 78.7, atau meningkat sebesar 13,4% dari skor PPH tahun 2012.

Gambar 2.49
Perkembangan dan Sasaran PPH Ketersediaan
Provinsi Gorontalo tahun 2012-2015



Sumber Data : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2016

Hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang diolah berdasarkan data ketersediaan produksi pangan pokok (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) menunjukkan, bahwa wilayah Provinsi Gorontalo secara total berada pada status aman, kecuali wilayah Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan karena lahan produktif sangat sedikit jumlahnya dan pertambahan penduduk yang meningkat secara signifikan sehingga menjadikan wilayah Kota Gorontalo sebagai wilayah Rawan pangan secara Kualitatif. Selain itu, wilayah (desa, kecamatan, kabupaten) menjadi rawan pangan apabila terbatasnya sumberdaya pertanian, jumlah penduduk dan pertumbuhannya yang tinggi serta aksesibilitas pangan yang sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

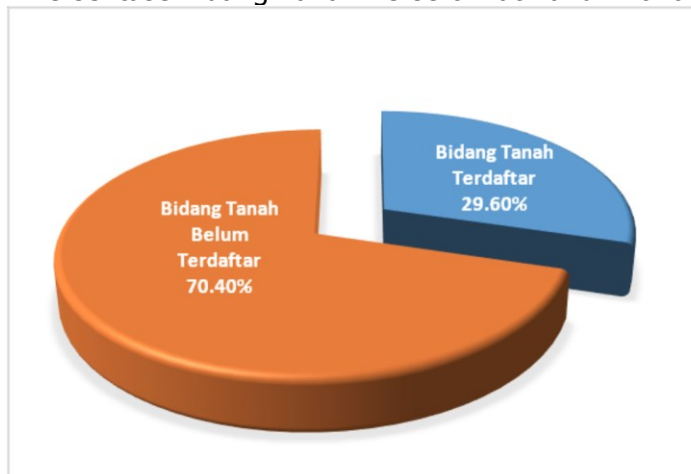
Kestabilan distribusi pangan di Gorontalo terus terkendali, walaupun pada kondisi-kondisi tertentu misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan musim paceklik sering terjadi lonjakan harga pangan pokok yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah yang terkait dengan stabilitasi harga, antara lain melalui kegiatan program penguatan lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan, dan pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan.

Menjadi skala prioritas selain ketahanan pangan adalah keamanan pangan (*food and bio security*) juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir ini keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Di seluruh dunia kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Pangan semakin penting dan vital peranannya dalam perdagangan dunia. Berkaitan dengan keamanan pangan sampai saat ini belum ada sinergitas yang mantap antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga internasional, regional, sub regional, dan antar daerah guna memperkuat ketahanan pangan serta masih terbatasnya pusat-pusat riset untuk mendukung *food and bio-security*.

2.4.2.4 Urusan Pertanahan

Penataan pembangunan pertanahan dilaksanakan untuk menjamin kepastian hak atas tanah dan menjamin keamanan melaksanakan investasi. Untuk menjamin kepastian hak atas tanah, maka setiap pemilik lahan wajib melaksanakan sertifikat tanah. Dari total luas bidang tanah keseluruhan sebesar 703.143 bidang tanah, yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2016 sebanyak 208.108 bidang tanah atau 29,60 persen. Sedangkan yang belum terdaftar/belum bersertifikat sejumlah 493.035 bidang tanah atau sebesar 70,40%. Sementara dari kasus-kasus tanah di Provinsi Gorontalo, yang sudah diselesaikan sebanyak 153 kasus.

Gambar 2.50
Persentase Bidang Tanah Bersertifikat Tahun 2016



Sumber : Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.2.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan terutama aspek koordinasinya untuk meningkatkan penduduk melaksanakan kewajiban pemilikan KTP, Akte Kelahiran dan Akta Nikah yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya, serta memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Tabel 2.98
Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Gorontalo tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA (KK)				KELUARGA	
	SUDAH CETAK KK		BELUM CETAK KK			
	n(Klrg)	(%)	n(Klrg)	(%)	n(Klrg)	(%)
KAB. GORONTALO	84,913	25,10	30,735	9,08	115,648	34,18
KAB. BOALEMO	29,739	8,79	12,924	3,82	42,663	12,61
KAB. BONE BOLANGO	33,685	9,96	11,590	3,43	45,275	13,38
KAB. POHUWATO	30,193	8,92	11,421	3,38	41,614	12,30
KAB. GORONTALO UTARA	27,011	7,98	6,923	2,05	33,934	10,03
KOTA GORONTALO	43,190	12,76	14,409	4,26	57,600	17,02
JUMLAH	248,731	73.87	88,002	26.13	336,734	100

Sumber : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Tabel 2.99
Kepemilikan KTP Provinsi Gorontalo Tahun 2017

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTP-EL						WAJIB KTP-EL			PERSEN
	ADA KTP-EL			BELUM KTP-EL						
	LK	PR	%	LK	PR	%	LK	PR	JUMLAH	%
	n(KTP)	n(KTP)		%	n(KTP)		n(KTP)	n(KTP)		
KAB. GORONTALO	120,646	124,738	30	19,102	15,179	4.19	139,748	139,917	279,665	34.22
KAB. BOALEMO	43,157	42,818	10.5	8,139	6,719	1.82	51,296	49,537	100,833	12.34
KAB. BONE BOLANGO	49,059	50,629	12.2	7,544	5,993	1.66	56,603	56,622	113,225	13.85
KAB. POHUWATO	45,601	45,086	11.1	4,514	3,735	1.01	50,115	48,821	98,936	12.11
KAB. GORONTALO UTARA	37,002	36,772	9.03	7,055	5,603	1.55	44,057	42,375	86,432	10.58
KOTA GORONTALO	57,962	62,312	14.7	9,782	8,118	2.19	67,744	70,430	138,174	16.91
JUMLAH	353,427	362,355	87.58	56,136	45,347	12.42	409,563	407,702	817,265	100

Sumber : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Tabel 2.100
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN						JUMLAH PENDUDUK	% KEPEMILIK AN
	ADA			BELUM				
	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH		
KAB. GORONTALO	66,760	66,530	133,290	129,586	127,458	257,044	390,334	34.15
KAB. BOALEMO	27,460	25,857	53,317	45,421	43,875	89,296	142,613	37.39
KAB. BONE BOLANGO	25,788	25,350	51,138	54,618	53,843	108,461	159,599	32.04
KAB. POHUWATO	28,286	26,599	54,885	43,210	42,570	85,780	140,665	39.02
KAB. GORONTALO UTARA	20,835	20,715	41,550	42,237	39,837	82,074	123,624	33.61
KOTA GORONTALO	37,929	36,778	74,707	59,094	61,015	120,109	194,816	38.35
JUMLAH	207,058	201,829	408,887	374,166	368,598	742,764	1,151,651	35.50

Sumber : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Tabel 2.101
Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN						PENDUDUK STATUS			% KEPEMILIKAN
	ADA			BELUM			KAWIN			
	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
	n	n	N	n	n	N	N	n	N	
KAB. GORONTALO	58,459	58,894	117,353	34,582	38,341	72,923	93,041	97,235	190,276	61.68
KAB. BOALEMO	2,210	1,910	4,120	33,001	34,338	67,339	35,211	36,248	71,459	5.77
KAB. BONE BOLANGO	9,188	11,535	20,723	28,177	26,499	54,676	37,365	38,034	75,399	27.48
KAB. POHUWATO	14,251	13,757	28,008	19,975	21,714	41,689	34,226	35,471	69,697	40.19
KAB. GORONTALO UTARA	10,522	8,710	19,232	18,924	21,973	40,897	29,446	30,683	60,129	31.98
KOTA GORONTALO	11,455	12,015	23,470	31,966	33,539	65,505	43,421	45,554	88,975	26.38
JUMLAH	106,085	106,821	212,906	166,625	176,404	343,029	272,710	283,225	555,935	38.30

Sumber : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

2.4.2.6 Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo merupakan salah satu isu yang sangat penting sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk. Hal yang sering sulit untuk dijawab adalah apakah kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo berada dalam kondisi baik, sedang, atau buruk.

Masalah lingkungan yang dihadapi pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya akan berdampak terhadap kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.

Indeks Kualitas Lingkungan

Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. IKLH dapat menentukan derajat permasalahan lingkungan dan sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. IKLH disusun menggunakan kualitas air sungai, kualitas air udara, dan tutupan hutan sebagai indikator.. Parameter dari setiap perhitungan IKLH sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.102
Parameter Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1	Kualitas Udara	SO ₂ NO ₂	30%	
2	Kualitas Air Sungai	TSS DO BOD COD Total Fosfat Fecal Coli Total Coliform	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
3	Tutupan Hutan	Luas Lahan	40%	

Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo, 2017

Berikut ini klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka indeks lingkungan hidup:

Tabel 2.103
Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo 2017

Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.104
IKLH Provinsi Gorontalo Tahun Data 2011-2016

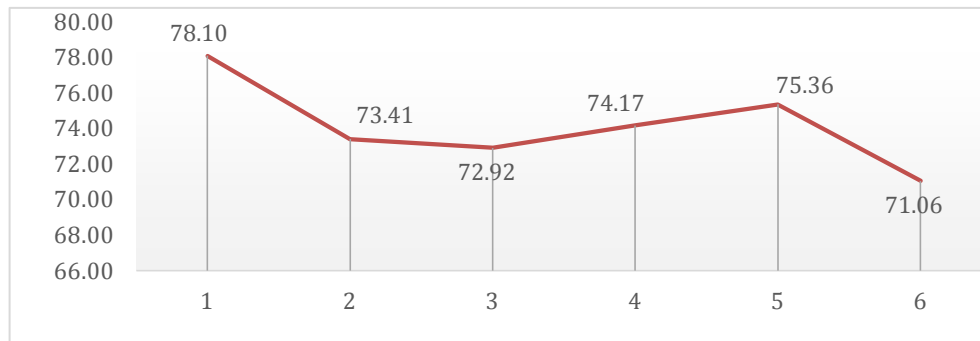
Tahun	Indeks Udara	Indeks Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
2016	98,82	37,40	75,50	71,06
2015	96,79	53,40	75,76	75,36
2014	96,20	48,49	76,91	74,17
2013	90,24	50,00	77,11	72,92
2012	89,17	52,19	77,50	73,41
2011	95,06	53,50	83,83	78,10

Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo 2017

Berdasarkan hasil perhitungan IKLH selama 6 (enam) tahun dari tahun 2011 – 2016 sebagaimana tabel di atas dapat diartikan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo dari baik menjadi cukup. Secara rinci khusus untuk indeks kualitas air terjadi penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun dari kategori sangat kurang menjadi waspada dalam 6 (enam) tahun terakhir.

Gambar 2.51

Trend Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo 2011-2016



Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo 2017

Pencemaran Air Permukaan

Air sebagai sumberdaya alam yang amat penting nilainya bagi kehidupan manusia, hendaknya harus dimanfaatkan secara hemat tanpa merusak tata lingkungan hidup manusia. Sebagai sumberdaya alam, air di muka bumi berbeda-beda menurut ruang dan waktu. Banyak daerah-daerah yang mempunyai potensi air yang cukup, tetapi tidak jarang dijumpai daerah-daerah yang mempunyai potensi air yang sangat kecil, bahkan pada waktu-waktu tertentu mengalami kekurangan air. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumberdaya air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dampak negatif ini dapat dilihat antara lain dari segi pemanfaatan air. Pemanfaatan air yang seharusnya dilakukan secara hemat tanpa mengganggu atau merusak lingkungan hidup manusia masih belum dilaksanakan dengan baik. Walaupun pemanfaatan air dilakukan secara hemat, tetapi bila jumlah penduduk yang menggunakan air tersebut terlalu besar sehingga melampaui kemampuan sumberdaya air yang tersedia, tentu akan memberikan dampak negatif terhadap sumberdaya air itu sendiri.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air beberapa sungai strategis di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa status mutu air sungai berada pada kondisi **Cemar Ringan** sampai **Cemar Sedang**, seperti:

Tabel 2.105
Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo
Hasil Pemantauan Tahun 2016

No	Nama Sungai	Status Mutu Air Sungai			Parameter yang melebihi baku mutu
		Hulu	Tengah	Hilir	
1	Sungai Bone	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, E. Coli dan Total Coliorm
2	Sungai Paguyaman	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, COD, DO, TSS, E. Coli dan Total Coliform
3	Sungai Bionga	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, E. Coli dan Total Coliorm
4	Sungai Buladu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E. Coli dan Total Coliorm
5	Sungai Taluduyunu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E. Coli dan Total Coliorm

Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo, 2016

Kerusakan Danau Limboto

Danau Limboto adalah salah satu sumberdaya alam yang menjadi kebanggaan dan sumber mata pencaharian penduduk Gorontalo umumnya khususnya masyarakat sekitarnya. Danau Limboto terletak di bagian tengah Provinsi Gorontalo dan berada diantara dua wilayah Kabupaten yaitu Gorontalo dan Kota Gorontalo pada koordinat Bujur 122° 56'– 123° 01' BT dan Lintang 0° 34'– 0° 36' LU. Danau Limboto secara administrasi wilayah berbatasan dengan beberapa Keamatan, diantaranya Kecamatan Limboto, Batudaa, yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Telaga, Kota Gorontalo.

Danau Limboto merupakan danau tektonik berada di wilayah dataran dengan ketinggian 4,5 meter diatas permukaan laut dengan curah hujannya rata-rata 1.426 mm/tahun dan Danau Limboto merupakan laguna yang menjadi muara dari beberapa sungai-sungai di sekeliling danau dengan luas sekitar 3.625 hektar, dengan kedalaman rata-rata 2,5 meter.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Bakosurtanal pada tahun 2007 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 52 tahun luas Danau Limboto berkurang sekitar 4.304 Ha atau sekitar 62,60% dari total luas danau. Luas danau berkurang sekitar 65,89 Ha per tahun, sehingga pada tahun 2025 danau ini diperkirakan akan berubah menjadi daratan. Sumber air yang masuk ke Danau Limboto yaitu berasal dari air hujan dan dari aliran sungai Biyonga yang mengalir sepanjang tahun di sebelah utara Danau Limboto, juga berasal dari aliran sungai lainnya sebanyak kurang lebih 23 sungai yang tersebar di

sebelah Utara, Selatan dan Barat danau. Satu-satunya yang menjadi outlet danau Limboto adalah sungai Topudu, yang mengalir ke Teluk Tomini melalui sungai Bolango. Permasalahan yang terjadi didanau limboto adalah (1) pendangkalan dan penyusutan luas, (2) penurunan kualitas air danau, (3) perkembangan eceng gondok, (4) penurunan volume air, (5) penurunan produktivitas perikanan, (6) banjir, (7) perusakan hutan dan lahan, dan (8) perusakan hutan riparian.

Tabel 2.106
Status Mutu Air Danau Limboto dari Hasil Pemantauan
Tahun 2016

Kode Titik Sampling	Penjelasan Lokasi Titik Sampling	Nilai PiY	Status Mutu Air Danau Limboto
Titik 1	Bagian tepi Danau dekat Pemukiman Desa Iluta	3,317260	CEMAR RINGAN
Titik 2	Bagian tepi Danau dekat Pemukiman Desa Barakati	3,357230	CEMAR RINGAN
Titik 3	Bagian tepi Danau dekat Pemukiman	3,493001	CEMAR RINGAN
Titik 4	Bagian tengah Danau yang banyak ditumbuhi eceng gondok	3,170993	CEMAR RINGAN
Titik 5	Bagian tepi yang berdekatan dengan Outlet Sungai Alopohu	2,425178	CEMAR RINGAN
Titik 6	Bagian tepi yang dipenuhi Karamba Jaring Apung	3,190663	CEMAR RINGAN
Titik 7	Bagian tepi dekat lokasi wisata Pentadio Resort	3,150557	CEMAR RINGAN
Titik 8	Bagian Outlet Danau Limboto yaitu Tapodu	3,135659	CEMAR RINGAN
Titik 9	Bagian tepi dekat pendaratan Presiden Sukarno	3,083462	CEMAR RINGAN
Titik 10	Bagian tepi Danau dekat Pemukiman	2,162772	CEMAR RINGAN

Sumber: Hasil pemantauan kualitas air danau, 2016

Berdasarkan nilai tersebut diatas menunjukkan bahwa status mutu air Danau Limboto pada semua titik pemantauan adalah **CEMAR RINGAN**, dimana beberapa parameter sudah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, seperti Parameter TSS, P-PO₄, BOD₅, COD dan Total Coliform berdasarkan kriteria mutu air kelas II Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pencemaran Udara Ambien

Masalah pencemaran udara yaitu kualitas udara yang tidak dapat memenuhi kualitas udara yang dipersyaratkan. Dalam mencapai kualitas udara yang diinginkan, perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, salah satunya melalui pengukuran dan pemantauan terhadap kualitas udara.

Pemantauan kualitas udara pada Bulan Januari tahun 2016 menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Gorontalo tergolong baik karena masih berada di bawah baku mutu udara yang dipersyaratkan (Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional). Parameter yang diukur dalam pemantauan tersebut adalah lima parameter yaitu CO, NO₂, Ozon, SO₂, dan TSP. Secara umum, kualitas udara ambien di Provinsi Gorontalo masih memenuhi syarat karena semua parameter yang diukur masih dibawah baku mutu udara ambient nasional. Berikut adalah kualitas udara dimasing-masing Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo

Tabel 2.107

Kualitas Udara di Titik Pantau Kabupaten Pohuwato Tahun 2016

No.	Parameter	Baku Mutu	Titik Pantau		
			Kantor Bupati	Jl. Trans Sulawesi	Terminal Marisa
1.	CO	30.000 ug/m ³	2857	9142	4000
2.	NO ₂	400 ug/m ³	50,62	55,27	33,52
3.	O ₃	235 ug/m ³	52,1	52,2	26,1
4.	SO ₂	900 ug/m ³	<0,017	<0,017	<0,017
5.	TSP	230 ug/m ³	64	97	41

Sumber: BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.108

Kualitas Udara di Titik Pantau Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No.	Parameter	Baku Mutu	Titik Pantau		
			Kantor Bupati	Jl. Trans Desa Lamu	Pemukiman Mananggu
1.	CO	30.000 ug/m ³	3428	2857	2285
2.	NO ₂	400 ug/m ³	64,10	45,16	54,64
3.	O ₃	235 ug/m ³	26,1	57,2	26,1
4.	SO ₂	900 ug/m ³	<0,017	7,23	<0,017
5.	TSP	230 ug/m ³	49	59	62

Sumber: BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.109

Kualitas Udara di Titik Pantau Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

No	Parameter	Baku Mutu	Titik Pantau		
			Kantor Bupati	Jl. Kel. Tumbihe	Desa Bubeya
1.	CO	30.000 ug/m ³	6287	3428	2285
2.	NO ₂	400 ug/m ³	65,87	53,27	51,19
3.	O ₃	235 ug/m ³	28,5	26,1	26,1
4.	SO ₂	900 ug/m ³	<0,017	<0,017	<0,017
5.	TSP	230 ug/m ³	43	79	18

Sumber: BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.110**Kualitas Udara di Titik Pantau Kabupaten Gorontalo Tahun 2016**

No	Paramenter	Baku Mutu	Titik Pantau		
			Kantor BLH	Shopping Center	Jl. Raya Limboto
1.	CO	30.000 ug/m ³	2857	3428	4571
2.	NO ₂	400 ug/m ³	55,15	49,27	50,29
3.	O ₃	235 ug/m ³	26,1	52,2	57,1
4.	SO ₂	900 ug/m ³	<0,017	<0,017	<0,017
5.	TSP	230 ug/m ³	51	81	63

*Sumber: BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016***Tabel 2.111****Kualitas Udara di Titik Pantau Kabupaten Gorontalo Utara**

No.	Paramenter	Baku Mutu	Titik Pantau		
			Kantor BLH	Perum Molingkapoto	Jl. Trans Kwandang
1.	CO	30.000 ug/m ³	2285	2857	3428
2.	NO ₂	400 ug/m ³	83,51	56,62	54,62
3.	O ₃	235 ug/m ³	26,1	26,1	26,1
4.	SO ₂	900 ug/m ³	<0,017	<0,017	<0,017
5.	TSP	230 ug/m ³	43	28	99

*Sumber: BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016***Tabel 2.112****Kualitas Udara di Titik Pantau Kota Gorontalo**

No.	Paramenter	Baku Mutu	Titik Pantau			
			Kantor Balihristi	Permukiman Awara	Pasar Sentral	Terminal 1942
1.	CO	30.000 ug/m ³	1875	1875	3750	2857
2.	NO ₂	400 ug/m ³	20,67	52,74	41,91	59,45
3.	O ₃	235 ug/m ³	57,1	26,1	26,1	26,1
4.	SO ₂	900 ug/m ³	<0,017	<0,017	20,57	<0,017
5.	TSP	230 ug/m ³	68	62	79	77

*Sumber: BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016***Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI)**

Kegiatan pertambangan sangat potensial menimbulkan degradasi lingkungan hidup jika tidak dilakukan secara hati-hati. Kegiatan pertambangan emas di Provinsi Gorontalo tersebar di beberapa wilayah yaitu Wilayah Marisa Kabupaten Pohuwato, wilayah Pasolo Desa Buladu, Kecamatan Sumalata dan wilayah tambang Mopuya Desa Kaidundu, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, wilayah Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dan wilayah Boliohuto Kabupaten Boalemo. Permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan emas adalah pencemaran logam berat Hg pada badan air sungai. Kandungan merkuri pada air sungai tersebut kemudian akan mengalir menuju ke muara dan akhirnya akan masuk ke perairan laut. Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan DLHK tahun 2015 menunjukkan bahwa penambangan emas di Desa Buladu

dan Desa Kaidundu telah menyebabkan kandungan logam berat Hg (merkuri) pada badan air sungai Dubalango dan Sungai Mopuya telah melewati ambang batas baku mutu (0,001 mg/l). Kadar Hg pada badan air dan sedimen sungai dubalango (sungai sekitar penambangan pasolo) adalah masing-masing berkisar antara 0,0002 – 0,016038 mg/l dan 104,2172 – 927,2519 mg/l, sedang konsentrasi Hg pada badan air dan sedimen Sungai Mopuya (sungai sekitar penambangan Mopuya) adalah masing-masing berkisar antara 0,0002-0,2457 mg/l dan 22,7798 – 53,1579 mg/l.

Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan

Tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih rendah tetapi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan baru mencapai 52,27%. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan kualitas lingkungan seperti perubahan kualitas air permukaan, perubahan kualitas udara, dan pencemaran tanah.

Tabel. 2.113

Tingkat Ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan Hidup
Tahun 2012-2016

No	Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	30%	33%	35%	50,42%	52,27%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2017

Persampahan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam pembangunan, oleh karenanya perlu dikelola secara terpadu dan kompherensif. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah, dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan dan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan

pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah.

Tabel 2.114

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	Jumlah volume produksi sampah (ton)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kabupaten Gorontalo	324	1.353,48	4,18
2	Kabupaten Boalemo	41	407,76	9,95
3	Kabupaten Pohuwato	253	426,08	1,68
4	Kabupaten Bone Bolango	136	529,25	3,89
5	Kabupaten Gorontalo Utara	62	311,18	5,02
6	Kota Gorontalo	559	997,46	1,78
	Jumlah	1.375	3.425,21	2,49

Sumber : BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. LPM merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Salah satu tujuan LPM adalah menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Adapun jumlah LPM di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sebanyak 729 Lembaga, dengan jumlah LPM berprestasi sebanyak 9 lembaga yang berada di Kota Gorontalo.

Tabel 2.115
Jumlah LPM Berprestasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/ Kota	2012			2013			2014			2015			2016		
		JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BERPRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)
1	Kota Gorontalo	50	9	18	50	9	18	50	9	18	50	9	18	50	9	18
2	Gorontalo	205	-	-	205	-	-	205	-	-	205	-	-	205	-	-
3	Boalemo	82	-	-	82	-	-	82	-	-	82	-	-	82	-	-
4	Pohuwato	104	-	-	104	-	-	104	-	-	104	-	-	104	-	-
5	Bone	165	-	-	165	-	-	165	-	-	165	-	-	165	-	-
6	Gorontalo Utara	123	-	-	123	-	-	123	-	-	123	-	-	123	-	-
	JUMLAH	729	9	18	729	9	18	729	9	18	729	9	18	729	9	18

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Capil Prov. Gorontalo Tahun 2016

PKK Aktif

Pembinaan kesejahteraan Keluarga atau yang disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Persentase Jumlah PKK aktif dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata sebesar 100 persen tiap tahunnya, hal ini tentunya suatu prestasi yang membanggakan dikarenakan semua jumlah PKK yang ada merupakan PKK yang aktif.

Tabel 2.116
PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah h PKK	Jumlah PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah h PKK	Jumlah h PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah h PKK	Jumlah h PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah h PKK	Jumlah h PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah h PKK	Jumlah h PKK Aktif	PKK Aktif (%)
1	2	3	4	5 = 4/3x10	6	7	8=7/6x 100%	9	10	11=10/ 9x	12	13	14=13/12x 100%	15	16	17=16 /
1	Kota Gorontalo	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%
2	Gorontalo	225	225	100%	225	225	100%	225	225	100%	225	225	100%	225	225	100%
3	Boalemo	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%
4	Pohuwato	122	122	100%	122	122	100%	122	122	100%	122	122	100%	122	122	100%
5	Bone Bolango	184	184	100%	184	184	100%	184	184	100%	184	184	100%	184	184	100%
6	Gorontalo Utara	135	135	100%	135	135	100%	135	135	100%	135	135	100%	135	135	100%
	J U M L A H	816	816	100	816	816	100	816	816	100	816	816	100	816	816	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Capil Prov. Gorontalo Tahun 2016

Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Tabel 2.117
Kelompok Binaan PKK Tahun Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016

NO.	KABUPATEN / KOTA	2012			2013			2014			2015			2016		
		JUMLA H PKK	JUMLA H KLP. BINAA N	RATA- RATA JLH KLP. BINAA	JUMLA H PKK	JUMLA H KLP. BINAA N	RATA- RATA JLH KLP. BINAA	JUMLA H PKK	JUMLA H KLP. BINAA N	RATA- RATA JLH KLP. BINAAAN PKK	JUMLA H PKK	JUMLA H KLP. BINAA N	RATA- RATA JLH KLP. BINAA	JUMLA H PKK	JUMLA H KLP. BINAA N	RATA- RATA JLH KLP. BINAA
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1	Kota Gorontalo	60	2132	35,53	60	2233	37,22	60	2233	37,22	60	2219	37	60	2219	37
2	Gorontalo	225	6346	28,20	225	6346	28,20	225	6346	28,20	225	6346	28,20	225	6346	28,20
3	Boalemo	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	-
4	Pohuwato	122	2296	19	122	2296	19	122	2296	19	122	2296	19	122	2296	19
5	Bone Bolango	184	1650	9	184	1650	9	184	1650	9	184	1650	9	184	1650	9
6	Gorontalo Utara	135	-	-	135	-	-	135	-	-	135	-	-	135	-	-
	J U M L A H	816	12.424	15,23	816	12.525	15,35	816	12.525	15,35	816	12.511	15,33	816	12.511	15,33

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Gorontalo Tahun 2016

Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat untuk bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Tabel 2.118
Jumlah LSM
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LSM terdaftar	202	202	200	217	209
2.	Jumlah LSM tidak aktif	87	87	87	87	87
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	115	115	113	130	122

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, 2016

Posyandu Aktif

Persentase Jumlah Posyandu aktif dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata sebesar 100 persen tiap tahunnya, ini tentunya didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti kesehatan.

Tabel 2.119
Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

NO.	KAB/ KOTA	2012			2013			2014			2015			2016		
		Total os yandu	Jumla h Pos yandu Aktif	Pos yandu Aktif (%)	Total os yandu	Jumla h Pos yandu Aktif	Pos yandu Aktif (%)	Total os yandu	Jumlah Pos yandu Aktif	Pos yandu Aktif (%)	Total os yandu	Jumlah Pos yandu Aktif	Pos yandu Aktif (%)	Total os yandu	Jumlah Pos yandu Aktif	Pos yandu Aktif (%)
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$	6	7	$8=7/6 \times 100\%$	9	10	$11 = 10/9 \times 100\%$	12	13	$14=13/12 \times 100\%$	15	16	$17=16/15 \times 100\%$
1	Kota Gorontalo	131	131	100%	131	131	100%	131	131	100%	127	127	100%	127	127	100%
2	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Boalemo	157	157	100%	157	157	100%	157	157	100%	157	157	100%	157	157	100%
4	Pohuwato	153	153	100%	153	153	100%	153	153	100%	153	153	100%	153	153	100%
5	Bone Bolango	217	217	100%	206	206	100%	206	206	100%	206	206	100%	206	206	100%
6	Gorontalo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	658	658	100%	647	647	100%	647	647	100%	643	643	100%	643	643	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Capil Prov. Gorontalo Tahun 2016

2.4.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo periode 2015-2016 adalah sebesar 1,55 persen. Pada periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk terbesar disumbang oleh Kabupaten Boalemo (2,79%), dan diikuti oleh Kabupaten Pohuwato (2,38%). Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada kedua wilayah tersebut terutama karena kedua wilayah tersebut merupakan daerah tujuan transmigrasi. Sementara itu, pada periode yang sama, Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah, yaitu sebesar 0,65 persen. Sedangkan Kota Gorontalo yang merupakan wilayah terpadat penduduknya, memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,10 persen.

Tabel 2.120

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo (2015-2016)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan
	2015	2016	2015 – 2016
Kabupaten Gorontalo	370.441	372.856	0,65
Kabupaten Boalemo	149.832	154.008	2,79
Kabupaten Pohuwato	146.896	150.385	2,38
Kabupaten Bone Bolango	153.166	155.238	1,35
Kabupaten Gorontalo Utara	110.700	111.824	1,02
Kota Gorontalo	202.202	206.454	2,10
Provinsi Gorontalo	1.133.237	1.150.765	1,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Total Fertility Rate (TFR)

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita subur sampai dengan akhir masa reproduksinya (15-49) tahun. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relative sama dengan pencapaian Nasional yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu 2,6 anak per wanita.

2.4.2.9 Urusan Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu 2012-2016 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan 8,83% pertahunnya. Jika dihitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, maka tahun 2016 rasio ketersediaan sarana infrastruktur jalan terhadap kendaraan bermotor sebesar 0,014. Dari tabel dibawah ini menunjukkan adanya penurunan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016), panjang jalan di Provinsi Gorontalo cenderung tidak menunjukkan adanya peningkatan yang berarti, sementara jumlah kendaraan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Namun demikian, Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota terus meningkatkan kapasitas sarana infrastruktur jalan khususnya pada akses pelayanan dasar dan penunjang perekonomian. Selain pembukaan jalan baru, pembangunan infrastruktur jalan juga fokus pada revitalisasi dan pemeliharaan jalan.

Tabel 2.121

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Total Panjang Jalan	5.243,18	4.676,76	4.676,76	4.818,66	4.818,66
Jumlah Kendaraan	243.146	265.864	292.606	314.888	340.991
Rasio	0,021	0,017	0,015	0,015	0,014

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo; Kepolisian Daerah Gorontalo, 2016

Tabel 2.122

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
1.	Kab. Gorontalo	2.000,06	110.847	0,018
2.	Kab. Boalemo	887,14	24.343	0,036
3.	Kab. Pohuwato	786,04	31.446	0,025
4.	Kab. Bone Bolango	567,85	33.434	0,016
5.	Kab. Gorontalo Utara	229,12	48.385	0,004
6.	Kota Gorontalo	206,55	92.536	0,002
	Jumlah	4.818,66	340.991	0,014

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo; Kepolisian Daerah Gorontalo, 2016

Transportasi Udara

Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) Bandara tergolong dalam Kelas I yang dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 – 400, Boeing 737 – 900ER, Boeing 737 – 800NG, MD – 90. Selain memiliki Bandar Udara Djalaludin, di Provinsi Gorontalo juga sedang dilakukan pembangunan bandara perintis, yaitu Bandar Udara Imbodu di Kabupaten Pohuwato. Kawasan Bandar Udara Imbodu direncanakan seluas 128,64 Ha yang berlokasi di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan yang berjarak 1 jam dari Kota Marisa. Bandara Imbodu direncanakan melayani pesawat jenis F-50 dengan kapasitas 50 penumpang. Di dalam *master plan* Pengembangan Bandara Imbodu, direncanakan Bandara Imbodu akan melayani pesawat kelas M-50. Saat ini panjang landasan pacu (*runway*) 1.970 x 150 meter.

Perusahaan penerbangan yang melayani rute Gorontalo ke luar daerah, yaitu :

1. Maskapai PT. Garuda Indonesia Airways (Boeing 737- 800NG)
2. Maskapai PT. Lion Air (Boeing 737 – 900 ER)
3. Maskapai PT. Sriwijaya Air (Boeing 737 – 500)
4. Maskapai PT. Wings Air (Boeing ATR-72)

5. Maskapai Batik Air (Boeing 737- 800 NG)
6. Maskapai Aviastar/Susi Air DHC -6

Tabel 2.123

Fasilitas Bandara Djalaludin Provinsi Gorontalo Tahun 2015

No	FASILITAS	KETERANGAN
1.	Elevasi	60 Feet / 18 m
2.	Sistem Pelayanan	ADC
3.	Alat Bantu Navigasi	VOR/DME dan NDB
4.	Komunikasi	VHF (122,20 Mhz) dan HF (9055, 6554, 5340 KHz)
5.	Visual Aid	Rwy Light, App Light, Twy Light, Apron Light, Signal Area, Rotating Beacon
6.	Landing Aid	Vasis (2 Bar / 2 Arah)
7.	Run Way (09-27)	2500 m X 45 m
8.	Taxi Way (Alpha dan Bravo)	23 m X 115 m dan 23 m X 115 m
9.	Taxi Way Baru	30 m x 187 m
10.	Apron	231,5 m X 80 m
11.	Apron Baru :	120 m x 200 m
12.	Over Run (09-27)	2 (60 m X 30 m)
13.	Turning Area (09-27)	3 (1200 m ²)
14.	Strip	P = 2.370 m; L = 150 m
15.	Jenis Konstruksi	Aspal Beton
16.	Terminal Penumpang	1.248 m ²
17.	VIP Room	370 m ²
18.	Kantor Bandara	320 m ²
19.	Gudang	220 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo, 2016

Berikut adalah aktivitas bongkar muat bagasi, kargo dan pos, serta aktivitas penumpang melalui Bandara Djalaludin Gorontalo.

Tabel 2.124Data bongkar muat bagasi, kargo dan pos
Di Bandara Djalaludin Gorontalo Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Bagasi (Kg)		Kargo (Kg)		Pos (Kg)		Total	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
1	2012	1.778.208	1.513.617	1.815.139	606.746	6,568	2,290	3.599.915	2.122.653
2	2013	2.150.675	1.891.236	1.517.723	769.963	1,335	21,865	3.669.733	2.683.064
3	2014	2.537.734	1.638.303	1.730.682	798.849	1,195	52,526	4.269.612	2.489.678
4	2015	2.855.456	1.948.975	1.862.253	835.544	21,620	83,437	4.739.599	2.867.956
5.	2016	2.584.279	2.289.985	1.712.524	1.089.167	173.633	514.540	4.470.436	3.893.692
	Total	11.906.352	9.282.116	8.638.591	4.100.269	204.269	674.658	20.749.295	14.057.043

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.125

Data Arus Lalu lintas Pesawat dan Penumpang
Di Bandara Djalaluddin Gorontalo Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Pesawat		Penumpang	
		Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat
1	2012	1.656	1.650	192.645	187.366
2	2013	2.016	2.013	221.874	217.974
3	2014	1.900	1.900	202.451	201.950
4	2015	2.451	2.455	240.024	242.500
5	2016	2.750	2.747	288.011	285.410

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo, 2016

Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut di Provinsi Gorontalo dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran nasional; dan
- tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran provinsi.

Provinsi Gorontalo memiliki 2 pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek. Pelabuhan Anggrek dikhususkan sebagai pelabuhan ekspor.

Tatanan kepelabuhanan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Gorontalo adalah Pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus seperti pelabuhan bongkar muat kargo dan petikemas, pelabuhan perikanan, pelabuhan batubara, pelabuhan Depo BBM.

Alur pelayaran nasional di Provinsi Gorontalo meliputi:

- Bitung – Gorontalo - Luwuk – Kolonodale – Raha - Kendari – Bau Bau - Makassar;
- Gorontalo – Bitung – Ternate;
- Gorontalo – Bitung – Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta;
- Anggrek – Buol - Tolitoli – Balikpapan – Palu – Makassar – Surabaya – Jakarta;
- Tilamuta – Dolong – Wakai – Ampana – Pagimana – Gorontalo;
- Tilamuta – Dolong/Wakai – Ampana – Pagimana – Banggai – Kolonadale – Makassar;
- Kwandang – Paleleh - Leok – Lokodidi – Buol – Tolitoli – Wani;
- Kwandang – Tarakan – Balikpapan;
- Kwandang – Samarinda.

Berikut adalah data infrastruktur pelabuhan dan aktivitas barang dan penumpang melalui Pelabuhan Laut Provinsi Gorontalo :

Tabel 2.126
Nama – Nama Pelabuhan Di Provinsi Gorontalo

No	Nama pelabuhan	Lokasi	Keterangan
1.	Pelabuhan Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelabuhan Pengumpul
2.	Pelabuhan Anggrek	Kab. Gorontalo Utara	Pelabuhan Pengumpul
3.	Pelabuhan Kwandang	Kab. Gorontalo Utara	Pelabuhan Pengumpul
4.	Pelabuhan Tilamuta	Kab. Boalemo	Pelabuhan Pengumpan
5.	Pelabuhan Bumbulan	Kab. Pohuwato	Pelabuhan Pengumpan
6.	Pelabuhan Penyeberangan Marisa	Kab. Pohuwato	Pelabuhan Penyeberangan
7.	Pelabuhan Laut Kabila Bone	Kab. Bone Bolango	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2010 - 2030

Tabel 2.127
Aktivitas Kapal, Barang dan Penumpang
Di Pelabuhan Anggrek Tahun 2016

No	Bulan	Kapal		Barang (Ton/M ³)				Penumpang		Hewan		Keg. Konteiner	
		Tiba	Berangkat	Bongkar	Muat	Import	Export	Turun	Naik	Turun	Naik	Bongkar	Muat
				(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Org)	(Org)	(Ekor)	(Ekor)	(TEUS)	(TEUS)
1	Pelabuhan Anggrek	243	214	214.884	63.058,9	59.135	914.014	-	-	-	-	9.640	10.448
2	Pelabuhan Kwandang	80	80	10.259,00	350.871	-	-	-	-	-	317	36	357
3	Pelabuhan Bumbulan	1.268	1.268	19.465	39.145	-	-	3.434	4.326	-	-	-	-
4	Pelabuhan Tilamuta	1422	1422	37.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelabuhan Kota Gorontalo	4.361	4.364	742.533	135.047	-	-	52.530	39.134	-	-	-	-
	TOTAL	7.392	7.348	1.024.984	588.122	59.135	914.014	55.964	43.460	-	317	9.676	10.841

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo, 2016

Transportasi Darat

Saat ini kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat. Selama tahun 2012-2016, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan mencapai 28,3 persen. Jumlah kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2016 sebesar 340.991 buah, dengan jenis kendaraan yang terbesar adalah sepeda motor yaitu sebesar 87,56

persen, selebihnya sebesar 12,4 persen terdiri dari mobil penumpang, bus, mobil barang dan mobil khusus.

Tabel 2.128

Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan
Provinsi Gorontalo tahun 2013-2016

Wilayah/Samsat	Kendaraan Bermotor					Jumlah
	Mobil Penumpang	Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Mobil Khusus	
Kabupaten Boalemo	1.046	19	1.351	25.993	25	28.434
Kabupaten Gorontalo	7.105	404	7.595	114.242	100	129.446
Kabupaten Pohuwato	1.469	29	1.936	32.877	7	36.318
Kabupaten Bone Bolango	2.228	23	1.469	38.463	23	42.206
Kota Gorontalo	11.141	267	6.102	87.000	77	104.587
Jumlah (total) 2016	22.989	742	18.453	298.575	232	340.991
2015	20.377	737	17.267	276.294	213	314.888
2014	18.180	723	15.886	257.627	190	292.606
2013	16.002	712	13.902	235.068	180	265.864

Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, 2016

Untuk angkutan umum darat selama tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami penurunan. Tercatat bahwa jumlah angkutan antar kota dalam provinsi yang tercatat dalam pengawasan izin trayek pada tahun 2013 sebesar 418 unit, mengalami penurunan hingga 30% tahun 2016 sebesar 291 unit. Berikut adalah daftar kendaraan angkutan antar kota dalam provinsi di masing-masing trayek/lintasan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sesuai pengawasan izin trayek dinas perhubungan Provinsi Gorontalo :

Tabel 2.129

Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Antar Kota
Dalam Provinsi (AKDP) Sesuai Pengawasan Izin Trayek Tahun 2013 – 2016

No	Trayek / lintasan	Panjang (Km)	Jumlah Pengawasan AKDP								Ket
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
1	TML. LEATO - MOLOTABU	12	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	Jumlah menurut
2	TML. LEATO - BILUNGALA (BONEPANTAI)	27	1	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	yang aktif melakukan
3	TML LEATO - TOMBULILATO	51	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	pengurusan
4	TML LEATO - MONANO	60	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	Kartu Pengawasan
5	TML LEATO - TALUDAA	64	49	Unit	24	Unit	27	Unit	27	Unit	Izin Trayek AKDP:



6	TML PUSAT KOTA - KABILA (DUTOHE)	9	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
7	TML PUSAT KOTA - SUWAWA (DUANO)	13	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
8	TML PUSAT KOTA - TIMBUOLO	13	-	Unit	-	Unit	-	Unit	2	Unit	
9	TML PUSAT KOTA - BONGO (BATUDAA PANTE)	14	2	Unit	2	Unit	2	Unit	-	Unit	
10	TML PUSAT KOTA - KAYUBULAN	22	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
11	TML PUSAT KOTA - BATUDAA	14	1	Unit	1	Unit	-	Unit	-	Unit	
12	TML PUSAT KOTA - BONGOMEME	26	28	Unit	19	Unit	17	Unit	19	Unit	
13	TML PUSAT KOTA - TELAGA	7	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
14	TML PUSAT KOTA - PASAR SORE	12	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
15	TML PUSAT KOTA - PILOHAYANGA	12	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
16	TML PUSAT KOTA - TAPA	13	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
17	TML PUSAT KOTA - TUPA	20	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
18	TML PUSAT KOTA - DULAMAYO	27	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
19	TML 42 - LIMBOTO	17	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	
20	TML 42- ISIMU	30	18	Unit	20	Unit	20	Unit	25	Unit	
21	TML 42- PULUBALA	40	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	
22	TML 42 - BAKTI	49	2	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	
23	TML 42 - BUMELA	52	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
24	TML 42 - PARUNGI	56	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
25	TML 42 - BILATO	63	2	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
26	TML 42 - MUTIARA	75	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
27	TML 42 - LAKEYA	79	8	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	
28	TML 42 - BULULI	101	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
29	TML 42 - MOHIYOLO	105	4	Unit	5	Unit	5	Unit	2	Unit	
30	TML 42 - PAGUYAMAN (TANGKOBU)	71	31	Unit	27	Unit	27	Unit	16	Unit	
31	TML 42 - PAGUYAMAN (WONOSARI)	106	3	Unit	-	Unit	-	Unit	1	Unit	
32	TML 42 - BONGO NOL	80	2	Unit	2	Unit	2	Unit	1	Unit	
33	TML 42 - DULUPI	92	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
34	TML 42 - TILAMUTA	104	41	Unit	44	Unit	45	Unit	34	Unit	
35	TML 42 - BUMBULAN	143	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
36	TML 42 - PAGUAT	149	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
37	TML 42 - MARISA	164	30	Unit	20	Unit	20	Unit	16	Unit	
38	TML 42 -	195	2	Unit	2	Unit	2	Unit	3	Unit	



	RANDANGAN										
39	TML 42 - LEMITO	220	1	Unit	1	Unit	1	Unit	-	Unit	
40	TML 42 - POPAYATO	242	16	Unit	11	Unit	12	Unit	6	Unit	
41	TML 42 - MALANGO	251	2	Unit	3	Unit	3	Unit	-	Unit	
42	TML 42 - DUDEULO	255	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
43	TML 42 - MOLOSIFAT	259	3	Unit	1	Unit	1	Unit	-	Unit	
44	TML 42 - MOLINGKAPOTO	48	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
45	TML 42 - KWANDANG	63	57	Unit	46	Unit	46	Unit	26	Unit	
46	TML 42 - GENTUMA	89	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
47	TML 42 - ATINGGOLA	102	37	Unit	38	Unit	38	Unit	31	Unit	
48	TML 42 - ANGGREK	61	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
49	TML 42 - MONANO	76	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
50	TML 42 - SUMALATA (BULONTIO)	114	13	Unit	7	Unit	7	Unit	4	Unit	
51	TML 42 - TOLINGGULA ULU	194	6	Unit	7	Unit	7	Unit	2	Unit	
52	TML 42 - PAPUALANGI SP2	205	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	
53	TML 42 - BUBAA	85	-	Unit	4	Unit	4	Unit	2	Unit	
54	TML 42 - TOIDITO	50	-	Unit	2	Unit	2	Unit	-	Unit	
55	TML. 42 - BILUHU TIMUR - ILOMATA	46	-	Unit	4	Unit	4	Unit	-	Unit	
56	TML ISIMU - PAGUYAMAN (TANGKOBU)	31	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
57	TML ISIMU - BONGO NOL	50	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
58	TML ISIMU - TILAMUTA	74	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
59	TML ISIMU - BUMBULAN	113	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
60	TML ISIMU - PAGUAT	119	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
61	TML ISIMU - MARISA	134	24	Unit	19	Unit	19	Unit	19	Unit	
62	TML ISIMU - RANDANGAN	165	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
63	TML ISIMU - LEMITO	199	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
64	TML ISIMU - POPAYATO	212	3	Unit	9	Unit	9	Unit	7	Unit	
65	TML ISIMU - MOLOSIFAT	229	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
66	TML ISIMU - KWANDANG	33	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
67	TML ISIMU - ATINGGOLA	72	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
68	TML ISIMU - PEL. ANGGREK	31	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
69	TML TILAMUTA - MARISA	60	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
70	TML TILAMUTA - RANDANGAN	91	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	

71	TML TILAMUTA – LEMITO	116	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
72	TML TILAMUTA - POPAYATO	138	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
73	TML TILAMUTA - MOLOSIFAT	155	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	
74	TML TELAGA - KWANDANG	56	7	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	
75	TML TELAGA - ATINGGOLA	95	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	
76	TML TELAGA - SUMALATA	137	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	
	JUMLAH TOTAL		418	Unit	362	Unit	364	Unit	291	Unit	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo, 2016

Disamping itu jumlah armada angkutan umum lintas wilayah tahun 2015 sebanyak 77 armada, yang melayani penumpang dan angkutan barang dari dan tujuan Manado, Tondano, Bitung, Kotamobagu, Palu, Makassar, Molibagu dan Buol.

Terminal Angkutan Darat

Terminal adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Secara keseluruhan, Provinsi Gorontalo, memiliki 20 (dua puluh) terminal yang terdiri dari 3 (tiga) terminal type A, 17 (tujuh belas) terminal type C. Terminal type A yang terdapat di Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Bus Isimu di Kabupaten Gorontalo, Terminal Bus 42 Andalas di Kota Gorontalo dan Terminal Duingi yang selesai di bangun tahun 2015 namun saat ini belum beroperasi. Sedangkan untuk terminal tipe B yang menjadi kewenangan Provinsi saat ini belum tersedia. Namun dari 17 terminal tipe C, sebanyak 4 terminal yang akan diusulkan untuk dinaikkan statusnya menjadi terminal tipe B yaitu: Terminal Leato di Kota Gorontalo, Terminal Limboto di Kabupaten Gorontalo, Terminal Tilamuta di Kabupaten Boalemo, Terminal Marisa di Kabupaten Pohuwato. Dan direncanakan terminal tipe B di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Dilihat dari trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), di Provinsi Gorontalo terdapat 26 jaringan trayek komersil dan 7 jaringan lintasan perintis yang bersubsidi. Jaringan lintasan perintis dilayani oleh Bus DAMRI yang melayani desa-desa yang masih terpencil. Ada 7 lintasan perintis bersubsidi, yaitu :

1. Gorontalo - Tolinggula Ulu – Papualangi

2. Gorontalo - Marisa – Malango
3. Gorontalo - Biluhu Tengah – Ilomata
4. Gorontalo - Bilungala – Malibagu
5. Gorontalo - Parungi - Lakeya – Mohiyolo
6. Gorontalo - Monano – Omu
7. Gorontalo - Bubaa

Tabel 2.130
Daftar Terminal Berdasarkan Type
Di Provinsi Gorontalo

No	Nama terminal	Tip e	Alamat/lokasi	Luas (M²)	Ket
1	Terminal Bus Isimu	A	Kel. Datahu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo	100 m x 300 m	
2	Terminal Bus 42 Andalas	A	Kel. Tapa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo	100 m x 200 m	
3	Terminal Duingingi	A	Kec. Duingingi Kota Gorontalo		Terminal Baru
4	Terminal Leato	C	Kel. Leato Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo	60 m x 100 m	Diusulkan menjadi terminal tipe B
5	Terminal Limboto	C	Kel. Kayu Bulan, Kec. Limboto Kab. Gorontalo	90 m x 100 m	Diusulkan menjadi terminal tipe B
6	Terminal Paguyaman/Tangkobu	C	Desa Tangkobu, Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	90 m x 100 m	
7	Terminal Tilamuta	C	Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	60 m x 70 m	Diusulkan menjadi terminal tipe B
8	Terminal Mananggu	C	Desa Karuyen, Kec. Mananggu Kab. Boalemo	50 m x 60 m	
9	Terminal Marisa	C	Desa Teratai, Kec. Marisa Kab, Pohuwato	60 m X 40 m	Diusulkan menjadi terminal tipe B
10	Terminal Telaga	C	Desa Bulila, Kec. Telaga Kab. Gorontalo	40 m X 50 m	

N o	Nama terminal	Tip e	Alamat/lokasi	Luas (M ²)	Ket
11	Terminal Atinggola	C	Desa Kota Jin, Kec. Atinggola Kab. Gorontalo	40 m X 50 m	
12	Terminal Popayato	C	Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	80 m X 100 m	
13	Terminal Randangan	C	Desa Lemito, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	60 m X 1000 m	
14	Terminal Pusat Kota	C	Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo	60 m X 100 m	
15	Terminal Tapa	C	Desa Ayula, Kec. Tapa Kab. Bone Bolango	20 m X 40 m	
16	Terminal Bongomeme	C	Desa Kaliyoso, Kec. Bongomeme Kab. Bone Bolango	20 m X 40 m	
17	Terminal Parungi	C	Desa Parungi, Kec. Boliyohuto Kab. Pohuwato	20 m X 40 m	
18	Terminal Malingkapoto	C	Desa Malingkapoto, Kec. Anggrek Kab. Pohuwato	20 m X 40 m	
19	Terminal Molosifat	C	Desa Molosifat, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	100 m X 100 m	
20	Terminal Lemito	C	Desa Lemito, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	20 m X 40 m	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo, 2016

2.4.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan daerah seperti keindahan alam, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi *Gorontalo Information Database*, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan

sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Terkait pembangunan Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2012-2016 yang telah dicapai yaitu:

1. Terbangunnya infrastruktur jaringan intranet dengan jumlah 60 titik sambungan jaringan yang terdiri atas 55 titik sambungan jaringan OPD dan UPTD, 4 titik sambungan tempat umum dan 1 titik sambungan untuk asosiasi pengadaan barang dan jasa.
2. Kapasitas koneksi internet dengan kapasitas 12 Mbps untuk melayani 60 titik sambungan
3. Website dan portal Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat diakses melalui www.gorontaloprov.go.id dan www.gorontalo.go.id
4. Webmail untuk seluruh OPD, Kecamatan dan Desa dengan jumlah 3274 pengguna yang dapat diakses melalui <http://mail.gorontaloprov.go.id>
5. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan sistem informasi perpustakaan digital dengan jumlah 7851 database dan dokumen digital
6. Pengembangan Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan dengan jumlah 19.793 database hukum dan perundang-undangan dalam bentuk dokumen digital.
7. Tersedianya 72 Pusat Layanan Internet Kecamatan dan 182 Desa Dering untuk layanan komunikasi.

Disamping itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan inovasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi maupun pengendalian dan evaluasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diterapkan beberapa layanan komunikasi dan informasi berbasis elektronik. Beberapa aplikasi berbasis elektronik yang diterapkan Pemerintah Provinsi, yakni antara lain :

1. www.gorontaloprov.go.id : merupakan website resmi pemerintah provinsi sebagai layanan informasi berbasis online;
2. LPSE : Layanan Pengadaan secara Elektronik;
3. E-Monev : aplikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan;
4. E-Renggar : Aplikasi untuk perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin konsistensi dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
5. E-Musrenbang : Aplikasi untuk mengefektifkan penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
6. Simda : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
7. Simpede : Sistem Informasi Perjalanan Dinas;

8. E-data yang diintegrasikan dengan website bappeda : bappeda.gorontaloprov.go.id : merupakan aplikasi data dan informasi pembangunan daerah, serta media informasi kegiatan pemerintahan;
9. E-RTS : aplikasi Rumah Tangga Sasaran yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT), untuk fokus program penanggulangan kemiskinan.

2.4.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Kegiatan koperasi dan UMKM mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah, distribusi pendapat

dan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut adalah jumlah koperasi dan koperasi aktif dan sebaran per Kabupaten/Kota se-Provinsi Provinsi Gorontalo :

Tabel 2.131

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 s/d 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	648	706	741	644	658
2	Jumlah koperasi	1.030	1.101	1.148	1.179	1.236
3	Persentase koperasi aktif	62,9	64,1	64,5	54,6	53,2

Sumber : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo, 2016

Tabel 2.132

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 s/d 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo					
	Jumlah koperasi aktif	131	141	142	154	158
	Jumlah koperasi	246	267	269	281	285
	Persentase koperasi aktif	53,2	52,8	52,7	54,8	55,4
2	Kabupaten Bone Bolango					
	Jumlah koperasi aktif	58	61	67	70	75
	Jumlah koperasi	112	118	123	126	131
	Persentase koperasi aktif	100	51,4	54,4	55,5	57,25
3	Kabupaten Gorontalo					

NO	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah Koperasi Aktif	267	289	304	179	188
	Jumlah Koperasi	343	365	380	385	394
	Presentase koperasi Aktif	106,9	79,1	80	46,4	47,72
4	Kabupaten Gorontalo Utara					
	Jumlah Koperasi Aktif	56	63	66	71	57
	Jumlah Koperasi	90	97	101	106	108
	Presentase Koperasi Aktif	62,2	64,9	65,3	66,9	52,8
5	Kabupaten Boalemo					
	Jumlah Koperasi Aktif	76	60	64	64	69
	Jumlah Koperasi	108	121	125	125	130
	Presentase Koperasi Aktif	70,3	49,5	51,2	51,2	53,08
6	Kabupaten Pohuwato					
	Jumlah Koperasi Aktif	49	77	78	84	84
	Jumlah Koperasi	107	115	117	121	121
	Presentase Koperasi Aktif	45,7	66,9	66,6	69,4	69,42
	Jumlah koperasi aktif	648	706	741	644	658
	Jumlah Koperasi Kab/Kota	1.030	1.101	1.148	1.179	1.236
	Total Persentase koperasi aktif	62,9	64,1	64,5	54,6	53,24

Sumber : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo, 2016

Sedangkan, untuk perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 52.523 unit, dan tahun 2016 menjadi 81.776 unit atau meningkat 55,69 % selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.133

Jumlah UKM non BPR/LKM Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

NO	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	10.513	11.694	10.525	10.937	8.425
2	Kabupaten Gorontalo	17.626	27.666	30.434	32.391	33.468
3	Kabupaten Boalemo	6.294	6.069	6.069	4.272	4.983
4	Kabupaten Pohuwato	4.672	5.100	2.521	4.971	6.513
5	Kabupaten Bone Bolango	11.412	11.656	17.768	20.031	22.738
6	Kabupaten Gorontalo Utara	2.006	2.508	3.386	3.386	5.649
	Total Provinsi	52.523	64.693	70.703	75.988	81.776

Sumber : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo, 2016

Pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang signifikan. Namun demikian perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha, dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika kebijakan pemerintah menaikkan BBM jadi diterapkan.

Salah satu sarana penting dalam mendukung pengembangan usaha pelaku UMKM adalah ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa. Hingga tahun 2016, Pasar Tradisional berjumlah 49 unit dan Pasar Modern 17 unit dengan total jumlah sebanyak 54 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebanyak 77 kecamatan, berarti rasio pasar terhadap jumlah kecamatan adalah 0,70, atau tidak semua kecamatan memiliki sarana pasar tradisional. Berikut data jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Provinsi Gorontalo tahun 2016:

Tabel 2.134
Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Kab./Kota	Pasar Tradisional	Pasar Modern	Jumlah
Kota Gorontalo	7 unit	14 unit	21 unit
Kab. Gorontalo	13 unit	2 unit	15 unit
Kab. Boalemo	4 unit	-	4 unit
Kab. Pohuwato	14 unit	1 unit	15 unit
Kab. Bone Bolango	3 unit	-	3 unit
Kab. Gorontalo Utara	8 unit	-	8 unit
Provinsi Gorontalo	49 unit	17 unit	54 unit

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2016

Lebih lanjut, untuk lembaga keuangan sesuai data yang ada pada Bank Indonesia terdapat 17 lembaga perbankan yang ada di Gorontalo baik perbankan nasional maupun swasta, dengan total 99 unit yang tersebar dimasing-masing kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah beroperasi sebanyak 4 BPR, yaitu Kota Gorontalo 4 Unit BPR, Kabupaten Gorontalo 2 Unit BPR dan Kab. Pohuwato 1 Unit BPR.

2.4.2.12 Penanaman Modal

Salah satu pendorong dalam meningkatkan pembangunan ekonomi adalah masuknya modal asing (investasi) sebagai *the first capital* untuk memberdayakan perekonomian negara atau daerah yang bersangkutan. Penanaman modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka jaringan bisnis internasional dan membuka lapangan kerja bagi suatu daerah.

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Gorontalo, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kemudahan Investasi. Perda ini mengatur tentang kemudahan-kemudahan pelayanan terhadap investor terutama untuk

masalah penyediaan lahan, proses perijinan dan pemberian insentif berupa keringanan pajak. Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk berbagai kegiatan pelayanan termasuk pelayanan perijinan.

Jumlah Investor (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan dan kerjasama terhadap investor.

Tabel 2.135

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 sd 2016
Provinsi/ Provinsi Gorontalo

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2012	Jumlah PMA dan PMDN	4	9	13
2013	Jumlah PMA dan PMDN	4	14	18
2014	Jumlah PMA dan PMDN	4	18	22
2015	Jumlah PMA dan PMDN	7	24	31
2016	Jumlah PMA dan PMDN	9	24	33

Sumber : Badan Penanaman Modal, dan ESDM dan TransmigrasiProv. Gorontalo, 2016

Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor, maka nilai investasi pun semakin meningkat hingga akhir tahun 2016 nilai investasi mencapai 4,14 triliun. Perkembangan investasi di Provinsi Gorontalo, dapat ditunjukkan dengan data realisasi investasi pada Tahun 2012 sebesar 2,85 Triliun dan meningkat menjadi 4,14 triliun tahun 2016.

Namun demikian, pertumbuhan investasi di Provinsi Gorontalo dinilai masih relative rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya disulawesi. Masih rendahnya realisasi investasi di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh 7 (tujuh) faktor yaitu (1) kurangnya insentif bagi investor dalam melakukan investasi, (2) ketersediaan lahan usaha, (3) lamanya proses perijinan, (4) kesiapan obyek investasi, (5) tingkat pungutan liar, (6) kemudahan akses informasi, (7) kualitas SDM birokrasi bidang pelayanan investasi.

Tabel 2.136

Pertambahan Nilai Investasi Provinsi Gorontalo, 2012 – 2016 (dalam Triliun)

Investasi	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Investasi (triliun)	2,85	3,02	3,24	4,11	4,14

Sumber : Badan Penanaman Modal, dan ESDM dan Transmigrasi Prov. Gorontalo, 2016

Sementara itu jumlah proyek yang direalisasikan selama tahun 2012-2016 sejumlah 108 proyek dengan total nilai investasi sebesar 2.520 Trilyun.

Tabel 2.137
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 sd 2016
Provinsi/ Provinsi Gorontalo

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2012	22	1,300 trilyun	13	346 milyar
2013	4	133 milyar	14	405 milyar
2014	5	653 milyar	14	96 milyar
2015	18	13,616 trilyun	51	190 milyar
2016	1	44 milyar	16	1,483 trilyun
Total	50	15.746 Trilyun	108	2.520 Trilyun

Sumber : Badan Penanaman Modal, dan ESDM dan Transmigrasi Prov. Gorontalo, 2016

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Meningkatnya investor yang masuk ke Provinsi Gorontalo tentunya akan berdampak kepada penyedia lapangan kerja, dari tahun 2012 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 7.714 meningkat di tahun 2015 sebesar 18.547 tenaga kerja setiap satu perusahaan.

Tabel 2.138
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 sd 2016
Provinsi/ Provinsi Gorontalo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	100.282	188.946	396.066	574.957
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	13	18	22	31
3	Rasio daya serap tenaga kerja	7.714	10.497	18.003	18.547

Sumber : Badan Penanaman Modal, dan ESDM dan Transmigrasi Prov. Gorontalo, 2016

2.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Salah satu bagian dari Pembinaan Pemuda yaitu melalui olahraga. Olahraga merupakan bagian hidup yang mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Prestasi olahraga dalam berbagai even sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga, dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas.

Tabel 2.139
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 sd 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian	34	50	56	60	74
2	Jumlah gedung kesenian	6	11	15	20	28
3	Jumlah klub olahraga	17	20	28	37	45
4	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2016

Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, melalui peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkualitas baik dan memadai dalam artian harus di sesuaikan dengan standart kebutuhan ruang perorangan. Sarana dan Prasarana Olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang di gunakan yang memenuhi prasyarat yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga dalam rangka pemberdayaan pemudaserterta pembinaan dan peningkatan kompetensi atlet.

Data menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Gorontalo, baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih belum memadai. Disamping itu, perlu untuk membudayakan olahraga kepada masyarakat, dengan ruang publik untuk olahraga, sehingga olahraga tidak hanya untuk para atlet, namun menjadi suatu budaya untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat dengan berolahraga.

- Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi Pemuda adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah maupun bukan menjadi anak didik yang masuk kategori pemuda/remaja. Berikut adalah jumlah organisasi pemuda yang terdaftar di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo:

Tabel 2.140
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Gorontalo	9	9	9	9	9
2.	Kab. Boalemo	7	7	7	7	7
3.	Kab. Pohuwato	7	7	7	7	7
4.	Kab. Bone Bolango	5	5	5	5	5

5.	Kab. Gorontalo Utara	7	7	7	7	7
6.	Kota Gorontalo	16	16	17	17	17
	Jumlah	51	51	52	52	52

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2016

- Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga sebagai wadah kegiatan olahraga dan menangani semua aktivitas olahraga dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal. Organisasi olahraga dibentuk untuk mewadahi para atlet diberbagai cabang olahraga, dengan tujuan untuk pemberdayaan dalam rangka peningkatan kualitas dan prestasi. Berikut adalah jumlah organisasi olahraga yang tersebar dimasing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Table 2.141

Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2012 sd 2016 Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Gorontalo	28	28	29	30	32
2.	Kab. Boalemo	25	25	25	26	28
3.	Kab. Pohuwato	25	25	25	26	28
4.	Kab. Bone Bolango	26	26	26	27	29
5.	Kab. Gorontalo Utara	25	25	25	26	28
6.	Kota Gorontalo	27	27	29	30	32
	Jumlah	156	156	159	165	177

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2016

- Prestasi Olahraga

Dari hasil pembinaan dan pemberdayaan para atlet, Provinsi Gorontalo juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan event kejuaraan baik Nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar prestasi olahraga di Provinsi Gorontalo selang tahun 2012-2016 :

Tabel 2.142Daftar Prestasi Olahraga Provinsi Gorontalo ditingkat Nasional
Tahun 2012 sd 2016

NO	CABOR	NAMA KEJUARAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TAHUN	PRESTASI		
					EMAS	PERAK	PRGGU
1	ATLETIK	KEJURNAS ANTAR PPLP	ACEH	2015		1	
		KEJURNAS ANTAR PPLP	ACEH	2015			1
		KEJURNAS ANTAR PPLP	ACEH	2015		1	
		PON XVIII	RIAU	2012		1	
2	SEPAK TAKRAW	KEJURNAS ANTAR PPLP	GORONTALO	2015			3
		POPNAS 2013	BANDUNG	2015			3
		PON XIX 2016	BANDUNG	2016	2		1
		KEJURNAS ANTAR PPLP	SEMARANG	2016		2	
3	Karate	Kejurnas antar PPLP 2015	Palembang	2015	2	2	2
		POPNAS	Bandung	2015			1
		Piala MENDAGRI	Banten	2015			1
		Kejurnas antar PPLP 2016	Gorontalo	2016	4	3	4
		Piala PANGLIMA TNI	Jakarta	2016		1	
4	PENCAK SILAT	KEJURNAS ANTAR PPLP	TERNATE	2015			1
		KEJURNAS ANTAR PPLP	MANADO	2015			1
		POPWIL	PAPUA	2016	1	1	1
5	Tenis Meja	Kejurnas Kelompok umur	Bali	2015	1		
		Kejurnas Kelompok umur	Bali	2015	1		
		POPWIL	Papua	2016		1	
		Makassar Open	Makassar	2016		1	
6	TAEKWONDO	KEJURNAS ANTAR PPLP	PALU	2016			4
Total					11	14	23

Sumber :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.143Daftar Prestasi Olahraga Provinsi Gorontalo ditingkat Internasional
Tahun 2012 s/d 2016

NO	CABOR	NAMA KEJUARAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TAHUN	PRESTASI		
					EMAS	PERAK	PRGGU
1	ATLETIK	ASEAN SCHOOL GAMES	THAILAND	2016		1	
2	SEPAK TAKRAW	Asean School Games 2015	Brunei Darussalam	2015		1	1
3	SEPAK TAKRAW	Asean School Games 2016	Bangkok	2016		1	1

NO	CABOR	NAMA KEJUARAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TAHUN	PRESTASI		
					EMAS	PERAK	PRGGU
4	Karate	Kejuaraan Asia JKS	Vietnam	2016	1		
5	SEPAK TAKRAW	Asean School Games 2013	Vietnam	2013		1	1
6		Asean School Games 2013	Vietnam	2013		1	1
7		Asean School Games 2013	Vietnam	2013		1	1
8		Asean School Games 2014	Philipina	2014			2
9		Asean School Games 2014	Philipina	2014			2
10		Asean School Games 2015	Brunei Darussalam	2015		1	1
11		King's Cup 2016	Bangkok	2016		1	1
12		Asean School Games 2016	Bangkok	2016		1	1
13		Sea Games 2013	Myanmar	2013		2	
14		Asian Games 2014	Incheon	2014			1
15		Istaf Super Series 2014	Myanmar	2014			1
16		asean University Games	Palembang	2014		2	
17		asean University Games	Palembang	2014		2	
18		asean University Games	Palembang	2014		2	
19		Sea GaMES 2015	Singapore	2015			2
20		Sea GaMES 2015	Singapore	2015			2
21		Sea GaMES 2015	Singapore	2015			2
	Total				1	17	20

Sumber :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.2.14 Urusan Statistik

Dalam rangka mendukung pengelolaan data dan informasi terintegrasi, mulai tahun 2014 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dirancang aplikasi satu data dengan system data statistik aplikasi e-data, yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik. Aplikasi e-data dibuat dalam rangka menjaga konsistensi dan terintegrasinya data dari berbagai sumber data

hususnya data sektor. Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga merancang aplikasi e-rts (Rumah Tangga Sasaran) yang telah beroperasi dari tahun 2016, yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT), sebagai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Dukungan statistik lainnya adalah melalui penyusunan Buku Provinsi Gorontalo Dalam Angka yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap tahun. Selain Gorontalo Dalam Angka, melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menyusun buku PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang juga diterbitkan setiap tahun.

2.4.2.15 Urusan Kebudayaan

Gorontalo memiliki tradisi mengelola sistem pemerintahannya secara pluralistik dan mandiri. Kekayaan sosio-histori ini menjadikan masyarakat Gorontalo secara kolektif terdorong untuk memajukan potensi dan mengimplementasikan aksi sosial dalam kehidupan masyarakat Gorontalo dalam nuansa nilai, norma dan tradisi lokal masyarakat. Bahkan sehubungan dengan kebiasaan ini dikenal istilah "*huyula*" (bersama-sama) di tengah-tengah masyarakatnya. Satu hal penting dalam budaya huyula adalah apresiasi gambaran masyarakat yang secara sadar untuk membangun kohesi sosial dimana hal itu dikelola bersama dalam falsafah "*adat bersendikan syara', syara bersendikan Kitabullah*".

Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Gorontalo memiliki tiga jenis bahasa daerah yaitu:

- Bahasa Gorontalo
- Bahasa Suwawa
- Bahasa Atinggola

Namun demikian bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Gorontalo.

Seni Budaya di Gorontalo berkembang dan tersebar cukup luas di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota terus menggali dan menginventarisasi keragaman seni budaya selanjutnya dikemas dalam setiap pelaksanaan festival seni budaya baik berskala daerah maupun nasional dan internasional. Adapun beberapa upaya Pemerintah Daerah dalam mempromosikan seni dan budaya daerah meliputi:

1. Pengelolaan dan pelestarian Kekayaan Budaya
 - Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah

- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bahwa air.
- Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah
- Pengembangan pemasaran pariwisata
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan

2. Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

- Keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada Asian Pasific Choir Games tahun 2013, dan memperoleh gold medal.
- Keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada Bali International Choir Festival dan memperoleh gold medal.

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

- Festival Karawo
- Festival Walima
- Festival Buruda/Turunani
- Festival Dana-dana
- Pagelaran Polopalo
- Festival Tumbilotohe.

Sampai dengan tahun 2016 terdapat 22 benda purbakala yang dilestarikan. Beberapa benda dan cagar budaya yang sudah dijaga dan dilestarikan adalah Benteng Otanaha, Benteng Oranye, Makam ju panggola, Makam ta ilayabe, kuburan duhela pitulolango, Makam Raja Blongkod, rumah tua di bone bolango. Benda purbakala yang sudah dilestarikan seperti dindinga, isiriki mulolo dan lain.

Selanjutnya tantangan kedepan pemerintah daerah adalah penyediaan tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidang kebudayaan melalui peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan IPTEK. Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasarana kesenian perlu dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Hal ini akan menjadi sangat penting sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan promosi seni budaya daerah.

2.4.2.16 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2016 jumlah perpustakaan Provinsi Gorontalo sejumlah 26 unit yang tersebar di kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo. Jumlah Perpustakaan di Provinsi Gorontalo masih dinilai cukup sedikit.

Sebagai bentuk upaya pemerintah provinsi khususnya dalam hal penyediaan layanan kepastakaan, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) unit Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dalam pelaksanaan kapasitas pelayanan perpustakaan Kantor Perpustakaan Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan jumlah buku dan judul buku, hal ini dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.144

Jumlah Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

No.	Tahun.	Jumlah Buku	Jumlah Pengunjung
1.	2012	11.799 jdl	10.531
2.	2013	15.330 jdl	12.889
3.	2014	15.800 jdl	10.069
4.	2015	15.800 jdl	10.069
5.	2016	56.243 jdl	23.962

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2016

Selain itu, dalam rangka peningkatan aksesibilitas terhadap layanan perpustakaan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan minat baca, maka Pemerintah Provinsi menyediakan perpustakaan keliling dengan menggunakan kendaraan operasional mobil perpustakaan keliling, yang pelayanannya kepada sekolah-sekolah dan desa-desa yang berada di wilayah IPM rendah se-Provinsi Gorontalo. Tahun 2016, lokasi pelayanan perpustakaan keliling sebanyak 120 lokasi, dengan total pengguna layanan sebanyak 3.124 orang, atau rata-rata setiap lokasi melayani 27 pengunjung. Adapun pengguna layanan mobil perpustakaan keliling tahun 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel. 2.145

Jumlah Pengunjung Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

Tahun	Total Pengguna Layanan
2012	2.322
2013	2.535
2014	2.756
2015	2.934

2016	3.124
------	-------

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo, tahun 2016

2.4.2.17 Urusan Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan telah terkumpul sejumlah arsip-arsip aktif dan inaktif dari setiap OPD yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2012-2016.

Tabel. 2.146
Jumlah ARSIP dan Jumlah Pengelola Kearsipan di Gorontalo, 2012-2016

No.	Tahun.	Jumlah Arsip	Jumlah Pengelola Kearsipan	Jumlah Layanan Sadar Arsip
1.	2012	1.890	180	300
2.	2013	1.920	180	324
3.	2014	1.964	180	315
4.	2015	2.121	180	332
5.	2016	2.567	180	348

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.3 Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1 Urusan Pariwisata

Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata, diantaranya adalah pengembangan sarana dan prasarana objek wisata strategis daerah, pengembangan adat dan budaya lokal, serta promosi pariwisata baik ditingkat nasional maupun internasional sehingga dapat mendorong wisatawan untuk berkunjung ke gorontalo. Hal ini dilakukan, karena dinilai sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong perekonomian suatu daerah.

Pengembangan sektor pariwisata dapat diukur dengan makin meningkatnya jumlah wisatawan yang datang di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.147
Data Kunjungan Wisatawan Di Provinsi Gorontalo

NO	DAERAH KAB/KOTA	2012		2013		2014		2015		2016	
		WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS
1	KOTA GORONTALO	1,751	68,855	1,276	37,267	1,559	114,164	2,067	161,699	2,474	154,111
2	KAB. GORONTALO	5	3,254	61	30,330	161	110,046	220	133,706	310	121,565
3	KAB. BOALEMO	2	3,254	25	48,188	16	63,633	82	144,658	1,009	25,724
4	KAB. POHUWATO	80	34,975	11	8,060	25	7,445	55	9,641	59	16,540
5	KAB. BONE BOLANGO	110	6,282	179	31,978	1,282	53,927	568	99,620	1,082	131,848
6	KAB. GORONTALO UTARA	112	11,241	130	7,431	1,049	12,726	642	23,193	989	116,606
JUMLAH		2,060	127,861	1,682	163,254	4,092	361,941	3,634	572,517	5,923	566,394
		129,921		164,936		366,033		576,151		572,317	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo, 2016

Disamping itu , untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Gorontalo dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir berkisar antara 2 hari – 3 hari seperti terlihat pada tabel 2.252

Tabel 2.148
Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo

Tahun	Rata-rata Lama Tinggal (Hari)		
	Tamu Asing	Tamu Domestik	Tamu Asing Dan Domestik
2012	1.84	2.12	2.12
2013	2.95	2.11	2.12
2014	2.49	2.18	2.19
2015	2.49	2.07	2.07
2016	2.25	1.5	1.52

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo, 2016

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, juga turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di topang dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa lainnya.

2.4.3.2 Pertanian

Pertanian adalah sektor yang paling strategis, terutama sub sektor tanaman pangan, karena disamping paling banyak menyerap tenaga kerja juga merupakan sumber makanan pokok penduduk Indonesia. Dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar.

Pembangunan sub sektor tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan atau kedaulatan pangan. Pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek

produksi dan konsumsi masyarakat dalam wilayah tersebut, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Sektor pertanian di Provinsi Gorontalo merupakan sektor yang potensial. Potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas \pm 35.685 ha yang terdiri dari sawah irigasi \pm 27.674 ha dan sawah non irigasi seluas 8.011 ha. Juga terdapat potensi luasan lahan kering seluas 285.449 ha yang terdiri dari ladang/huma 37.399 ha, tegal/kebun 191.941 ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 56.109 ha. Disamping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Tabel 2.149
Rekapitulasi Luas Baku Lahan Sawah 2012-2016
Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WILAYAH	KABUPATEN/ KOTA	2012	2013	2014	2015	2016	Perkembangan 2012 -2016	
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Rata-rata per Tahun)	
							(Ha)	(%/thn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.01	Gorontalo	13.699	13.851	13.958	13.857	14.298	120	0.86
75.02	Boalemo	4.818	4.841	4.912	4.895	5.396	116	2.29
75.03	Bone Bolango	2.059	2.217	2.115	2.345	2.221	32	1.53
75.04	Pohuwato	3.598	3.918	4.718	3.9	6.685	617	13.19
75.05	Gorontalo Utara	5.638	6.511	6.536	6.209	6.242	121	2.06
75.71	Kota Gorontalo	916	901	875	852	843	-15	-1.65
75	Provinsi Gorontalo	30.728	32.239	33.114	32.058	35.685	1.136	3.81

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Data menunjukkan produktivitas sub sektor tanaman pangan di Gorontalo mempunyai kecenderungan meningkat. Komoditas padi bahkan berada di atas rata-rata nasional. Komoditas utama sub sektor tanaman pangan di Gorontalo meliputi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar. Komoditas padi dan jagung di wilayah Gorontalo, memiliki peran sebagai bahan pangan strategis. Karena peran strategis itu produksi produksi dan harga dikendalikan oleh Pemerintah.

Tabel 2.150
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pangan
Tahun 2012-2016

KOMODITI PANGAN	2012			2013			2014			2015			2016		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Padi Sawah	51,155	48.02	245,666	54,865	52.90	290,232	57,991	52.36	303,627	57,223	56.52	323,384	63,198	53.38	337,330
Padi Ladang	38	31.58	120	2,029	28.00	5,681	4,699	23.57	11,077	2,445	32.05	7,836	3,001	25.13	7,541
Padi Sawah + Lada	51,193	48.01	245,786	56,894	52.01	295,913	62,690	50.20	314,703	59,668	55.51	331,220	66,199	52.10	344,871
Jagung	135,543	47.57	644,754	140,423	47.65	669,094	148,816	48.37	719,780	129,131	49.83	643,513	195,606	46.59	911,350
Kedelai	2,851	12.1	3,451	3,367	13.10	4,411	2,842	15.04	4,273	2,375	13.48	3,203	2,494	15.68	3,910
Kacang Tanah	1,003	11.23	1,126	956	13.41	1,282	1,043	11.76	1,227	769	9.83	756	396	11.38	451
Kacang Hijau	154	12.86	198	139	13.09	182	98	13.38	131	105	13.11	138	100	12.90	129
Ubi Kayu	307	123	3,776	364	124.64	4,537	302	132.04	3,988	197	134.69	2,653	148	166.85	2,469
Ubi Jalar	202	99.11	2,002	201	99.85	2,007	182	104.57	1,903	139	103.21	1,435	52	106.92	556

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017 (Angka Tetap, 2016)

Produksi Sawah di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 337,330 ton gabah kering giling (GKG) di bandingkan dengan produksi pada ATAP 2015 sebesar 323,384 ton gabah kering giling atau naik sebesar 4,31%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain meningkatnya penggunaan benih unggul bersertifikat di tingkat petani, pada Tahun 2015 terjadi pergeseran luas panen dimana 19,583 ha dipanen pada Januari-Maret 2016 sehingga menyebabkan naiknya produksi padi sawah pada tahun 2016 dibanding tahun 2015, dan pada tahun 2016 cuaca mendukung dibanding tahun 2015. Disamping itu yang menyebabkan naiknya produksi karena tingginya luas panen pada posisi September-Desember 2016 disebabkan adanya Areal Penangkaran Benih di 2 kab/kota yaitu Kab. Bone Bolango dan Kab. Gorontalo yang sudah panen untuk persiapan pengadaan benih pada tahun 2017. Namun demikian jika dilihat dari segi bantuan benih bahwa benih padi pada tahun 2015 lebih tinggi dari 2016. bantuan benih padi 2015 sebesar 35.000 ha sedangkan bantuan benih padi sawah pada tahun 2016 hanya sebesar 32.000 ha. Selain ketersediaan pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo, petani yang tidak mendapat bantuan pupuk mereka membeli pupuk di kios2 yang ada di kab/kota hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran petani akan penggunaan pupuk.

Produksi Padi Ladang berdasarkan angka tetap 2016 di Provinsi Gorontalo sebesar 7,541 ton gabah kering giling (GKG) di bandingkan dengan produksi pada tahun 2015 sebesar 7,836 ton gabah kering giling turun sebesar 3,77 % hal ini disebabkan : untuk padi ladang yang di tanam pada bulan Sep-Des 2015 produksi dan produktivitasnya

meningkat karena siklus hama pada komoditi padi ladang tidak begitu banyak sebaliknya untuk siklus hama pada tahun 2016 cukup tinggi sehingga menyebabkan turunnya produksi padi ladang pada ATAP 2016. Luas panen pada khususnya pada bulan September-Desember 2016 meningkat sebesar 22,74% dibanding dengan luas panen sep-des 2015, hal ini disebabkan bantuan padi ladang pada tahun 2015 sebesar 3700 ha Dana APBN dan sebagian petani melakukan tanam padi ladang secara swadaya di kabupaten Gorontalo utara.

Produksi Jagung di Provinsi Gorontalo sebesar 911,350 ton di bandingkan dengan produksi pada tahun 2015 sebesar 643,513 ton naik sebesar 41,62 % hal ini disebabkan, antara lain adanya bantuan Program UPSUS peningkatan luas tanam jagung dan perluasan tanam jagung. Bantuan UPSUS jagung mulai tahun 2015 yaitu untuk perluasan areal tanam jagung sebesar 91,400 ha dari bantuan tersebut tanaman yang tertinggi dibulan oktober sampai dengan desember 2016 sehingga untuk luas panen dipanen pada januari-april 2017 hal ini menyebabkan naiknya produksi yang cukup tinggi pada tahun 2016 dibanding tahun 2016 sedangkan bantuan benih pada tahun 2016 sebesar 84.000 ha. Selain itu, adanya ketersediaan bantuan pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo sejumlah Urea : 19.000 ton, SP36 : 1.500 ton, Za : 850 ton, NPK : 18.590 ton, Organik 1.500 ton, petani yang tidak mendapat pupuk bersubsidi mereka membeli sendiri hal ini terjadi kesadran petani untuk menggunakan pupuk pada tanaman jagung karena pupuk pada posisi tember - Desember 2016 karena ketersediaan pupuk di Provinsi Gorontalo mencukupi kebutuhan petani.

Produksi Kedelai di Provinsi Gorontalo sebesar 3,910 ton biji kering di bandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 3,203 ton (BK) Naik sebesar 22,09% hal ini disebabkan : bantuan Kedelei pada tahun 2016 sebanyak 3000 ha, produktivitasnya naik untuk tahun 2016 karena kurangnya serangan hama penyakit pada benih kedelai.

Produksi Kacang Tanah di Provinsi Gorontalo sebesar 451 ton biji kering di bandingkan dengan produksi pada tahun 2015 sebesar 756 ton Biji kering maka terjadi penurunan produksi sebesar 40,42% hal ini disebabkan : karena pasaran harga kacang tanah pada tahun 2015 naik sehingga menyebabkan minat petani untuk menanam kacang tanah tinggi. Produksi kacang tanah turun pada tahun 2016 karena disebabkan petani pindah alih fungsi untuk menanam komoditi Jagung sehingga menyebabkan turunnya produksi kacang tanah pada tahun 2016.

Produksi Kacang Hijau di Provinsi Gorontalo sebesar 129 ton biji kering di bandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 138 ton biji kering turun sebesar 6,32 %. Hal ini disebabkan karena minat petani untuk menanam kacang hijau pada tahun 2016 berkurang. Penanaman kacang hijau di Provinsi Gorontalo hanya di tanam secara swadaya oleh petani, produksi kacang hijau naik pada tahun 2015 karena disebabkan minat petani untuk menanam komoditi kacang hijau tinggi sehingga menyebabkan naiknya produksi kacang hijau pada tahun 2015, namun jika dibandingkan dengan angka produktivitas untuk Angka ATAP 2016 terhadap ATAP 2015 turun sebesar 1,64 % hal ini disebabkan karena terjadi pindah alih fungsi setiap musim dalam melakukan penanaman kacang hijau sehingga menyebabkan turunnya angka produktivitas pada ATAP 2016.

Produksi Ubi Kayu di Provinsi Gorontalo sebesar 2,469 ton umbi basah di bandingkan dengan produksi pada tahun 2015 sebesar 2,653 ton umbi basah turun sebesar 6,94 % hal ini disebabkan karena petani sebagian petani yang tanam ubi kayu pindah alih fungsi tanam jagung sehingga menyebabkan turunnya produksi ubi kayu pada tahun 2016.

Produksi Ubi Jalar di Provinsi Gorontalo sebesar 556 ton umbi basah di bandingkan dengan produksi pada tahun 2015 sebesar 1,435 ton umbi basah turun sebesar 61,27 % hal ini disebabkan karena karena luas panen pada tahun 2016 menurun sebesar 87% sehingga menyebabkan turunnya angka produksi pada ATAP 2016, Naiknya angka produksi pada ATAP 2015 karena Luas panen sebesar 1435 ha, namun jika dibandingkan dengan tahun 2014 untuk ATAP 2015 turun hal ini disebabkan menurunnya pengaruh minat petani untuk menanam ubi jalar secara swadaya.

Selain komoditi pangan, sektor pertanian juga mengembangkan komoditi hortikultura, antara lain Cabai, Sayuran, Buah-buahan , Tanaman Hias dan Biofarmaka.

Tabel 2.151

Capaian Produksi Komoditi Hortikultura Tahun 2012 – 2016

KOMODITI HORTIKULTURA	CAPAIAN PRODUKSI (TON)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cabai	11.834	12.782	11.772	8.238	11.484
Sayuran	47.173	44.032	35.515	26.489	32.345
Buah-Buahan	12.952	14.671	18.182	24.596	13.065
Tanaman Hias (Tangkai, kg/phn)	26.852	65.325	48.026	1.187	595

Tan. Biofarmaka	186	121	126	24	126
-----------------	-----	-----	-----	----	-----

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Gorontalo, 2017 (ATAP, 2016)

Pada umumnya komoditi sayuran di tahun 2016 mengalami peningkatan luas panen dan produksi jika di bandingkan dengan Tahun 2015. Cabe rawit produksinya meningkat di tahun 2016 sebesar 11.484 ton jika dibandingkan dengan tahun 2015 8.238 ton, karena adanya bantuan benih cabe rawit dari tahun 2015 sebanyak 346 Ha dan kemudian tahun 2016 mendapatkan bantuan sebesar 410 Ha melalui dana APBN maupun APBN-P yang didistribusikan di semua Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo. Selain bantuan cabe dan bawang merah ada pula bantuan untuk tanaman sayuran dataran rendah, seperti tomat, kangkung, terung dan lain-lain. Peningkatan produksi hortikultura di Tahun 2016 disebabkan adanya bantuan selain bibit ada pula bantuan fasilitas sarana produksi seperti pupuk dan pompa air yang digunakan untuk penyiraman tanaman. Selain bantuan, peningkatan produksi di pengaruhi oleh cuaca yang mendukung untuk pertanaman hortikultura di beberapa Kab/Kota.

Komoditi buah –buahan seperti Alpukat, Duku, Durian, Mangga dan Rambutan adalah tanaman buah tahunan yang ada di semua Kabupaten kota se provinsi Gorontalo. Akan tetapi ada jenis tanaman buah – buahan yang pernah mendapat perhatian dari pemerintah untuk di budidayakan lebih dan teralokasikan sesuai dengan karekter buahnya cocok untuk di budidayakan. Seperti buah jeruk dan rambutan di alokasikan di Kabupaten pohuwato, yaitu di kecamatan Randangan dan Dulupi yang pernah mendapatkan bantuan bibit jeruk dan rambutan sejak tahun 2010, dan Kabupaten Gorontalo Utara, untuk Tanaman jeruk, rambutan, durian dan mangga. Dan di tahun 2015 dan 2016 sudah bisa nampak hasilnya seperti jeruk produksinya 1.723 ton dan luas panen 60 ha. Rambutan 438 ton, Durian 1.436 ton, mangga 21.69 ton. Sedangkan buah pepaya, pisang dan melon paling banyak produksinya di Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Gorut dan Bone bolango. Buah pisang produksinya 7.498 ton dan pepaya produksinya 729 ton. Komoditi buah-buahan pelaporan hasil per triwulan, berbeda dengan tanaman sayuran, karena hasil buah-buah baru bisa dilihat per musimnya.

Tanaman biofarmaka seperti kunyit, jahe, temulawak, dan lainnya, pada umumnya dibudidayakan dalam spot-spot kecil, hanya untuk melengkapi tanaman apotik hidup atau tanaman pekarangan bagi masyarakat Gorontalo, belum di budidayakan secara lebih luas (seperti dalam kebun) yang berada di luar daerah. Akan tetapi untuk tanaman

biofarmaka sudah ada batuan dari Dinas Pangan melalui dana APBN sejak Tahun 2010 yaitu KRPL (kawasan rumah pangan lestari) dimana tanaman hortikultura khususnya biofarmaka ini untuk di budidayakan lebih, sehingga untuk tanaman jahe, lempuyang, kunyit ada yang sudah membudidayakan lebih untuk di perjual belikan, baik sebagai rempah maupun sebagai jamu kesehatan. Adapun produksi jahe di tahun 2016 yaitu 82.968 kg, laos/lengkuas yaitu 1.168 kg dan produksi kunyit 53.894 kg.

Tanaman biofarmaka yang di tanam lebih dan telah menjadi home industri pembuatan jamu tradisional terdapat di Kabupaten Gorontalo dan Boalemo dan kab. Gorontalo Utara. Pada Tahun 2013 – 2015 petani di Kabupaten Gorontalo utara pernah kerja sama dengan PT. Sido muncur untuk pembudidayaan tanaman biofarmaka seperti jahe dan kunyit.

Sentra Tanaman Hias berada di Kota Gorontalo. Ada beberapa komoditi yang cukup tinggi pada jumlah produksinya di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu komoditi tanaman euphorbia dan sansevieria (pedang – pedangan). Rata – rata terjadi penurunan luas panen terbesar pada komoditi Tanaman Hias di Kota Gorontalo pada heliconia (pisang – pisang) 60%, palem 59% dan caladium 52%. Pada tahun 2014 terdapat pengembangan pada Tanaman Hias di Provinsi Gorontalo untuk menjadi hiasan di tiap rumah, namun di tahun 2015 terjadi penurunan disebagian besar komoditi Tanaman Hias disebabkan kebanyakan Tanaman Hiasnya sudah tua sehingga tidak dijual serta banyaknya bantuan namun tanaman yang ada belum ada dalam format SP Tanaman Hias. Untuk di tahun 2017 di Kota Gorontalo berupaya kembali dalam mengembangkan Tanaman Hias.

Perkebunan

Dilihat dari sektor perkebunan, Provinsi Gorontalo memiliki hasil perkebunan yang cukup potensial. Hasil tanaman perkebunan Provinsi Gorontalo meliputi tanaman kelapa, kakao, kopi, cengkeh, pala, jambu, kacang mete, jagung, ubi kayu dan lainnya. Jika dilihat dari luas kawasan perkebunan dengan komoditi perkebunan yang cukup mendominasi dalam hal ini tanaman kelapa, cengkeh, tebu, kakao, untuk tahun 2016 mencapai 100.001 Ha.

Tabel 2.152

Peningkatan Luas Areal (Ha) Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2012-2016

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016

1	Kelapa Dalam	65.664	64.802	66.695	66.715	67.495
2	Cengkeh	8.880	9.370	9.670	9.091	10.350
3	Tebu	10.228	7.768	7.301	7.719	7.049
4	Kakao	12.928	13.692	14.205	14.494	15.107
	Total	97.700	95.632	97.871	98.019	100.001

Sumber : Data Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017

Produktivitas komoditi perkebunan menunjukkan adanya kecenderungan fluktuatif. Produktivitas tanaman kelapa misalnya, yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Produksi Kelapa tahun 2015-2016 terjadi penurunan hingga mencapai 54.865 ton. Penurunan Produksi ini disebabkan antara lain karena musim kemarau panjang. Disamping itu, tidak adanya regenerasi terhadap tanaman kelapa, sehingga tanaman kelapa kurang produktif. Lain halnya dengan komoditi cengkeh yang mengalami peningkatan produksi rata-rata 0,04 persen pertahun, untuk produksi tebu mengalami peningkatan rata-rata 0.13 persen pertahun. Sementara untuk produksi kakao terjadi penurunan rata-rata 0,08 persen pertahun.

Tabel. 2.153

Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2012-2016

NO	JENIS KOMODITI (Ton)	JENIS KOMODITI					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kelapa Dalam	61.192	63.386	63.499	52.034	54.865	
2	Cengkeh	772	756	756	604	609	
3	Tebu	32.521	49.333	49.333	49.147	33.745	
4	Kakao	3.923	5.043	5.043	2.948	4.814	

Sumber : Data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017.

Peternakan

Pertumbuhan populasi ternak yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta di Gorontalo, selama periode tahun 2012-2017 melalui fasilitasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah menurut komoditas ternak unggulan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.154

Perkembangan Populasi Ternak di Gorontalo Tahun 2012 – 2016

NO	Jenis Ternak	Tahun/Years (ekor)				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.	Ayam Buras	997.183	1.379.645	1.335.806	1.376.518	1.440.567
2.	Sapi Potong	202.974	174.858	192.229	199.743	211.954
3.	Kambing	94,679	83.472	82.205	86.344	93.274

Sumber : Data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa untuk Populasi Sapi dan Kambing mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terjadi penurunan populasi di tahun 2013-2015, disebabkan karena beberapa hal diantaranya karena penyakit ternak seperti antrax atau cacingan. Disamping itu faktor cuaca panas (heat stress) atau Kemarau panjang yang mengakibatkan ketersediaan hijauan sebagai pakan utama sapi jauh berkurang, sehingga produktifitas ternak menurun. Namun demikian jumlah populasi tahun 2016 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 211.954 ekor ternak sapi dan 93.274 untuk ternak kambing. Sementara untuk ternak ayam buras selama kurun waktu 5 tahun, mengalami peningkatan populasi dari tahun ke tahun hingga tahun 2016 mencapai 1.440.567. Namun untuk tahun 2014 populasi ayam buras sedikit mengalami penurunan, disebabkan karena serangan penyakit Avian influenza (AI) pada ternak ayam.

Potensi pengembangan disektor peternakan Provinsi Gorontalo juga didukung oleh faktor pendukung lainnya, seperti ketersediaan sumber pakan ternak yang sangat besar, kelembagaan kelompok peternak, sumber air dan iklim yang cocok dengan budidaya ternak.

Salah satu Indikator dari agregasi peningkatan populasi dengan peningkatan produktifitas ternak dapat dicitrakan melalui gambaran dari peningkatan produksi hasil ternak. Perkembangan peningkatan produksi ternak pada periode tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.155
Perkembangan Produksi Daging di Gorontalo Tahun 2012 – 2016

NO	Produksi Daging	Tahun/Years (ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ayam Lokal	184	1.513	1.397	2.037	1.621
2.	Sapi	4.051	3.618	3.012	2.553	752
3.	Kambing	95	178	177	158	80

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2016

Dari sisi produksi daging sapi target sasaran tiap tahunnya meningkat antara lain : daging sapi rata-rata meningkat 2% per tahun, Kambing rata-rata pertahunnya 5,98% dan Ayam buras rata-rata pertahun 16,99%. Selain komoditi sapi, kambing, dan ayam, ada juga hasil produksi daging dari ternak lain, yaitu ayam pedaging, ayam ras petelur dan itik yang dapat berpengaruh pada jumlah konsumsi daging masyarakat. Hasil perkembangan Produksi daging ternak cenderung menurun disebabkan harga daging mahal sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat sangat kurang.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dari PDRB, yaitu sebesar 27,63 %. Perhitungan PDRB sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor penopang yaitu : Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Tabel 2.156
Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun Dasar 2010 Provinsi Gorontalo (persen), 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	28,74	28,64	28,59	27,58	27,63
	a. Tanaman Pangan	20,07	20,18	20,35	19,31	19,44
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,36	0,35	0,33	0,35	0,35
	c. Perkebunan Semusim	0,38	0,38	0,33	0,29	0,29
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,35	2,27	2,38	2,50	2,42
	e. Perkebunan Tahunan	2,68	2,60	2,45	2,41	2,34
	f. Peternakan	2,48	2,47	2,35	2,32	2,41
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Cakupan bina kelompok petani

Jumlah kelompok tani yang ada di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebanyak kelompok tani yang terdiri dari jumlah kelompok tani kelas pemula yaitu sebanyak 3.451 atau sebanyak 51,67%, Jumlah kelompok lanjut sebanyak 289 kelompok tani atau sekitar 4,32 %, jumlah kelompok tani madya sebanyak 7 kelompok tani atau sekitar 0,10 %, sedangkan untuk kelompok tani kelas utama belum terbentuk.

**Tabel 2.157**

Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Tingkatan Kelas Kelompok Tahun 2017

No	Wilayah		Per-Kelas (Sudah Dikukuhkan)				Jumlah Sudah Dikukuhkan	Jumlah Belum Dikukuhkan	Jumlah Poktan	Jumlah Poktan KWT	Anggota Poktan				Jumlah Anggota
	Kode	Nama	Pemula	Lanjut	Madya	Utama					Pria	Wanita	Pemilik	Penggarap	
1	75.01	Kabupaten Gorontalo	1145	186	6	-	1337	782	2119	52	30752	1476	24834	7234	32228
2	75.02	Kabupaten Boalemo	890	24	-	-	914	448	1362	11	14556	736	12564	2728	15292
3	75.03	Kabupaten Bone Bolango	446	18	-	-	464	337	801	95	10210	1554	8614	2522	11764
4	75.04	Kabupaten Pohuwato	560	27	-	-	587	796	1383	55	14770	260	11727	2996	15030
5	75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	256	-	-	-	256	494	750	9	9929	740	10081	562	10669
6	75.71	Kota Gorontalo	154	34	1	-	189	75	264	34	3736	967	1339	1269	4703
Total			3.451	289	7	-	3.747	2.932	6.679	256	83.953	5.733	69.159	17.311	89.686

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Simbangluh) 2017

Tabel 2.158

Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Tingkatan Kelas Kelompok Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2017

No	Wilayah		Per-Kelas (Sudah Dikukuhkan)				Jumlah Sudah Dikukuhkan	Jumlah Belum Dikukuhkan	Jumlah Poktan	Jumlah Poktan KWT	Anggota Poktan				Jumlah Anggota
	Kode	Nama	Pemula	Lanjut	Madya	Utama					Pria	Wanita	Pemilik	Penggarap	
1	75.01	Kabupaten Gorontalo	1033	182	6	-	1221	722	1943	3	29319	1118	23484	6953	30437
2	75.02	Kabupaten Boalemo	863	24	-	-	887	400	1287	1	14273	698	12271	2700	14971
3	75.03	Kabupaten Bone Bolango	306	16	-	-	322	180	502	-	8131	104	6010	2225	8235
4	75.04	Kabupaten Pohuwato	528	27	-	-	555	678	1233	8	13950	155	11144	2961	14105
5	75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	233	-	-	-	233	439	672	-	9589	650	9687	552	10239
6	75.71	Kota Gorontalo	28	21	1	-	50	14	64	-	2022	64	851	1235	2086
Total			2.991	270	7	-	3.268	2.433	5.701	12	77.284	2.789	63.447	16.626	80.073

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Simbangluh) 2017

Tabel 2.159

Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Tingkatan Kelas Kelompok Sub Sektor Hortikultura Tahun 2017

No	Wilayah		Per-Kelas (Sudah Dikukuhkan)				Jumlah Sudah Dikukuhkan	Jumlah Belum Dikukuhkan	Jumlah Poktan	Jumlah Poktan KWT	Anggota Poktan				Jumlah Anggota
	Kode	Nama	Pemula	Lanjut	Madya	Utama					Pria	Wanita	Pemilik	Penggarap	
1	75.01	Kabupaten Gorontalo	61	3	-	-	64	27	91	49	943	331	1071	203	1274
2	75.02	Kabupaten Boalemo	8	-	-	-	8	5	13	9	32	8	36	4	40
3	75.03	Kabupaten Bone Bolango	88	1	-	-	89	68	157	78	1219	1233	2174	278	2452



No	Wilayah		Per-Kelas (Sudah Dikukuhkan)				Jumlah Sudah Dikukuhkan	Jumlah Belum Dikukuhkan	Jumlah Poktan	Jumlah Poktan KWT	Anggota Poktan				Jumlah Anggota
	Kode	Nama	Pemula	Lanjut	Madya	Utama					Pria	Wanita	Pemilik	Penggarap	
4	75.04	Kabupaten Pohuwato	12	-	-	-	12	39	51	45	227	67	259	35	294
5	75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	7	-	-	-	7	7	14	7	80	68	145	3	148
6	75.71	Kota Gorontalo	24	2	-	-	26	6	32	9	261	261	488	34	522
Total			200	6	-	-	206	152	358	197	2.762	1.968	4.173	557	4.73

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Simbangluh) 2017

Tabel 2.160
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Tingkatan Kelas Kelompok
Sub Sektor Perkebunan Tahun 2017

No	Wilayah		Per-Kelas (Sudah Dikukuhkan)				Jumlah Sudah Dikukuhkan	Jumlah Belum Dikukuhkan	Jumlah Poktan	Jumlah Poktan KWT	Anggota Poktan				Jumlah Anggota
	Kode	Nama	Pemula	Lanjut	Madya	Utama					Pria	Wanita	Pemilik	Penggarap	
1	75.01	Kabupaten Gorontalo	5	1	-	-	6	10	16	-	357	-	279	78	357
2	75.02	Kabupaten Boalemo	16	-	-	-	16	1	17	-	251	30	257	24	281
3	75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	-	-	-	18	6	24	-	447	2	430	19	449
4	75.04	Kabupaten Pohuwato	8	-	-	-	8	27	35	-	310	14	324	-	324
5	75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	-	-	11	5	16	-	249	7	249	7	256
6	75.71	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			58	1	-	-	59	49	108	-	1.614	53	1.539	128	1.667

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Simbangluh) 2017

Tabel 2.161
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Tingkatan Kelas Kelompok
Sub Sektor Peternakan Tahun 2017

No	Wilayah		Per-Kelas (Sudah Dikukuhkan)				Jumlah Sudah Dikukuhkan	Jumlah Belum Dikukuhkan	Jumlah Poktan	Jumlah Poktan KWT	Anggota Poktan		Jumlah Anggota
	Kode	Nama	Pemula	Lanjut	Madya	Utama					Pria	Wanita	
1	75.01	Kabupaten Gorontalo	44	-	-	-	44	23	67	-	133	27	-
2	75.02	Kabupaten Boalemo	3	-	-	-	3	42	45	1	-	-	-
3	75.03	Kabupaten Bone Bolango	14	1	-	-	15	73	88	-	264	18	-
4	75.04	Kabupaten Pohuwato	12	-	-	-	12	52	64	2	283	24	-
5	75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	5	-	-	-	5	43	48	2	11	15	-
6	75.71	Kota Gorontalo	38	4	-	-	42	25	67	-	638	35	-
Total			116	5	-	-	121	258	379	5	1.329	119	1.448

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Simbangluh) 2017

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Petani dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas maka peran penyuluh sangat penting untuk menunjang hal tersebut. Berikut rekapan jumlah penyuluh Provinsi Gorontalo tahun 2016.

Tabel 2.162
Rekapan Jumlah Penyuluh Provinsi Gorontalo Tahun 2016

NO	Wilayah	Penyuluh PNS	Honor		Penyuluh Swadaya	Penyuluh Swasta	Jumlah
			THL - APBN	THL-APBD			
1	BPTP	4	0	0	0	0	4
2	Provinsi Gorontalo	2	0	0	0	0	2
3	Boalemo	54	23	19	80	0	176
4	Gorontalo	115	29	0	73	0	217
5	Pohuwato	74	12	0	86	0	172
6	Bone Bolango	80	28	14	65	1	188
7	Gorontalo Utara	34	7	34	57	0	132
8	Kota Gorontalo	21	2	4	31	0	58
JUMLAH		382	101	71	392	1	949

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.3.3 Urusan Kehutanan

Untuk bidang kehutanan isu yang masih dihadapi saat ini adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan dan lahan untuk kepentingan non kehutanan, baik berupa perambahan hutan, pencurian kayu (*illegal logging*), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang, isu perubahan iklim serta rendahnya pemanfaatan nilai hasil hutan non kayu. Luas lahan kritis Provinsi Gorontalo saat ini adalah 706.930 Ha, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.163
Sebaran Lahan Kritis Per Kabupaten/Kota sampai dengan 2016
Di Provinsi Gorontalo

LOKASI	KRITERIA LAHAN KRITIS (Ha)			TOTAL
	SK	K	AK	
Kab. Gorontalo Utara	46.970	21.892	68.728	137.590
Kab. Gorontalo	62.398	27.629	69.463	159.491
Kab. Boalemo	32.908	24.812	65.746	123.467
Kab. Pohuwato	24.725	26.128	148.670	199.523
Kab. Bone Bolango	33.818	9.803	38.723	82.344
Kota Gorontalo	2.102	324	2.090	4.515

JUMLAH	202.921	110.589	393.421	706.930
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Gorontalo, 2013.

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis di dalam dan di luar kawasan hutan, maka sebaran areal lahan kritis terluas berada di dalam kawasan hutan, yaitu 397.729 Ha.

Tabel 2.164
Luas Lahan Kritis Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan
Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Jenis Kawasan	Luas Lahan Kritis (Ha)
1.	Dalam Kawasan Hutan	397.729
2	Luar Kawasan Hutan	309.201
	Jumlah	706.930

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Gorontalo. 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan laju kerusakan hutan adalah pelestarian dan pemanfaatan hutan secara lestari. Upaya tersebut di antaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara dan menjaga ekosistem hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan mereka serta generasi dimasa yang akan datang. Upaya penegakan hukum juga dilakukan, terutama ditujukan bagi para pelaku praktek hutan dan lahan illegal. Semua upaya tersebut bertujuan untuk mengendalikan tingkat kerusakan ekosistem hutan dan lahan, sekaligus merupakan bagian dari aksi mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim global.

Masih tingginya tingkat kerusakan hutan, berpengaruh secara langsung terhadap produksi hasil hutan. Pada tahun 2015 – 2016, jumlah produksi atas ketiga komoditi hasil hutan, yaitu kayu bulat, kayu gergajian dan hasil hutan non kayu mengalami penurunan hingga 46,54%. Data jumlah produksi hasil hutan di Provinsi Gorontalo selama periode 2012 hingga 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.165
Produksi hasil Hutan Provinsi Gorontalo

No	Jenis Produksi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kayu Bulat (m ³)	5.029,26	21.722,44	60.764,61	26.410,93	6.820,76
2.	Kayu Gergajian (m ³)	1.958,68	15.206,06	21.267,71	17.167,10	4.433,94
3.	Non Kayu (Ton)	11.336,00	1.147,00	880,00	750,00	705,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2016.

2.4.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi

Kondisi kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430,69 MW dan perkiraan beban puncak 330 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri, daya terpasang saat ini adalah sebesar 85,60 MW dan daya mampu 60 MW dengan beban puncak 90 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 240.150 pelanggan, dimana persentase pelanggan terbesar berasal dari sektor rumah tangga (93,30%). Pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8,6-10 persen, dengan rasio elektrifikasi sebesar 78,16 persen. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.997 Kms dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 327 Kms, dengan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, beberapa upaya penyediaan energi listrik telah dilaksanakan. Salah satu upayanya yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) *Duel Fuel* Gorontalo yang berlokasi di Kecamatan Paguat-Kabupaten Pohuwato. Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas sebesar 2x50 MW dan telah beroperasi sejak tahun 2016. Di samping itu, dibangun juga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Molotabu-Kabupaten Pohuwato dengan kapasitas 2x12 MW; dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek-Kabupaten Gorontalo Utara dengan kapasitas 2x25 MW. Upaya ini dilakukan dalam rangka menutupi defisit listrik di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan rasio elektrifikasi.

Pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan pemanfaatan pembangkit berbasis energi baru terbarukan lainnya merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 dimana pada tahun 2025, penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25 persen dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru

terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (*avoided fossil energy cost*).

Tabel 2.166

Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang Dan Listrik Terjual
Menurut Bulan di Provinsi Gorontalo, 2012-2016

Tahun	Jumlah Pelanggan	Daya	Listrik
		Terpasang (KVA)	Terjual (MWH)
2012	149.799	153.537	25.512
2013	178.970	185.403	27.886
2014	198.970	202.504	33.534
2015	217.578	226.188	35.164
2016	240.150	227.628	37.128

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Provinsi Gorontalo, 2016

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2016, jumlah pelanggan listrik mengalami peningkatan hingga 12,6 persen pertahunnya. Tahun 2016 jumlah pelanggan listrik sebanyak 240.150 pelanggan, dengan daya terpasang 227.628 KVA. Sampai dengan tahun 2016 total listrik yang terjual sebesar 159.224 MWH.

Sementara daya terpasang menurut unit operasi untuk tahun 2015, tertinggi berada di PLTD Telaga dengan daya terpasang sebesar 23.500 KVA, daya mampu 14.500 KVA, dan beban puncak 14.500 KVA. Total daya terpasang di seluruh Pembangkit listrik tahun 2015 sebesar 87.950 KVA, beban puncak sebesar 87.950 KVA, sementara daya mampu pembangkit listrik di provinsi gorontalo sebesar 72.420 KVA

Tabel 2.167

Daya Terpasang, Daya Tampung, Dan Beban Puncak Menurut
Unit Operasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2015

No	Unit Operasi	Daya Terpasang (KVA)	Daya Mampu (KVA)	Beban Puncak (KVA)
1.	PLTD Telaga	23.500	14.500	14.500
2.	PLTD Tilamuta	1.650	450	450
3.	PLTD Marisa	1.350	1.200	1.200
4.	PLTD Lemito	875	300	300
5.	PLN Cabang	350	320	320
6.	PLTMH Mongango	1.200	1.100	1.100
7.	PLTBm Pulubala	500	5.000	5.000
8.	PLTS Pulubala	45	5.000	5.000
9.	Sewatama I	5.000	5.000	5.000
10.	Sewatama III	5.000	5.000	5.000

11.	Sewatama IV	10.000	10 00	10.000
12.	PLTD Isimu 1	5.000	6 000	6.000
13.	PLTD Isimu	2.000	800	800
14.	PLTD Paguat	5.000	7.000	7.000
15.	Taludaa 1 dan 2	5.300	2.000	2.000
16.	Molotabu	21.000	24.000	24 000
	2015	87.950	72.420	87.950
	2014	87.450	59.270	87.450
	2013	82.450	71.780	82.450
	2012	78.595	49.780	78.595

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Provinsi Gorontalo, 2016

Masalah yang masih dihadapi di bidang Energi adalah masih rendahnya pemanfaatan potensi energy baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama kepada mereka yang berada dipelosok, pesisir dan pulau-pulau yang sulit terjangkau dengan jaringan On Grid. Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air \pm 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Hal ini memperkuat penyediaan pembangkit listrik alternative dan atau sumber energy lainnya yang sesuai dengan potensi sumber alam di gorontalo.

Sumber Daya Mineral

Disektor pertambangan saat ini jumlah perusahaan pertambangan di provinsi gorontalo adalah sebanyak 39 buah terdiri dari kontrak karya 2 buah dan IUP 37 buah. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral lebih dititikberatkan pada tertib administrasi perizinan serta pengelolaan mineral secara sustainable dan berwawasan lingkungan.

Selain itu Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sangat kecil, untuk tahun 2016 hanya sebesar 1,2 persen terjadi penurunan dibanding tahun 2012 sebesar 1,46 persen, yang terdiri dari 0,23 persen dari pertambangan bijih logam, dan 1,09 persen dari pertambangan/penggalan lainnya.

Tabel 2.168

Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertambangan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun Dasar 2010 Provinsi Gorontalo, 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Pertambangan dan Penggalan	1.46	1.38	1.32	1.32	1.2
	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	

	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	
	Pertambangan Bijih Logam	0.34	0.3	0.26	0.23	0.19
	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.12	1.08	1.06	1.09	1

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.3.5 Urusan Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan ekspor Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berbagai komoditi unggulan Provinsi Gorontalo menjadi komoditi ekspor seperti Kayu, Jagung dan Gula. Tahun 2015 volume ekspor mencapai 144.291.000 Kg dengan nilai ekspor US\$ 31.311.664, besaran ini mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang hanya sebesar 72.173.015 Kg atau US\$ 12.557.708, dengan besaran masing-masing komoditi sebagai berikut :

Tabel 2.169
Perkembangan Ekspor Menurut Komoditi
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

No	Jenis Komoditi	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015	
		Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)
1	Kayu	139.165.00	197.535.74	108.582.00	4.068.950.00	61.028.00	85.412.80	655.500.00	261.622.00
2	Ikan Kerapu Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ikan Layang Beku	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ikan Tuna	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mutiara	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kepiting	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bungkil Kopra	-	-	17.293.200.00	4.016.650.00	6.000.000.00	840.000.00	-	-
8	Minyak Kelapa Kasar	-	-	13.296.200.00	3.096.650.00	-	-	-	-
9	Jagung Kuning	29.300.010.00	7.360.900.00	-	-	32.600.000.00	8.552.358.00	109.599.500.00	26.751.599.00
10	Tepung Kelapa	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gula Tetes	42.733.840.00	4.999.273.00	8.500.00	1.105.000.0	33.947.232.00	5.583.115.7	34.036.000.00	4.298.443.00
12	Rotan Polis	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Arang Tempurung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sapi	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Jenis Komoditi	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015	
		Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)
15	Besi & Baja, Perelatan dari besi dan baja	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		72,173,015.00	12,557,708.74	30,706,482.00	12,287,250.00	72,608,260.00	14,220,886.49	144,291,000.00	31,311,664.00

Sumber : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo, 2016

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Selama kurun waktu 2012-2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai sektor perdagangan, yang mengalami peningkatan rata-rata 0,16 persen pertahunnya.

Tabel 2.170

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2012 – 2016 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Indikator	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1.954,36	9,94	2.271,11	10,26	2.624,85	10,42	2.997,64	10,50	3.484,22	10,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.3.6 Perindustrian

Pertumbuhan Industri

Perkembangan sektor industri di Provinsi Gorontalo saat ini sudah cukup baik. Tahun 2012 industri kecil menengah Provinsi Gorontalo berjumlah 12.360 unit usaha, dengan tenaga kerja berjumlah 31.910 orang, nilai produksi Rp.510.021.820.000. Jumlah IKM ini terus mengalami kenaikan, dimana tahun 2015 sebanyak 14.082 unit usaha, atau bertambah 1.722 unit, dengan nilai investasi sebesar Rp. 174 Milyar Rupiah. Sementara untuk nilai produksi mengalami peningkatan 5,79 persen hingga tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016, daya serap tenaga kerja pada sektor industry mencapai 35.276 orang pekerja.

Tabel 2.171

Pertumbuhan Industri Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 - 2016

NO	TAHUN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BB/BP	NILAI TAMBAH
----	-------	------------	--------------	-----------------	----------------	-------------	--------------

			P	W	TOTAL	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)
1	2	3			4	5	6	7	8
1	2012	12.360			31.910	132.942.851	510.021.820	266.577.831	243.443.989
2	2013	12.921			34.564	134.144.956	476.005.172	267.263.498	208.741.676
3	2014	13.688			36.978	150.230.361	530.844.551	307.273.643	223.570.908
4	2015	14.082	17.229	11.643	35.276	174.058.072	539.536.681	310.919.948	230.336.733

Sumber : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo, 2016

Tabel 2.172
Pertumbuhan Industri Menurut Kab/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	UNIT USAHA	TENAGA KERJA			NILAI INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BB/BP	NILAI TAMBAH
			P	W	TOTAL				
1	2	3			4	5	6	7	8
1	KOTA GORONTALO	2894			6404	42732327	149115919	87404392	61711527
2	KAB.GORONTALO	3135	4725	4.431	9156	66688811	184378232	110342737	74035495
3	KAB.BOALEMO	701	1466	683	2149	4731744	19392436	5283694	14108742
4	KAB.POHUWATO	2713	3095	2.824	5919	43058167	90889204	65672226	25016978
5	KAB.BONE BOLANGO	2587	5353	1028	6381	5324224	19487405	11197225	8290181
6	KAB.GORONTALO UTARA	2099	2.59	2677	5267	11522799	76473485	29299674	47173811

Sumber : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo, 2016

Cakupan bina kelompok pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin sampai dengan tahun 2015 sebanyak 2.836 kelompok pengrajin dengan capaian 3.7 % dari 106 kelompok yang telah menerima bantuan.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Sektor Industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang juga cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, dari total pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebesar 6,52 persen di tahun 2016, sektor Industri menyumbangkan pertumbuhan sebesar 0,26 persen poin. Meskipun masih relatif rendah, namun kontribusinya terhadap penyusunan PDRB Gorontalo cenderung meningkat dalam kurun 2012-2016, yaitu dari 4,06 persen (2012) menjadi 4,19 persen (2016). Meskipun perlahan, namun peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor ini mengalami geliat yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Dalam kurun waktu yang sama, laju pertumbuhan sektor ini cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan

total. Tercatat hanya pada tahun 2014 dan 2015 laju pertumbuhan sektor industri di bawah pertumbuhan total.

Tabel 2.173
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Tahun 2012 – 2016 (dalam Milyar Rupiah)

NO	INDIKATOR	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	797,72	4,06	887,84	4,01	1.051,50	4,17	1.191,60	4,18	1.33,94	4,19

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.3.7 Urusan Transmigrasi

Di Provinsi Gorontalo terdapat 7 titik lokasi transmigrasi, dengan total penempatan jumlah transmigran sampai dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 395 KK/1039 jiwa transmigran penduduk asal (TPA), sedangkan transmigran penduduk setempat sebanyak 599 KK/1.766 jiwa.

Tabel 2.174
Perkembangan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2011-2016

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	LOKASI/KIMTRANS	DAYA TAMP UNG (KK)	TERP AKAI (KK)	PENEMPATAN TRANSMIGRAN																		TOTAL PENEMPATAN				RENCANA PENEMPATAN										
					TAHUN 2011				TAHUN 2012				TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				JUMLAH				TAHUN 2017				
					TPA		TPS		TPA		TPS		TPA		TPS		TPA		TPS		TPA		TPS		TPA		TPS		TPA		TPS		TPA		TPS		
					KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA	KK	JJWA			
1	Gorontalo					-	-	-	-	-	-	-	-	49	166	51	175	-	-	-	-	15	57	75	271	67	321	18	60	131	544	144	506	-	-		
	Pulubala	1 Ayumolinggo	300	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 Bukit Aren	300	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25		
2	Boalemo																																				
	Paguyaman	3 Huwongo Pangea	250	250	74		76		50		50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124		126		-	-		
	Wonosari	4 Pangea SP-3	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	88	50	193	20	68	4	16	46	156	54	209	-	-		
	Paguyaman Pantai	5 Lito SP-1	270	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	88	26	103	65	256	-	-	75	273	26	103	160	617	-	-
3	Pohuwato																																				
	Taluditi	6 Sandalan	250	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	169	50	203	50	169	50	203	-	-		
4	Gorontalo Utara																																				
	Sumalata Timur	7 Motihelumo	200	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	111	-	-	25	111	25	-		
		JUMLAH			74		76		50	-	50	-	49	166	51	175	-	-	20	88	67	248	190	720	155	625	212	783	395	1039	599	1766	50	25			

Sumber : Dinas PMD, ESDM dan Transmigrasi, 2017

2.4.3.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkapnya yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/thn. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun.

Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo terdiri dari Panjang garis pantai 655,8 Km, dengan rincian pantai utara (Laut Sulawesi) sepanjang 217,7 Km dan pantai selatan (Teluk Tomini) sepanjang 438,1 Km. Luas perairan Gorontalo 50.500 Km², terdiri dari perairan Teluk Tomini 7.400 Km², Laut Sulawesi 3.100 Km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi 40.000 Km² serta Desa pesisir berjumlah 131 Desa, potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengembangan potensi kelautan dan perikanan lainnya.

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan di akui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu :

- WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai Perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya sebesar 595.630 Ton Per tahun ;
- WPP 716 (Laut Sulawesi sampai samudra pasifik bagian utara pulau Halmahera dan irian jaya) Potensi Perikanan Tangkapnya sebesar 630.470 Ton Per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut ;
- Tapi, jika kita pisahkan berdasarkan potensi di wilayah ZEE laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik (bagian Utara Irian Jaya) maka potensi perikanan tangkap sebesar 487.600 ton per tahun atau 21,2 % dari total Potensi perikanan di wilayah ZEE Indonesia yaitu 2,3 juta Ton. Sehingga potensi perikanan di bawah 12 mil sebesar 142.870 ton per tahun.

Tabel 2.175

Potensi Perikanan Tangkap di Wilayah WPP 716 dan ZEE Yang Juga Dimanfaatkan Oleh Provinsi Gorontalo

No	Potensi Perikanan Tangkap WPP 716 dan ZEE Laut Sulawesi	Potensi
----	---	---------

1	Potensi WPP 716 Laut Sulawesi sampai samudra Pasifik bagian sebelah utara pulau halmahera dan irian jaya Termasuk ZEE	630,470	ton/thn
2	Khusus Potensi ZEE Laut Sulawesi sampai bagian utara Irian jaya 21,2 % dari 2,3 Juta Ton Potensi ZEE Indonesia	487,600	ton/thn
3	Potensi Perikanan tangkap WPP 716 di bawah 12 mil (atau selisihnya)	142,870	ton/thn

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2016

Sedangkan untuk perairan umum (danau, dan sungai) potensi perikanan tangkap Gorontalo diperkirakan 900 ton per tahun.

Tabel 2.176

Potensi Perikanan Tangkap Berdasarkan Komoditi Perikanan di Dua WPP dan Potensi Perikanan Budidaya Berdasarkan Kawasan

Komoditi Perikanan	Potensi (Ton/Tahun)		
	WPP Teluk Tomini	WPP Laut Sulawesi	Jumlah
I. Potensi Perikanan Tangkap	595.620	630.470	1.226.090
1. Pelagis Besar	106.510	175.260	281.770
2. Pelagis Sedang / Kecil	379.440	384.750	764.190
3. Demersal	88.840	54.860	143.700
4. Udang Penaeid	900	250	1.150
5. Ikan Karang Konsumsi	12.500	14.500	27.000
6. Lobster	300	400	700
7. Cumi-Cumi	7.130	450	7.580
II. Potensi Perikanan Perikanan Budidaya			339.268
1. Air Tawar			4.218
2. Air Payau			59.770
3. Air Laut			275.280
Total (Ton/Tahun)			1.565.358

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2016

Produksi perikanan

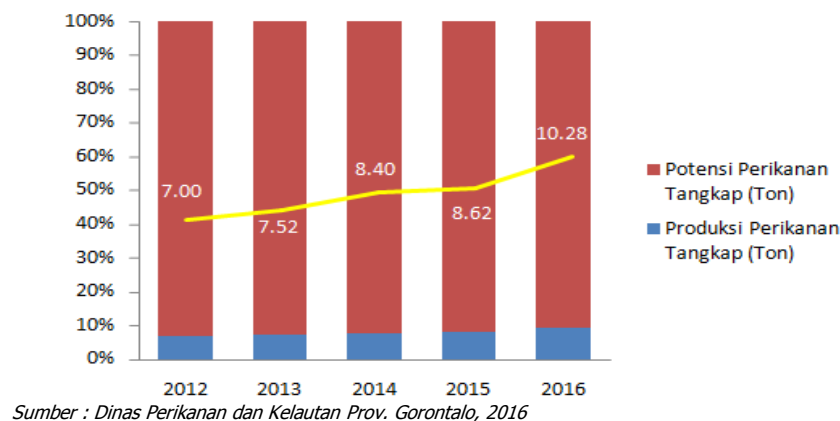
1. Perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan baik diperairan laut maupun di perairan umum (Danau Limboto). Capaian produksi perikanan tangkap dalam kurung waktu lima tahun 2012-2017 mengalami pertumbuhan atau kenaikan rata-rata sebesar 8,04 % per tahun atau dari 85.815 Ton pada tahun 2012 menjadi 126.036 pada tahun 2017. Jika dihubungkan antara target produksi dengan capaian produksi maka persentase capaian di atas 100 % atau rata-rata pertumbuhan persentasenya sebesar 0,05 %.

Sedangkan dilihat perbandingan antara potensi perikanan tangkap yang ada pada dua wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) 715 di laut Teluk Tomini dan (WPP) Laut Sulawesi 716, maka pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo baru sekitar 8,38 % per tahun atau dari 7 % pada tahun 2012 menjadi 10,28 % pada tahun 2016.

Gambar 2.52

Tren Pemanfaatan Potensi Perikanan Tangkap Tahun 2012-2016



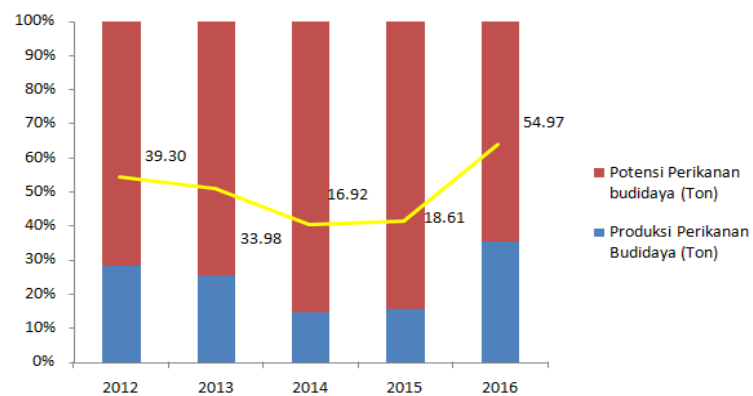
2. Perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya ikan baik diperairan laut, payau maupun di perairan umum (Danau dan sungai). Tahun 2012 sampai tahun 2016 capaian produksi perikanan budidaya cenderung menurun sebesar 0,06 % setiap tahunnya atau dari 133.340 Ton pada tahun 2012 turun menjadi 85,095 Ton pada tahun 2016. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunya produksi rumput laut, dimana rata-rata penurunan setiap tahunnya sebesar 3,77 %. Sedangkan untuk produksi ikan budidaya lebih cenderung meningkat yaitu sebesar 12,71 % per tahun atau dari 26.668 Ton pada tahun 2012 naik menjadi 37.298 Ton pada tahun 2016.

Jika dihubungkan antara target produksi dengan capaian produksi maka persentase produksi perikanan budidaya menurun dari 100 % menjadi 46 % atau rata-rata penurunannya sebesar 8,31 % per tahunnya (Tabel 2.250)

Sedangkan perbandingan antara potensi perikanan budidaya dan capaian yang telah diraih (Exiting), maka pemanfaatan (exiting) sumberdaya perikanan budidaya mencapai 14,96 % atau dari 39,30 % pada tahun 2012 menjadi 54,97 % pada tahun 2016.

Gambar 2.53
Tren Pemanfaatan Potensi Budidaya Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Gorontalo, 2016

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya produksi perikanan budidaya, khususnya produksi rumput laut :

- Faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan timbulnya penyakit ice-ice sehingga mengakibatkan kegagalan panen.
- Kurangnya ketersediaan bibit unggul rumput laut yang sangat dibutuhkan oleh pembudidaya.
- Ada berapa kab yang menjadi sentra produksi rumput laut yang merupakan salah satu penghasil rumput laut sejak tahun 2013 tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk kegiatan budidaya rumput laut.

Faktor-faktor diatas menjadi salah satu penyebab enggannya pembudidaya untuk membudidayakan rumput laut dan beralih ke usaha lain seperti kegiatan penangkapan ikan (bagan)/menjadi nelayan atau melakukan usaha budidaya ikan dan kegiatan pertanian.

3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/pembudidaya (Ton) adalah produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh kelompok nelayan atau pembudidaya yang dibina langsung oleh Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/kota. Produksi Perikanan yang dihasilkan oleh Kelompok Nelayan/ pembudidaya kurung lima tahun rata-rata pertumbuhannya mencapai 12,08 % pertahun atau dari capaian 75.853 ton pada tahun 2012 naik menjadi 120.000 ton pada tahun 2016. Kalau dilihat berdasarkan perbandingan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi produksi, maka terlihat cenderung naik yaitu sebesar 13,59 % per tahun. Produksi ini lebih didominasi oleh produksi ikan baik produksi ikan hasil tangkapan maupun ikan budidaya. Tercapainya Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya pada kurung waktu lima tahun dipengaruhi oleh intervensi anggaran pemerintah yang cukup signifikan terhadap kelompok usaha perikanan pada beberapa program prioritas dan pola pembinaan kelompok yang terintegrasi.

Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan (kg/kap/thn) adalah nilai konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun atau lebih dikenal dengan jumlah produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu tahun. Konsumsi ikan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo dalam pada lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dari 49 kg/kapita pada tahun 2012 menjadi 55 kg/kapita pada tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,55 %. Tapi jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka konsumsi ikan per tahunnya cenderung menurun sebesar 0,77 %, dan ini terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014.

Turunnya persentase tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- Rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya harga ikan dipasaran yang dipengaruhi oleh naiknya harga BBM yang tidak menentu.
- Dipengaruhi juga oleh kurangnya stock ikan khususnya tidak tercapainya produksi ikan budidaya (ikan dan udang) yang hanya mencapai 32.457 ton.

Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok) adalah kelompok perikanan baik kelompok perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan yang mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/kota seperti

pembinaan peningkatan produksi perikanan dan manajemen pengelolaan usaha perikanan serta kelompok yang mendapatkan bantuan sarana produksi perikanan dan Kelompok ini terdiri dari Kube Perikanan dan kelompok wanita pesisir. Realsiasi Cakupan bina kelompok perikanan pada kurung waktu lima tahun mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 11,95 % per tahunnya atau dari 474 kelompok yang dibina pada tahun 2012 menjadi 630 kelompok pada tahun 2016. Begitu pula dengan perbandingan antara target dan realisasi, maka cakupan bina kelompok juga menunjukkan pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 7,46 % per tahunnya.

Produksi perikanan kelompok nelayan

Pendapatan Nelayan (Rp/bln) adalah nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh nelayan dari hasil kegiatan penangkapan ikan, baik kegiatan penangkapan ikan di laut maupun kegiatan penangkapan ikan di perairan umum. Pendapatan nelayan pada periode lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan 7,09 % per tahun atau sebesar Rp. 2,1 juta per bulan pada tahun 2012 menjadi Rp. 2,6 Juta per bulan pada tahun 2016. Naiknya pendapatan nelayan per bulan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama :

- a). Naiknya produksi perikanan tangkap di sebabkan oleh intervensi anggaran pemerintah melalui kegiatan restrukturisasi armada tangkap > 30 GT (kapal Inkamina yang sampai tahun 2016 sudah berjumlah 53 unit kapal inkamina/Minamaritim, dan bantuan sarana produksi berupa perahun fiber > 5 GT dan sarana alat atangkap kepada kelompok perikanan tangkap.
- b). Nilai harga ikan yang cenderung stabil bahkan naik beberapa persen, khususnya pada komoditi perikanan tangkap yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Ikan Tuna, Tongkol dan cakalang. Produk perikanan ini umumnya sebagian kecil di dipasarkan di dalam daerah dan sebagian besar di pasarkan (antar pulau/ekspor) keluar Gorontalo.

Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) adalah nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh pembudidaya dari hasil kegiatan budidaya, baik kegiatan budidaya perikanan laut (ikan dan rumput laut), Budidaya perikanan payau (udang dan bandeng) maupun budidaya perikanan air tawar (Ikan nila, mas, lele dll). Pada tahun 2012-2016, Pendapatan pembudidaya rata-rata per bulannya juga mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 8,94 % atau dari Rp. 1,6 juta per bulan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 2,2 juta per bulannya pada tahun 2016.

Naiknya pendapatan pembudidaya per bulan pada tahun 2014 seiring dengan produksi budidaya rumput laut turun, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Pada daerah tertentu seperti di Kab. Boalemo dan Pohuwato yang merupakan salah satu daerah produksi rumput laut, banyak pembudidaya rumput laut yang beralih ke usaha lain seperti melakukan usaha budidaya laut dan payau (seperti budidaya ikan kerapu dan udang vaname).
- Pengalihan usaha budidaya rumput laut ke usaha budidaya ikan, disebabkan oleh Faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan timbulnya penyakit ice-ice pada rumput laut sehingga mengakibatkan kegagalan panen.
- Produksi Komoditi perikanan budidaya (ikan kerapu dan udang vaname) mengalami kenaikan 150 – 200 % seiring dengan kenaikan harga ikan yang dipengaruhi oleh kenaikan dolar pada tahun 2014-2016.
- Harga ikan seperti udang vaname size 70 (70 ekor/kg) yang tadinya harga normal sebesar Rp. 40.000 /kg naik menjadi Rp.70.000 / kg. Ikan kerapu size 1 kg/hidup yang tadinya harga normalnya Rp. 200.000 /kg naik menjadi Rp. 350.000 /kg.

Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln) nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh pengolah dan pemasar hasil perikanan pada setiap bulan. Pendapatan pengolah dan pemasar rata-rata per bulan kurung waktu tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 10,50 % atau dari Rp. 2,5 juta per bulan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 3,4 juta per bulannya pada tahun 2016. Naiknya pendapatan pengolah dan pemasar per bulan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Nilai harga ikan yang cenderung stabil bahkan naik beberapa persen, khususnya pada komoditi perikanan tangkap yang diolah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Ikan Tuna, Tongkol dan cakalang. Harga ikan tuna utuh misalnya yang tadinya harga dipasar sekitar Rp. 35.000 per kg naik menjadi Rp. 60.000 – Rp. 70.000 per kg atau naik 90 – 100 %. Bahkan kalau di olah menjadi Tuna Loin harganya naik menjadi Rp. 90.000 – 130.000 per kg. ikan Cakalang dan tongkol yang juga merupakan ikan yang mempunyai nilai komoditi tinggi di tingkat pengolah dan pemasaran bahkan mencapai Rp. 20.000 – 25.000 per kg dari Rp. 10.000 – 15.000 per kg.

- Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa nelayan/Pesisir) adalah Jumlah desa nelayan yang diintervensi oleh Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program/kegiatan Pengembangan Desa Nelayan Tangguh. Program/kegiatan PDNT adalah merupakan program yang berbasis desa, dimana Dinas Perikanan dan Kelautan menintervensi beberapa kegiatan utama yang langsung dirasakan oleh nelayan dan wanita pesisir seperti bantuan sarana produksi (perahu fiber, mesin tempel dan katinting, saranaperbengkelan nelayan dan warung serba ada yang dikelola langsung oleh wanita pesisir. Tujuan program/kegiatan ini adalah meningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan nelayan dari sisi ekonomi (peningkatan pendapatan). Desa yang menjadi sasaran PDNT pada lima tahun terakhir adalah 77 desa atau terpenuhi 100 % dari taget yang di tentukan.



Tabel 2.177



Tren Pertumbuhan Kinerja Utama Sektor Perikanan & Kelautan Tahun 2012-2016

No.	BIDANG URUSAN		TREN PERTUMBUHAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN 2012-2016						Rata-Rata Pertumbuhan Persentase Capaian Per Tahun Periode 2012-2017 (%)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	10
	Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	Target	85,815	90,964	97,331	105,118	114,578	126,036	
		Capaian	85,815	92,171	103,018	105,715	114,578	126,036	
		% Capaian	100	101	106	101	100	100	
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun			1	4	-5	-1	0	0.05
2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Target	133,340	144,007	156,248	170,310	186,490	205,139	
		Capaian	133,340	125,655	57,392	63,131	85,095	98,385	
		% Capaian	100	87	37	37	46	48	
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun			-13	-58	1	23	5	-8.31
	- Produksi Ikan Budidaya (Ton)	Target	26,668	28,801	31,250	34,062	37,298	41,028	
		Capaian	26,668	21,730	32,457	26,364	37,298	41,028	
		% Capaian	100	75	104	77	100	100	
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun			-25	38	-25	29	0	3.37
	- Produksi rumput laut (Ton)	Target	106,672	115,206	124,998	136,248	149,192	164,111	
		Capaian	106,672	103,924	24,935	36,767	47,797	57,357	
		% Capaian	100	90	20	27	32	35	
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun			-10	-78	35	19	9	-4.92
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	Jumlah Capaian Produksi	219,155	217,826	160,410	168,846	199,673	224,421	
		Capaian	75,853	82,203	90,847	118,932	110,807	131,627	
		% Capaian	35	38	57	70	55	59	
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun			9	50	24	-21	6	13.59
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	Target Daerah	46.93	49	51	53	55	58.1	
		Capaian	49.4	48.6	46.81	54.8	55	58.1	
		% Capaian	105.3	99.2	91.8	103.4	100.0	100.0	
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun			-6	-7	13	-3	0	-0.77
5	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	Jumlah Kelompok Perikanan	658	700	746	770	805	805	
		Capaian Binaan kelompok	474	467	731	680	630	750	
		% Capaian	72.04	66.71	97.99	88.31	78.26	93.17	
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun			-7	47	-10	-11	19	7.46

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.178
Rata – Rata Capaian Kinerja Utama Sektor Perikanan dan Kelautan 2012 - 2016

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TREN PERTUMBUHAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN 2012-2016						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Rata-Rata Pertumbuhan Capaian Per Tahun Periode 2012-2017 (%)	Rata-Rata Pertumbuhan Target Per Tahun Yang Diharapkan Dalam RPJMD 2012-2017 (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kelautan dan Perikanan									
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		7.41	11.77	2.62	8.38	10.00		8.04	≥ 8.00
1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	133,340	125,655	57,392	63,131	85,095	98,385	98,385		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		-5.76	-54.33	10.00	34.79	15.62		0.06	< 9.00
	- Produksi Ikan Budidaya (Ton)	26,668	21,730	32,457	26,364	37,298	41,028	41,028		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		-19	49	-19	41	10		12.71	> 9.00
	- Produksi rumput laut (Ton)	106,672	103,924	24,935	36,767	47,797	57,357	57,357		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		-3	-76	47	30	20		3.77	< 9.00
	Total Produksi (Tangkap + Budidaya) (Ton)	219,155	217,826	160,410	168,846	199,673	224,421	224,421		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		-0.61	-26.36	5.26	18.26	12.39		1.79	> 8.61
2	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	75,853	82,203	90,847	118,932	120,000	131,627	131,627		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		8.37	10.52	30.91	0.90	9.69		12.08	> 11.76
3	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	49.4	48.6	46.81	54.8	55	58.1	58.1		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		-1.62	-3.68	17.07	0.36	5.64		3.55	< 4.36
4	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	474	467	731	680	630	750	750		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		-1.48	56.53	-6.98	-7.35	19.05		11.95	> 11.83
5	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	2,184,849	2,968,642	2,597,000	2,500,000	2,648,545	2,910,225	2,910,225		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		35.87	-12.52	-3.74	5.94	9.88		7.09	< 8.39
6	Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)	1,667,900	1,790,750	1,975,000	2,470,000	2,278,085	2,500,000	2,500,000		
	<i>Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun</i>		7.37	10.29	25.06	-7.77	9.74		8.94	> 8.51
7	Pendapatan pengolahan dan pemasaran perikanan (Rp./Bln)	2,556,300	2,359,183	3,830,166	3,200,000	3,401,204	3,673,300	3,673,300		

	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun		-7.71	62.35	-16.45	6.29	8.00		10.50	> 8.00
7.9	Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)	6	10	12	14	16	19	77		
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun		66.67	20.00	16.67	14.29	18.75		27.27	= 27.27
7,10	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	105.73	99.98	106.89	98.02	108.4	109.42	109.42		
	Tren Pertumbuhan Capaian Per Tahun		-5.44	6.91	-8.30	10.60	0.93		0.94	> 0.83

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.4 Penunjang Urusan

2.4.4.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana amanat Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengisyaratkan bahwa Pemerintah Baik Pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang baik, terarah dan berkesinambungan, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan dokumen perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana Perda Nomor 3 tahun 2009, tanggal 18 Mei 2009.

Table 2.179

Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Perda RPJPD
1	Provinsi Gorontalo	Perda Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 18 Mei 2009
2	Kota Gorontalo	Perda Nomor 9 tahun 2008, Tanggal 15 Agustus 2008
3	Kabupaten Gorontalo	Perda Nomor 32 Mei 2012, Tanggal 27 Mei 2012
4	Kabupaten Bone Bolango	Perda Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 12 Agustus 2014
5	Kabupaten Gorontalo Utara	Perda Nomor 1 Tahun 2011
6	Kabupaten Boalemo	Perda Nomor 4 Tahun 2012
7	Kabupaten Pohuwato	Perda Nomor 1 tahun 2011, Tanggal 7 Maret 2011

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, 2016

Dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka koordinasi perencanaan dilakukan secara holistic, integrative, tematik dan spasial. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai

dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk mencapai target nasional.

Undang-Undang ini juga menegaskan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan kedalam rencana pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Sinergi perencanaan juga dilakukan antar dokumen perencanaan baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah serta rencana kerja SKPD. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk selalu menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Konsistensi antar dokumen dilakukan melalui forum dan mekanisme tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kedepan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan, akan dioptimalkan melalui aplikasi perencanaan dan penganggaran.

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima Anugerah Pangripta Nusantara, yang diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai Provinsi Terbaik Pemenang Kategori Provinsi dengan Perencanaan Progresif. Selain itu, ditahun yang sama, Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih penghargaan terbaik II nasional untuk kategori laju pencapaian MDGs, dan terbaik III pencapaian indicator MDGs tahun 2013-2015.

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun beberapa dokumen seperti masterplan Kemiskinan, masterplan Infrastruktur, masterplan pangan dan gizi, masterplan pariwisata (Botutonuo-Olele), dan masterplan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam rangka usulan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gopandang, terdapat beberapa hal penting yang harus disiapkan dan dilengkapi antara lain persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Lokasi KEK yang diusulkan, usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK. Selain itu, penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah dan rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung, serta penyusunan dokumen pendukung lainnya seperti : Peta Detail Lokasi Pengembangan serta luasan KEK, Rencana Peruntukan Lokasi KEK yang dilengkapi dengan Peta Zonasi yang telah sesuai dengan RTRW/RDTR Kawasan Industri Anggrek, Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berbagai upaya dimaksud merupakan mekanisme dan tahapan yang dipersyaratkan dalam pengusulan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan belum seluruhnya tuntas sehingga menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan, dalam rangka membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

2.4.4.2 Keuangan

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa :

- Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ;
- Pengungkapan dalam Laporan Keuangan telah cukup memadai untuk pengambilan keputusan para pemakainya ;
- Penyajian Laporan Keuangan bebas dari salah saji material akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku ;
- Sistem Pengendalian Intern telah cukup memadai.

Sesuai hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan 4 kriteria penilaian tersebut, maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dicapai melalui peningkatan kualitas dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah, serta perbaikan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Pemerintah Provinsi terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara lebih transparan, akuntabel dan professional dengan mengoptimalkan pengelolaan aset dan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Selain itu penetapan APBD Provinsi Gorontalo tepat waktu juga menjadi salah satu aspek penilaian BPK. Selama tahun 2012-2016 penetapan APBD selalu tepat waktu yaitu pada bulan desember tahun perencanaan (n-1).

2. Persentase SiLPA terhadap APBD

Sisa anggaran adalah anggaran yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang yang belum terpakai. Selama tahun 2012-2016, persentase SiLPA terhadap APBD fluktuatif. Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan optimalisasi penyerapan anggaran untuk menurunkan besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran, hingga pada tahun 2016 SiLPA pemerintah Provinsi turun hingga sebesar 4,14%. Seperti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.180
Persentase SiLPA terhadap APBD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016

Tahun	Total APBD	Total SiLPA	Persentase SiLPA
2012	997.138.714.103,74	63.968.778.645,91	6,42
2013	1.153.588.794.350,87	92.772.017.448.87	8,04
2014	1.301.821.506.711,41	92.772.017.448.87	7,13
2015	1.476.327.029.068.81	87.002.816.278.86	5,89
2016	1.652.703.594.500.62	68.395.980.920.81	4,14

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2017

3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Peran Pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 (amanademen ke 4) dan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD Provinsi Gorontalo sebesar 20%. Tahun 2013-2014, alokasi pendidikan masih kurang dari 20% karena APBD Provinsi masih focus pada pembiayaan pengadaan lahan untuk penyediaan dan

pembangunan infrastruktur dasar. Tahun 2016 alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 21,84 % atau sebesar Rp. 360.910.043.209,08 dari total APBD Rp. 1.652.703.594.500,62.

Gambar 2.54

Persentase Belanja Pendidikan terhadap Total APBD Provinsi Gorontalo 2012-2016



Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2017

4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Gambar 2.55

Persentase Belanja Pendidikan terhadap Total APBD Provinsi Gorontalo 2012-2016



Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2017

5. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Besaran jumlah bagi hasil APBD Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo setiap tahunnya bervariasi. Namun jika dilihat dari jumlahnya setiap tahunnya terjadi peningkatan, dengan rata-rata peningkatan 24,5% pertahun. Berikut adalah jumlah bagi hasil kepada kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo :

Tabel 2.181
Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016

Tahun	Total APBD	Bagi Hasil Kab/Kota	Persentase bagi Hasil Kab/Kota
2012	997.138.714.103,74	55.182.732.653.00	5.53
2013	1.153.588.794.350,87	78.238.394.300.00	6.78
2014	1.301.821.506.711,41	112.638.501.788.00	8.65
2015	1.476.327.029.068.81	122.823.973.654,00	8,32
2016	1.652.703.594.500.62	126.689.832.177.00	7,67

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2017

2.4.4.3 Penelitian dan Pengembangan

Peran Penelitian Pengembangan dalam pembangunan yaitu dalam rangka mengoptimalkan kebijakan Pelaksanaan pembangunan, mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan menerapkan pola pikir strategis yaitu : merumuskan kebijakan publik yang didasarkan pada hasil kajian, penelitian dan evaluasi yang cermat dan dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Selama tahun 2012-2016 jumlah kajian/penelitian sebanyak 17 kajian dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.182
Hasil Kajian Litbang Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian
Tahun 2012		
1	Pengembangan Desa Mandiri Energi di Kabupaten Bone Bolango	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kotoran ternak menjadi energi listrik
2	Strategi pengembangan Model Implementasi Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo▪ Untuk mengetahui Skenario Pembiayaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo▪ Untuk memberikan gambaran tentang Landasan Hukum yang mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo
3	Penyusunan Grand Disegn Pola Pembangunan Peternakan di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan acuan resmi pengembangan peternakan yang berdaya saing, lintas sub-sektoral/sektoral terkait, lingkup Pemerintah Kabupaten dan DPRD Provinsi Gorontalo.• Menganalisa potensi, kendala, Peluang dan tantangan dalam membangun peternakan di Provinsi Gorontalo.• Menentukan arah, sasaran dan target serta strategi pelaksanaan pembangunan peternakan.• Menyelaraskan program Pusat dengan Daerah.

4	Studi Kelayakan Pengembangan Klaster UMKM berbasis Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengidentifikasi tingkat penggunaan teknologi tepat guna oleh UMKM yang berada di wilayah Kabupaten gorontalo▪ Melakukan pemetaan terhadap UMKM yang berada di Kabupaten Gorontalo berdasarkan tingkat penggunaan teknologi.▪ Melakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi tepat guna pada UMKM yang berada di Kabupaten gorontalo.▪ Menyusun strategi percepatan adopsi teknologi di kalangan UMKM▪ Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah, yang dikaitkan pula dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka peng. klaster UMKM.
5	Analisis dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan terhadap nelayan tradisional	Untuk menggambarkan dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan terhadap nelayan tradisional baik dampak secara individual, kelompok-kelompok nelayan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara
6	Kajian Strategis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan	<ul style="list-style-type: none">▪ Tersusunnya model kelembagaan desa nelayan dan masyarakat yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.▪ Terwujudnya kelembagaan desa nelayan dan masyarakat sebagai kelas belajar mengajar, unit produksi, dan wahana kerjasama bagi para anggotanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.▪ Meningkatnya partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk kaum perempuan, dalam setiap tahapan proses pembangunan berkelanjutan.
Tahun 2013		
1	Studi persepsi masyarakat tentang kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo
2	Model rehabilitasi lahan dalam rangka manajemen lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk mengkaji potensi dan kendala lahan yang didasarkan pada kemampuan dan kesesuaian lahan dan menyusun model rehabilitasi lahan berdasarkan sebaran spasial Zonasi lahan kritis dengan pertimbangan hasil analisis aspek biofisik lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
3	Kajian percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi kepada pemerintah daerah dalam percepatan pelaksanaan SPM di Prov. Gorontalo
Tahun 2014		
1	Pengembangan Prototipe Pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none">▪ Tersedianya 1 (satu) model prototipe pakan ternak
2	Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk Pengembangan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Gorontalo
3	Penyusunan Dokumen Kluster Potensi	<ul style="list-style-type: none">▪ Tersusunnya Dokumen Kluster Sistem Inovasi

	Daerah Provinsi Gorontalo	Daerah (SIDa) Provinsi Gorontalo
4	Pengembangan kreativitas ilmiah dan kerjasama penelitian	▪ Untuk peningkatan kualitas penelitian di Provinsi Gorontalo
5	Studi Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo	▪ Untuk peningkatan kinerja pemerintah di Provinsi Gorontalo
Tahun 2015		
1	Studi Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo	▪ Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo
2	Evaluasi Status Capaian & Implementasi CTI di Provinsi Gorontalo	▪
Tahun 2016		
1	Lanjutan kajian tentang : Studi Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo	▪ Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo

Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo, 2016

2.4.4.4 Pengawasan

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam hal ini sebagai pengawasan internal Pemerintah Provinsi, diperoleh hasil persentase tindak lanjut temuan yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya jumlah temuan yang bertambah dibandingkan dengan jumlah temuan yang ditindak lanjuti.

Tabel 2.183
Persentase Tindak Lanjut Temuan Provinsi Gorontalo tahun 2017

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Tindak Lanjut Temuan	59,9	55,8	56,3	56,7	52,9

Sumber : Inspektorat Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara untuk temuan BPK pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dari Tahun 2012 s/d 2016 adalah sebanyak 177 Temuan.

Tabel 2.184
Jumlah temuan BPK

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Temuan BPK	39	38	24	36	40

Sumber : Inspektorat Provinsi Gorontalo, 2017

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi terus mengalami perbaikan dan perubahan baik dari Aparatur, Kelembagaan dan Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelaksanaan tahun 2016, Provinsi Gorontalo memperoleh Predikat CC, dengan peringkat 25 dari 34 Provinsi se-Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik.

Disamping itu, penilaian terhadap indeks tata kelola pemerintahan yang baik, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-22 dari provinsi se-Indonesia dengan capaian 5,62 persen. Penilaian terhadap indeks tata kelola pemerintahan yang baik mencakup empat arena tata kelola pemerintahan, yakni pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.



Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Tabel 2.185

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2012		2013		2014		2015		2016		Interpre tasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi %	7,71	7,71	7.5 - 7.9	7,76	7.6 - 8	7,74	7.7 - 8.1	6,23	7.8 - 8,3	6,52	<
1.1.2	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	9.309.103	9.562.965	10,109,103	10.839.592	10,909,103	11.991.349	11,709,103	25.183.152,21	12,509,103	27.654.339,5	>
1.1.3	Laju inflasi provinsi (%)	4,08	4,08	4 - 7	5,84	4 - 7	6,14	4 - 7	4,30	4 - 7	1,30	>
1.1.4	Indeks Gini	0.44	0,44	0.42	0,44	0.40	0.41	0.38	0.41	0.36	0.42	<
1.1.5	Persentase penduduk miskin (%)	18,5 - 17	17,33	17 - 16	18,01	16 - 15	17,41	15,5 - 14	18,16	14,5 - 12	17,63	<
1.2	Kesejahteraan Sosial											
1.2.1	IPM	71.26	64,16	71.76	64.70	72.26	65.17	72.76	65,86	73.26	66,29	<



1.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender	55.63	62,08	56.02	60,89	57.55	67,36	58.08	69,26	59.72	-	>
1.2.3	Indeks Pembangunan Gender	61.08	84,54	62,41	84,57	64,35	85,09	65,10	85,87	67,02	-	>
1.2.4	Angka melek huruf	90,00	95	95,50 %	99,68	96,00 %	99,68 %	96,50 %	99,71 %	99,71 %	99,81%	>
1.2.5	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	8.5	8,5	8,62	8	8,70	9	8,80	9,04	9,04	8,93	<
1.2.6	Angka usia harapan hidup	67.16	66,76	67.52	66,92	67.88	67,00	68.24	67,12	67,12	67,13	>
1.2.7	Persentase balita gizi buruk	4.26	3,08	4.03	2,32	3.80	2,32	3.57	5,7	5,7	4,56	>
1.2.8	Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	16.5	14,44	14.22	10,3	14.00	10,86	13.78	24,5	13.56	22,25	<
1.2.9	Angka pengangguran terbuka (%)	4.81	4,44	4.50	4,15	4.25	4,18	4.00	4,65	3.75	2,76	>
PELAYANAN UMUM												
Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib												
2.	PELAYANAN UMUM											
	Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib											
2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.1.1	Pendidikan											
2.1.1.1	Angka partisipasi kasar :											
	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD	40	40,52	49,41	58,06	51.88	47,33	54.47	50,40	83,51	52,91	<
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	129.23	111.04	111,10	114,29	111,15	113.64	111,20	114.23	114.23	111.40	<
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	99.50	96.99	99,70	97,06	99,75	97,82	99,80	98.85	98.85	99,75	>
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	73.60	74.09	78,04	85.18	83,04	88.19	88,09	89.92	89.92	93,54	>
2.1.1.2	Angka Partisipasi Murni :											
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95.00	96.37	97,00	96,37	97,50	100,97	98,00	100,81	100,81	98,34	<



	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75.00	69.99	85,50	71.95	90,50	73.06	92,25	74.80	74.80	75.43	>
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	56.40	55.30	58,00	64.75	64,00	65.87	70,05	71.34	71.34	76,13	>
2.1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah : (Jumlah Sekolah dibagi Jumlah Penduduk Usia Sekolah dikali 10.000)											
	- SD/MI	66.16	68.10	72.00	72.30	72.50	75.21	73.00	71.91	74.00	80.91	>
	- SMP/MTs	50.49	51.79	59.00	63.13	60.00	68.46	60.50	67,18	61.00	62,18	>
	- SMA/MA/SMK	13.94	15.06	15.00	16.34	15.20	27.39	15.50	22.12	15.75	26,57	>
2.1.1.4	Penuntasan Buta Aksara	8000	6.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.600	3.500	2.122	<
2.1.1.5	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80,57	78,05	82,00	84,43	84,00	92,30	85,00	87,00	86,00	87,02	>
2.1.16	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs. SMA/MA dan SMK kondisi bangunan baik :											
	- SMP/MTs	80.04	81,67	82.00	83,03	83.00	96.13	84.00	90.50	85.00	91.00	>
	- SMA/MA	87.33	89,75	88.00	88,81	89.00	90.28	90.00	91.22	91.00	93.00	>
	- SMK	83.05	88,98	84.00	88,62	85.00	93.73	86.00	94.52	87.00	93.60	>
2.1.1.7	Angka Putus Sekolah :											
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	2.70	0.07	0,06	0,02	0,50	0,01	0,04	0,00	0,03	0,00	>
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	3.00	0.10	0,08	0,04	0,06	0,10	0,05	0,04	0,03	0,03	=
	- Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,86	0.50	0,40	0,12	0,35	0,14	0,25	0,01	0,02	0,01	>
2.1.1.8	Angka Kelulusan:											
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97.00	97.79	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	>
	- Angka Kelulusan (AL)	99.50	99.74	99,49	89,58	99,50	99,96	99,65	100,00	99,70	100,00	>



	SMP/MTs											
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	91.92	97.13	98,04	94,24	98,05	99,88	98,50	100,00	98,50	100,00	>
2.1.2	Kesehatan											
2.1.2.1	Angka Kematian Ibu/100.000	219.5	243,3	200	251,7	159.1	194,7	128.9	253,4	102.0	301,7	<
2.1.2.2	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup	14.8	18.7	17	13,3	16	13,9	15	11,6	12.8	15,0	<
2.1.2.3	Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup	11.8	11,7	11.00	9,8	10.30	9,9	9.40	8,0	8.90	11,0	<
2.1.2.4	Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup	20.9	20,9	19.70	15,2	18.50	15,3	17.40	12,8	16.20	16.3	<
2.1.2.5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2.6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	73.5	67	75.00	73,1	81.25	85,70	87.50	87,5	93.75	89,48	<
2.1.2.7	Rasio puskesmas. per satuan penduduk	0.08	0,08	0.08	0,08	0.09	0,08	0.09	0,08	0.09	0.08	<
2.1.2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 1000)	0.007	0,09	0.007	0,01	0.007	0,011	0.007	0,011	0.007	0.012	>
2.1.2.9	Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk	0.66	0,66	0.64	0,84	1.00	0,71	1.00	0,85	1.00	0,77	<
2.1.2.10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	74%	100%	81%	153,84%	90%	110%	92%	129%	94%	94%	>
2..1.2.11	Jumlah masyarakat miskin yang mendpt pelayanan kesehatan gratis	185,310	357.035	170,392	325.236	154,698	235.058	138,199	258.000	120,868	220.000	>
2.1.2.12	Jumlah Posyandu	1279	1.302	1330	1.233	1384	1.310	1440	1.304	1500	1.308	<
2.1.2.13	Rasio posyandu per 100 balita	11.46	11,05	11.65	11,09	11.85	14,58	12.06	11,28	12.28	11,79	<



2.1.2.14	Rasio Pustu per 1.000 penduduk	0.24	0,13	0.24	0,22	0.25	0,21	0.25	0,21	0.26	0.21	<
2.1.2.15	Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat	53.0	60,7	63,5	59	67	42,50	68.78	63,4	69.56	69.5	=
2.1.2.16	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0.25	0,25	0.26	0,24	0.27	0,24	0.28	0,16	0.29	0,14	<
2.1.2.17	Rasio Dokter gigi per satuan penduduk	0.02	0,02	0.02	0,02	0.02	0,02	0.03	0,02	0.04	0,03	<
2.1.2.18	Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk	0.04	0,04	0.05	0,05	0.05	0,05	0.06	0,08	0.06	0.04	<
2.1.2.19	Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk	1.14	1,05	1.23	0,99	1.32	0,99	1.40	1,06	1.49	0,85	<
2.1.2.20	Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk	0.57	0,78	0.66	0,84	0.74	0,84	0.83	0,49	0.91	0,69	<
2.1.2.21	Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk	0.25	0,21	0.27	0,14	0.29	0,22	0.31	0,15	0.33	0,17	<
2.1.2.22	Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk	0.05	0,07	0.06	0,04	0.07	0,06	0.07	0,02	0.08	0,04	<
2.1.3	Pekerjaan Umum											
2.1.3.1	Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yg dibangun & yang ditingkatkan	-	-	10 Km	7,34 Km	33 Km	27,86 Km	10 Km	13,81 Km	10 Km	10Km	=
2.1.3.2	Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	-	-	5 Km	7,12Km	5 Km	5,7 Km	5 Km	10,12 Km	5 Km	10 Km	>
2.1.3.3	Jumlah jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi	1 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	2 Bh	1 Bh	2 Bh	-	2 Bh	-	<
2.1.3.4	Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Strategis provinsi	4 Bh	4 Bh	3 Bh	2 Bh	2 Bh	2 Bh	2 Bh	-	2 Bh	1 Bh	<
2.1.3.5	Jumlah Panjang pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi	14,7 Km	17,97 Km	15,4 Km	12,85 Km	10 Km	8,14 Km	10 Km	22,99 Km	10 Km	8,18 Km	<
2.1.3.6	Jumlah Panjang	52 Km	59 Km	95 Km	142 Km	229,04	209,41	239,04	194,072	249,04	231,04 Km	<



	pemeliharaan rutin jalan Provinsi					Km	Km	Km	Km	Km		
2.1.3.7	Jumlah Panjang jembatan diruas jalan provinsi yang dipelihara	-	-	90 Meter	189,5 Meter	331 Meter	531,31 Meter	372 Meter	477,85 Meter	413 Meter	354,14Meter	<
2.1.3.8	Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (meter)	10.287 M	7.975,34	10.500 M	13.305,75	11.000 M	9.911	11.500 M	11.791,50	12.000 M	12.000	=
2.1.3.9	Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi dan Pemeliharaan)	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	=
2.1.3.10	Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal Pertanian, persawahan, dan permukiman masyarakat	4.877 M	6.690 M	730 M	2.001,29 M	1.120 M	838,29 M	1.580 M	1.366 M	2.200 M	2.200 M	=
2.1.3.11	jumlah panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun bagi permukiman masyarakat	465 M	296 M	271 Meter	92 Meter	200 M	98 M	300 M	167 M	300 M	195 M	<
2.1.3.12	Jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitas dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	16.545 SR (46 % Pencapaian MDG's)	5.265 jiwa	16.545 SR (46 % Pencapaian MDG's)	379 SR	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)	8.370 SR	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)	2.648 jiwa	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)	5.816 jiwa	<
2.1.3.13	Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang terbangun	143 Unit	149 Unit	43 Unit	52 Unit	120 Unit	64 Unit	120 Unit	28 Unit	120 Unit	55 Unit	<
2.1.4	Perumahan											
2.1.4.1	Pengendalian banjir pada kawasan permukiman dan pertanian (ha)	10 Ha	10 Ha	340 Ha	340Ha	361 Ha	361 Ha	323 ha	323 Ha	300 Ha	300 ha	=



2.1.5	Sosial											
2.1.5.1	Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat	39 KK	39 KK	60 KK	60 KK	80 KK	61 KK	100 KK	99 KK	120 KK	130 KK	>
2.1.5.2	Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT	100 KK	100 KK	120 KK	120 KK	140 KK	175 KK	160 KK	170 KK	180 KK	180 KK	=
2.1.5.3	Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza & LKS	165 org	220 org	135 org	145 org	210 org	211 org	285 org	293 org	370 org	917	>
2.1.5.4	Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial	10 lembaga/ 64 org	10 lembaga/ 46 org	10 lembaga/ 64 org	10 lembaga/ 64 org	15 lembaga/ 64 org	23 lembaga/ 64 org	20 lembaga/ 64 org	41 lembaga/ 77 org	20 lembaga/ 64 org	43 lembaga/ 77 org	>
2.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
2.2.1	Tenaga Kerja											
2.1.1.1	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja & Norma K3	300 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	420 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	<
2.1.1.2	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	200 Orang	200 Orang	160 Orang	160 Orang	400 Orang	526 Orang	500 Orang	526 Orang	560 Orang	404 Orang	<
2.1.1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.08 %	63.08%	64.35 %	62%	65.10%	62,48%	65.40%	66.37%	65.75 %	67,89%	>
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.2.2.1	Menekan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	15 Kasus	25 Kasus	30 Kasus	35 Kasus	35 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	=



2.2.2.2	Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tertangani dengan baik	152 Kasus	152 Kasus	127	127 Kasus	92 Kasus	92 Kasus	52 Kasus	52 Kasus	27 Kasus	27 Kasus	=
2.2.2.3	Implementasi Perencanaan Penganggaran yg responsip Gender	10%	10%	25%	25%	50%	65%	75%	75%	100%	100%	=
2.2.2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	36.50 %	43,75%	39.02 %	39,02%	40.97%	52,10%	41.20%	41,20%	42.11 %	42.11%	=
2.2.3	Ketahanan Pangan											
2.2.3.1	Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan	71.3	71.3	77.0	77.0	82.8	62,81	88.5	74,2	94.3	94.3	=
2.2.3.2	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	69.4	69.4	73.2	73.2	77.4	72,8	80.9	78,7	84.7	79,4	<
2.2.3.3	Meningkatnya Ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan di daerah	73.78 %	73,78%	73.78 %	73,78%	80.7%	80.7%	87%	87%	94%	94%	=
2.2.4	Lingkungan Hidup											
2.2.4.1	Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (352 perusahaan)	18 usaha /kegiatan an	18 usaha /kegiatan	18 usaha/ kegiatan an	18 usaha/ kegiatan	20 usaha/ kegiatan	29 usaha/ kegiatan	22 usaha /kegiatan	22 usaha /kegiatan	24 usaha /kegiatan an	24 usaha /kegiatan	=
2.2.4.2	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	76	76	78	95,01	81	98,73	84	72,09	87	72,09	<
2.2.4.3	Cakupan layanan Air bersih dan sanitasi	47 % / 53 %	42,5 % /46,5 %	52 %/ 57 %	44,4%/ 50,01 %	57% / 61 %	52,0%/ 56,0%	62 %/ 65%	66,47 %/ 63,0 %	67% / 69 %	67% / 64,2%	>
2.2.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2.2.5.1	Rumah Layak Huni (Mahyani)	94.3	525 Unit	1000 Unit	1.000 Unit	1000 Unit	800 Unit	1000 Unit	711 Unit	1000 Unit	861 Unit	<
2.2.5.2	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	84.7	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	=



2.2.6	Perhubungan											
2.2.6.1	Meningkatnya layanan angkutan transportasi	3 lintasan angkutan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)	3 lintasan angkutan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)	2 terminal memenuhi kriteria tipe B	2 terminal memenuhi kriteria tipe B	4 terminal memenuhi kriteria tipe B	4 terminal memenuhi kriteria tipe B	6 terminal memenuhi kriteria tipe B	5 terminal memenuhi kriteria tipe B	1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pepadu moda	-	> (Rekomendasi)
				2 unit (subsidi) layanan angkutan pepadu moda	-	2 unit (subsidi) layanan angkutan pepadu moda	-	1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pepadu moda	3 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pepadu moda	5 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Terminal Isimu-Mulyonegoro-Satria, Gtlo-Tapa-Dulama yo)	4 lintasan perintis (Gtlo-Pangea, Gtlo-Mohiyolo, Terminal Isimu-Mulyonegoro-Satria, Gtlo-Panca Karsa)	<



				3 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)	3 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)		2 ruas jalan, APILL 4 unit	>
2.2.6.2	Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo	2.500 ton/hr	3.418 ton/hr	2.600 ton/hr	3.420 ton/hr	2.700 ton/hr	3.526 ton/hr	2.800 ton/hr	4.419 ton/hr	2.900 ton/hr	5.076 ton/hr	>
2.2.7	Komunikasi dan Informatika											
2.2.7.1	Jumlah nilai rata-rata penerapan e-government Prov. (referensi PeGI)	2.55 (kurang)	2.55 (kurang)	2.75 (baik)	2.75 (baik)	3.00 (baik)	2.65 (baik)	3.25 (baik)	2.95 (baik)	3.50 (baik)	3.50 (baik)	=
2.2.7.2	Jumlah SDM Aparatur Pemerintah Provinsi & masyarakat dlm penerapan aplikasi Tek. Informasi	64 orang	64 orang	260 orang	260 orang	320 orang	320 orang	380 orang	380 orang	440 orang	440 orang	=
2.2.7.3	Jumlah nilai rata-rata kepuasan publik dalam mengakses informasi pemerintahan (referensi index kesiapan kompetisi)	>2 (rendah)	>2 (rendah)	>2.5 (cukup)	>2.5 (cukup)	>3 (cukup)	>3 (cukup)	>3.25 (cukup)	>3.25 (cukup)	>3.25 (cukup)	>3.25 (cukup)	=
2.2.8	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
	Jumlah Koperasi (unit)	1.011	1.030	1.045	1.101	1.060	1.148kop	1.080	1.183	1.105	1.236	



2.2.8.1		kopera si	koperasi	kopera si	koperasi	koperasi	erasi	koperasi	koperasi	kopera si	koperasi	>
2.2.8.2	Jumlah Koperasi Berkualitas (unit)	15 Kopera si	15 koperasi	15 kopera si	15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	20 koperasi	15 koperasi	20 kopera si	20 koperasi	=
2.2.8.3	Jumlah UMKM (unit)	61.887 UMKM	62.054 UMKM*	63.915 UMKM	63.434 UMKM	65.705 UMKM	70.590 UMKM	67.413 UMKM	96.124 UMKM	68.829 UMKM	98.054 UMKM	>
2.2.8.4	Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM)	330 UMKM	500 UMKM	330 UMKM	816 UMKM	650 UMKM	850 UMKM	750 UMKM	1.240 UMKM	1.000 UMKM	-	2016 (ditiad akan)
2.2.9	Penanaman Modal											
2.2.9.1	Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN	9 PMA/P MDN	11 PMA/PM DN	11 PMA/P MDN	14 PMA/PM DN	13 PMA/PM DN	15 PMA/PM DN	15 PMA/PMD N	43 PMA/PMD N	17 PMA/P MDN	50 PMA/PMDN	>
2.2.9.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.)	1,667 Trilyun	2.846 Trilyun	2,083 Trilyun	3.023 Trilyun	2,604 Trilyun	3,243 Trilyun	3,255 Trilyun	4,124 Trilyun	4,069 Trilyun	4,145 Trilyun	>
2.2.9.3	Rasio daya serap tenaga kerja	7,714	7.714	9,642	10.497	12,053	18.003	15,066	18.547	18,833	12.134	<
2.2.10	Kepemudaan dan Olahraga											
2.2.10.1	Jumlah organisasi pemuda	26	26	27	27	28	28	29	29	30	34	>
2.2.10.2	Jumlah organisasi olahraga	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	>
2.2.11	Statistik											
2.2.11.1	Buku Gorontalo Dalam Angka dan Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.2.12	Kebudayaan											
2.2.12.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	>
2.2.12.2	Jumlah Pagelaran Budaya	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	=



2.2.13	Perpustakaan											
2.2.13.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3,152 Org	10.531 Org	4,000 Org	12.889 Org	5,000 Org	10.069 Org	6,000 Org	59.621 Org	7,000 Org	260.321 Org	>
2.2.13.1.2	Meningkatnya Jumlah Buku dan Judul Bacaan	5,080	11.799 jdl/ 31.671 eksp	800	1.553	900	1.580	900	2.150	1,000	348.048	>
2.2.13.1.3	Ketersediaan jenis buku dan judul terbitan daerah	80	80	15	30	15	30	20	30	20	20	=
2.2.13.1.4	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan	2	2	15	10	30	17	35	17	35	16	<
2.2.14	Kearsipan											
2.2.14.1	Peningkatan SDM & pengelola kearsipan (orang)	-	-	30	30	65	105	70	120	70	70	=
2.3	Layanan Urusan Pilihan											
2.3.1	Pariwisata											
2.3.1.1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan (org)	92,000	92.000	95,000	110.517	100,000	356.799	105,000	368.000	110,000	370.000	>
2.3.1.2	Meningkatnya lama tinggal	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	<
2.3.2	Pertanian											
2.3.2.1	Peningkatan produksi padi 3% per tahun (ton)	290,588	245.786	299,363	259.913	308,896	314.703	318,614	331.220	328,521	344.870	>
2.3.2.2	Peningkatan produktivitas padi sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha)	53.49	48,01	54.56	52,01	55.63	50,20	56.70	55,51	57.77	52,10	<
2.3.2.3	Peningkatan Produksi Jagung sebesar 9,29% per tahun (ton)	656,864	644.754	719,652	669.094	789,512	719.780	850,269	643.513	927,436	911.350	<
2.3.2.4	Peningkatan Produktivitas Jagung Sebesar 2,66% per tahun	48.46	47.57	50.42	47,65	51.89	48,37	52.87	49,83	54.00	46,59	<



	(ku/ha)											
2.3.2.5	Produksi Kedelai sebesar 3 % per tahun (ton)	2.247	3.451	2,337	4.411	2,407	4.273	2,454	3.203	2,502	3.910	>
2.3.2.6	Produktivitas Kedelai (ku/ha)	12.53	12,1	12.78	13,10	13.03	15,04	13.15	13,48	13.27	15,68	>
	<i>Komoditi Hortikultura :</i>											
2.3.2.7	Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton)	16,551	47.173	17,048	44.032	17,559	35.515	18,086	26.489	18,629	32.345	<
2.3.2.8	Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn)	16,852	26.852	16,978	65.325	17,148	48.026	17,319	1.187	17,492	595	<
2.3.2.9	Peningkatan Produksi Buah - buahan 2 % per Tahun (Ton)	12,952	12.952	13,211	14.671	13,475	18.182	13,744	24.596	14,019	13.065	<
2.3.2.10	Peningkatan Produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) 1 %/Tahun (Kg)	186,400	185.310	188,270	120.763	190,153	126.535	192,054	24.941	193,975	126.504	<
2.3.2.11	Perluasan Areal Tebu (Ha)	1,764	10.228	1,764	7.768	1,864	7.301	1,864	7.719	1,940	7.049	<
2.3.2.12	Produksi Tebu (Ton)	30,195	32.521	30,467	49.333	30,741	49.333	31,018	49.147	31,297	33.745	>
2.3.2.13	Perluasan Areal Cengkih (Ha)	8,880	8880	9,150	9.370	9,550	9.670	10,153	9.091	10,637	10,350	<
2.3.2.14	Produksi Cengkih (Ton)	910	772	911	756	912	756	912	604	913	609	<
2.3.2.15	perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha)	65,664	65.664	66,506	64.802	66,806	66.695	67,156	66.715	67,487	67.495	>
2.3.2.16	Produksi Kelapa Dalam (Ton)	62,369	61.192	62,400	63.386	62,432	63.499	62,463	52.034	62,494	54.865	<
2.3.2.17	Perluasan Areal Kakao (Ha)	12,928	12.928	13,823	13.692	14,123	14.205	14,631	14.494	15,114	15,107	<
2.3.2.18	Produksi Kakao (Ton)	3,923	3.923	3,962	5.043	4,002	5.043	4,042	2.948	4,082	4.082	<



2.3.2.19	Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor)	191,223	202.974	198,872	174.858	206826	192.229	215,100	199.743	223,704	211.954	<
2.3.2.20	Peningkatan Populasi Kambing (Ekor)	86,077	94,679	88,659	83.472	91,319	82.205	94,059	86.344	96,881	93.274	<
2.3.2.21	Peningkatan Populasi Ayam Buras (Ekor)	1,104,859	997.183	1,270,588	1.379.645	1,461,176	1.335.806	1,680,353	1.376.518	1,932,405	1.440.567	<
2.3.2.22	Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg)	4,064,695	4.064.695	4,145,989	3.617.458	4,228,909	2.460.441	4,313,487	3.006.216	4,399,756	3.392.361	<
2.3.2.23	Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg)	183,747	221.641	194,772	66.071	206,458	68.443	218,845	157.948	231,976	198.327	<
2.3.2.24	Peningkatan Produksi Daging Ayam Buras (Kg)	1,657,415	1.476.532	1,939,176	1.519.126	2,268,835	1.470.856	2,654,537	1.515.684	3,105,809	1.713.346	<
2.3.2.25	Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th)	2.7	3.00	2.9	2.21	3.2	2.99	3.4	2.99	3.7	2.96	<
2.3.3	Kehutanan											
2.3.3.1	Rehabilitasi hutan & lahan kritis (Ha)	14,700	21.757	15,000	33.207	15,350	37.507	15,750	38.307	16,200	39.112	>
2.3.3.2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	243,116	236.059	228,116	224.609	212,766	220.309	197,016	219.509	180,816	218.704	>
2.3.3.3	Produksi hasil hutan											
	a. Kayu Bulat (m3)	55,235	5.029,26	56,000	21.722,44	57,000	60.764,61	58,000	26.410,93	59,000	6.820,76	<
	b. Kayu Gergajian (m3)	2,596.43	1.958,68	2,621.43	15.206,06	2,646.43	21.267,61	2,671.43	17.167,10	2,696.43	4.433,94	<
	c. Non Kayu (ton)	6,200	11.336	6,200	1.147	6,200	880	6,200	750	6,200	705,12	<



2.3.4.1	Energi dan Sumber Daya Mineral											
2.3.4.1	Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina	16.74%	20,50%	20.76%	24.26%	27.46%	28,01%	34.16%	31.76%	40.86%	35,53%	<
2.3.4.2	Ratio Elektrifikasi	72,12 %	72,44%	74,75 %	73,58%	75,75%	74,48%	76,75%	76,48%	77,75 %	78,16%	>
2.3.5.1	Perdagangan											
2.3.5.1	Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun	1 pasar tradisional	1 pasar tradisional	3 pasar tradisional	6 pasar tradisional	4 pasar tradisional	4 pasar tradisional	4 pasar tradisional	5 pasar tradisional	4 pasar tradisional	4 pasar tradisional	>
2.3.5.2	Jumlah perdagangan antar pulau (ton)	768.736 ton	768.736 ton	789.492 ton	810.617 ton	810.617 ton	66.126 ton	844.663 ton	620.902 ton	879.294 ton	120.118 ton	<
2.3.5.3	Perkembangan ekspor	17.012 ton	17.012 ton	68.046 ton	83.529 ton	102.070 ton	72.608 ton	142.897 ton	144.291 ton	200.056 ton	148.520,19 ton	<
2.3.6	Perindustrian											
2.3.6.1	Jumlah IKM (unit)	12.140 IKM	12.602 IKM	12.706 IKM	13.542 IKM	13.075 IKM	13.668 IKM	13.323 IKM	14.762 IKM	13.696 IKM	14.339 IKM	>
2.3.6.2	Jumlah Sentra IKM (unit)	272 sentra	280 sentra	280 sentra	289 sentra	289 sentra	289 sentra	297 sentra	297 sentra	312 sentra	297 sentra	<
2.3.6.3	Berkembangnya kluster industri	0 kluster	0 kluster	1 kluster	1 kluster	1 kluster	1 kluster	2 kluster	1 kluster	2 kluster	1 kluster	<
2.3.7	Ketransmigrasian											
2.3.7.1	Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	1 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras	2 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras	=
2.3.8	Kelautan dan Perikanan											
2.3.8.1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	85,815	85.815	90,964	92.171,3	97,331	103.017,80	105,118	105.715	114,578	115.873	>
2.3.8.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	133,340	133.340	144,007	125.654,50	156,248	57.392,30	170,310	30.158	186,490	100.245	<
	- Produksi Ikan Budidaya	26,668	26.668	28,801	21.730,3	31,250	32.457	34,062	26.363,92	37,298	38.295	>



	(Ton)											
	- Produksi rumput laut (Ton)	106,67 2	106.672	115,20 6	103.924, 2	124,998	24.935,3 0	136,248	36.767,30	149,19 2	61.950	<
2.3.8.3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	75,700	75.853	82,133	82.203	89,935	90.847	99,379	118.932,1	110,80 7	110.250	<
2.3.8.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	46.93	49,40	49	48,6	51	46,81	53	54,8	55	55,7	>
2.3.8.5	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	430	474	467	467	511	731	565	680	630	630	=
2.3.8.6	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	1,945, 558	2.184.84 9	2,074, 539	2.968.64 2	2,234,9 01	2.597.00 0	2,413,693	2.500.000	2,648, 545	2.700.000	>
2.3.8.7	Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)	1,662, 465	1. 667.900	1,773, 855	1.790.75 0	1,910,4 42	1.975.00 0	2,076,650	2.470.000	2,278, 085	2.500.000	>
2.3.8.8	Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln)	2,500, 000	2.556.30 0	2,700, 000	2.359.18 3	2,916,0 00	3.830.16 6	3,149,280	3.200.000	3,401, 204	3.400.000	<
2.3.8.9	Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)	6	6	10	10	12	12	14	14	16	16	=
3	DAYA SAING DAERAH											
3.1	Pertanian											
3.1.1	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)											
	- Subsektor Tanaman Pangan	91.82	91,76	91.84	88,58	91.86	96,43	91.89	98,34	91.91	108,38	>
	- Subsektor Hortikultura	110.36	110,33	110.38	113,63	110.40	113,92	110.43	123,61	110.45	116,75	>
3.1.2	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	105	105,73	105.50	107,70	106.45	100,11	107.42	99,64	108.41	101,37	<
3.1.3	Nilai Tukar Petani Kebun	128.00	129,87	128.01	123,89	128.03	97,71	128.04	94,13	128.05	97,05	<
4	Penunjang Urusan											



4.1	Perencanaan Pembangunan											
4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan Pergub	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	=
4.1.2	Terwujudnya sistem perencanaan yang didukung oleh dokumen perencanaan yang terintegrasi (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)	-	-	30%	30%	50%	50%	75%	75%	100%	100 %	<
4.2	Keuangan											
4.2.1	Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan											
4.3.1	Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (IKPK)	0	76.14	50	74.18	60	72,03	70	87,84	80	88%	>
4.3.2	Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap OPD	55%	55%	55%	55%	70%	96%	80%	80%	90%	98%	>
4.3.3	Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai Standar Kompetensi Jabatan	55%	67%	55%	60%	70%	91%	80%	85,6%	90%	93%	>
4.3.4	Lembaga diklat yang terakreditasi	Belum terakreditasi	Belum terakreditasi	Akreditasi:	Akreditasi:	Akreditasi:	Akreditasi:	Akreditasi:	Akreditasi:	Akreditasi:	Akreditasi:	
		(Ket: Sebelumnya ada tapi sudah	(Ket: Sebelumnya ada tapi sudah dicabut)	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "A"	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "A"	- Prajabtan "V"	<



		dicabu t)										
				- Dikla tpim IV "C"	- Diklatpi m IV "C"	- Diklat pim IV "C"	- Diklatpi m IV "B"	- Diklatpi m IV "B"	- Diklatpim IV "B"	- Dikla tpim IV "B"	- Diklatpim IV "B"	=
				- Dikla tpim III "C"	- Diklatpi m III "C"	- Diklat pim III "C"	- Diklatpi m III "B"	- Diklatpi m III "B"	- Diklatpim III "B"	- Dikla tpim III "B"	- Diklatpim III "B"	=
4.4	Penelitian dan Pengembangan											
4.4.1	Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian	5 kajian	6 kajian	4 kajian	3 kajian	5 kajian	5 kajian	6 kajian	2 kajian	7 kajian	1 kajian	<
4.5	Sekretariat DPRD											
4.5.1	Tersusunnya produk hukum daerah	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 15 Pergub / SK 603	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	13 Perda	<
4.5.2	Unit Pelayanan Publik (UPP) OPD yang telah menerapkan SOP, CPP/CBAN	4 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov	9 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov	>

Sumber : RKPD Provinsi Gorontalo 2018